UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS TESIS ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

PRAKATA iv

ABSTRAKSI vi

ABSTRACT vii

DAFTAR ISI viii

DAFTAR LAMPIRAN xi

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR GAMBAR xiv

DAFTAR SINGKATAN xv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 4

1.3 Pertanyaan Penelitian 5

1.4 Tujuan penelitian 5

1.5 Motivasi Penelitian 5

1.6 Kontribusi Penelitian 6

1.7 Proses Penelitian 7

BAB II KAJIAN PUSTAKA 8

2.1 Artikulasi Laporan Keuangan 8

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

2.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 11

2.3 Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 15

2.4 Penelitian-penelitian Terdahulu 22

BAB III METODE PENELITIAN 25

3.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 25

3.2 Rasionalitas Obyek Penelitian 27

3.3 Pendekatan Penelitian 28

3.4 Teknik Pengumpulan Data 29

3.5 Analisis Data 30

3.6 Validitas dan Reliabilitas 32

BAB IV ANALISIS DAN DISKUSI 34

4.1 Analisis Artikulasi LKPD Se-Jawa dan Bali 34

4.2 Analisis Artikulasi LKPD Berbasis Kas Menuju Akrual 39

4.2.1 Analisis Artikulasi Antarpos dalam Suatu Komponen LKPD 39

4.2.2 Analisis Artikulasi Antarkomponen LKPD 42

4.2.3 Artikulasi Kumulatif LKPD Berbasis Kas Menuju Akrual 45

4.3 Analisis Artikulasi LKPD Berbasis Akrual 48

4.3.1 Analisis Artikulasi Antarpos dalam Suatu Komponen LKPD 48

4.3.2 Analisis Artikulasi Antarpos dalam Suatu Komponen LKPD 51

4.3.3 Artikulasi Kumulatif LKPD Berbasis Akrual 54

4.4 Identifikasi Tipe Ketidakartikulasian LKPD Berbasis Kas Menuju Akrual 55

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

4.5 Identifikasi Tipe Ketidakartikulasian LKPD Berbasis Akrual.....68

BAB V PENUTUP 74

5.1 Simpulan 74

5.2 Rekomendasi 76

5.3 Keterbatasan Penelitian..... 77

DAFTAR PUSTAKA 79

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 82

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Rincian Capaian Tingkat Artikulasi Antarpos LKPD Berbasis Kas Menuju Akrual se-Jawa dan Bali 82

Lampiran II Rincian Capaian Tingkat Artikulasi Antarkomponen LKPD Berbasis Kas Menuju Akrual se-Jawa dan Bali 89

Lampiran III Contoh Kertas Kerja Analisis Artikulasi LKPD Berbasis Kas Menuju Akrual 96

Lampiran IV Contoh Kertas Kerja Analisis Artikulasi LKPD Berbasis Akrual 112

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 LKPD Berdasarkan Basis Akuntansi yang Diterapkan 12

Tabel 2.2 Kategori Laporan Keuangan Pemerintah Sesuai PP 71 Tahun 2010 ... 13

Tabel 2.3 Komponen LKPD 18

Tabel 2.4 Pos-pos/Unsur LKPD 20

Tabel 2.5 Derajat Kesesuaian Antarpos-pos dan Antarkomponen LKPD Pemerintah Kabupaten Payakumbuh 23

Tabel 3.1 Ikhtisar Opini BPK RI atas LKPD Tahun 2014 Se-Jawa dan Bali 26

Tabel 3.2 Ikhtisar Opini BPK RI atas LKPD Tahun 2014-2013 Se-Jawa dan Bali 26

Tabel 4.1 Contoh Hasil Analisis Artikulasi Suatu LKPD 36

Tabel 4.2 Kelompok Tingkat Capaian Artikulasi LKPD 36

Tabel 4.3 LKPD Se-Jawa dan Bali Berdasarkan Kelompok Tingkat Capaian Artikulasi 37

Tabel 4.4 Hasil Analisis Artikulasi LKPD Berbasis Akrual 37

Tabel 4.5 Kriteria Artikulasi Antarpos LKPD Berbasis Kas Menuju Akrual 39

Tabel 4.6 Hasil Analisis Artikulasi Antarpos LKPD Berbasis Kas Menuju Akrual Se-Jawa dan Bali 41

Tabel 4.7 Kriteria Artikulasi Antarkomponen LKPD Berbasis Kas Menuju Akrual 42

Tabel 4.8 Hasil Analisis Artikulasi Antarkomponen LKPD Berbasis Kas Menuju Akrual 43

Tabel 4.9 Tingkat Artikulasi Kumulatif LKPD Berbasis Kas Menuju Akrual 45

Tabel 4.10 Kriteria Artikulasi Antarpos dalam Suatu LKPD Berbasis Akrual ... 49

Tabel 4.11 Tingkat Capaian Artikulasi Antarpos LKPD Berbasis Akrual 50

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Tabel 4.12 Kriteria Artikulasi Antarkomponen LKPD Berbasis Akrual 51

Tabel 4.13 Tingkat Capaian Artikulasi Antarkomponen LKPD Berbasis Akrual 53

Tabel 4.14 Tingkat Capaian Artikulasi Kumulatif LKPD Berbasis Akrual 54

Tabel 4.15 Tipe Ketidakartikulasian LKPD Berbasis Kas Menuju Akrual 55

Tabel 4.16 Sebaran Kejadian Tipe Ketidakartikulasian LKPD..... 56

Tabel 4.17 Akibat Perlakuan Berbeda pada LRA BLUD dan LAK BLUD Saat Konsolidasi 59

Tabel 4.18 Penyajian Saldo Akhir Kas di LAK dan Neraca LKPD Pemkab. Bondowoso 60

Tabel 4.19 Perbedaan SILPA di LRA dan Neraca LKPD Pemkab. Pasuruan 61

Tabel 4.20 Perbedaan Pengeluaran Pembiayaan di LRA dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan Pemkab. Malang 62

Tabel 4.21 Perbedaan Dana Disediakan untuk Pembayaran Kewajiban Jangka Pendek dengan Kewajiban Jangka Pendek Pemkab. Magetan 63

Tabel 4.22 Kesalahan Klerikal pada LKPD Pemkab. Pacitan 63

Tabel 4.23 Kas Lebih Kecil dari SILPA pada LKPD Pemkab. Pasuruan..... 64

Tabel 4.24 Saldo Kas Tidak Mencerminkan SILPA, Utang PFK dan Pendapatan yang Ditangguhkan pada LKPD Pemkab. Sidoarjo 65

Tabel 4.25 Penerimaan Pembiayaan Selain Penggunaan SILPA Tidak Sama Dengan Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan Pada Pemkab. Tulungagung 66

Tabel 4.26 Kesalahan Penjulahan LAK pada LKPD Pemkab. Tasik Tahun 2014 67

Tabel 4.27 Saldo Awal Kas di BUD Tahun 2014 Berbeda Dengan Saldo Akhir Kas di BUD Tahun 2013 pada LKPD Pemkab. Buleleng dan Pemkab. Depok 68

Tabel 4.28 Tipe Ketidakartikulasian LKPD Berbasis Akrual 69

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 *Reciprocity Whilst Moving Forward*..... 7

Gambar 2.1 Artikulasi Statemen Keuangan..... 9

Gambar 2.2 Ilustrasi Hubungan Antarjenis Laporan Keuangan 10

Gambar 4. 1 Proses Analisis Artikulasi LKPD 35

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR SINGKATAN

APBN/D	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah
BLU	:	Badan Layanan Umum
BLUD	:	Badam Layanan Umum Daerah
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
Bultek	:	Buletin teknis
CaLK	:	Catatan atas Laporan Keuangan
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
IAI	:	Ikatan Akuntan Indonesia
IHPS	:	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
LAK	:	Laporan Arus Kas
LHP	:	Laporan Hasil Pemeriksaan
LKPD	:	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LO	:	Laporan Opersional
LPE	:	Laporan Perubahan Ekuitas
LPSAL	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
PP	:	Peraturan Pemerintah
PSAP	:	Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

RI	:	Republik Indonesia
SAL	:	Saldo Anggara Lebih
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
TMP	:	Tidak Memberikan Pendapat
TW	:	Tidak Wajar
UU	:	Undang-Undang
UUD	:	Undang-Undang Dasar
WDP	:	Wajar Dengan Pengecualian
WTP	:	Wajar Tanpa Pengecualian

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 31 menyebutkan bahwa kepala daerah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kepada dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan Republika Indonesia (BPK RI). Selanjutnya dalam pasal 32 disebutkan bahwa laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP).

LKPD sebagai bagian dari informasi akuntansi hendaknya bermanfaat. Givens (1996) merekomendasikan dua rumusan dasar akuntansi (*basic accounting postulates*) yaitu informasi akuntansi harus bermanfaat dan kewajaran harus menjadi dasar dalam akumulasi dan penyajian informasi akuntansi. Hal tersebut sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 1 Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 9 yang menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakannya.

Kerangka Konseptual (KK) Paragraf 32 menyatakan pelaporan

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

keuangan yang bermanfaat ditunjukkan dengan laporan keuangan berkualitas yang memenuhi empat prasyarat normatif karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan yang relevan berarti informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat memengaruhi keputusan pengguna karena informasi tersebut memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu dan lengkap disajikan (KK Par. 33). Laporan keuangan yang andal yaitu laporan keuangan yang memiliki informasi yang bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi (KK Par. 34). Laporan keuangan yang dapat dibandingkan berarti informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lainnya (KK Par. 35). Laporan keuangan yang dapat dipahami jika informasi yang disajikan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna (KK Par. 36).

LKPD berkualitas dihasilkan melalui beberapa tahapan proses. Pertama, LKPD disusun dan disajikan dari suatu proses akuntansi. Kedua, LKPD yang dihasilkan dari proses akuntansi harus melalui reviu oleh inspektorat provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. LKPD hasil reviu memuat pernyataan tanggung jawab dari kepala daerah berupa

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

pernyataan atau asersi yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan SAP. Ketiga**,** LKPD sebelum diserahkan kepada DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala daerah harus diaudit terlebih dahulu oleh BPK. Setelah melewati tiga tahap di atas, LKPD diharapkan memenuhi semua karakteristik kualitatif laporan keuangan khususnya karakteristik yang akan peneliti uji yaitu karekateristik andal. Karakterisitik andal menghendaki laporan keuangan terbebas dari kesalahan dan salah saji material seperti tidak terdapat kesalahan artikulasi antarpos-pos/unsur dalam suatu komponen laporan keuangan maupun antarkomponen laporan keuangan.

Sebagai bagian dari proses menghasilkan LKPD berkualitas, pada tahun 2015 BPK RI telah melakukan audit atas LKPD tahun 2014 sebanyak 504 LKPD (BPK RI, 2015). Hasil audit memperlihatkan, LKPD tahun 2014 mengalami kenaikan opini yang signifikan. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kenaikan opini pada 130 LKPD. Sebanyak 104 LKPD mengalami kenaikan opini dari wajar dengan pengecualian (WDP) menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP) dan 26 LKPD dari tidak wajar (TW) atau tidak memberi pendapat (TMP) menjadi WDP, meskipun masih terdapat LKPD yang mengalami penurunan opini sebanyak 20 LKPD. Kenaikan opini menandakan LKPD semakin berkualitas. Namun LKPD yang beropini WTP apakah sudah menjamin terbebas dari kesalahan artikulasi? Ini memerlukan penelitian selanjutnya.

Penelitian artikulasi laporan keuangan telah dilakukan pada sektor

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

privat seperti penelitian Bahnson, Miller, & Budge (1996) yang meneliti sebanyak 9.757 set laporan keuangan tahun 1987 s.d. 1990 di Amerika Serikat. Kinnunen & Koskella (1999) menemukan adanya indikasi laporan arus kas tidak selalu berartikulasi dengan laporan laba rugi dan neraca pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Finlandia sejak tahun 1995 s.d. 1997. Penelitian yang mengkhususkan mengenai artikulasi laporan keuangan di Indonesia baik sektor privat maupun publik, sejauh pengetahuan terbaik peneliti, belum pernah dilakukan. Penelitian yang dilakukan (Dona, 2013) menekankan pada evaluasi kesesuaian pelaksanaan reviu atas laporan keuangan pada Inspektorat Kota Payakumbuh. Salah satu yang dinilai adalah kesesuaian antarpos-pos LKPD dan tingkat kesesuaian antarlaporan keuangan. Sedangkan penelitian lain (Prasetio 2012, Muchtar 2013, Windarsih 2015) meneliti hubungan reviu dan peran auditor internal dengan kualitas LKPD, namun tidak menilai kesesuaian antarpos-pos LKPD dan tingkat kesesuaian antarlaporan keuangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat permasalahan artikulasi dalam laporan keuangan baik sektor privat maupun sektor publik. Belum diketahui adanya jaminan bebas dari kesalahan artikulasi LKPD pada laporan hasil audit BPK RI yang beropini WTP serta belum adanya penelitian di Indonesia yang memfokuskan tentang artikulasi LKPD mengarahkan peneliti untuk mendapatkan bukti empiris mengenai artikulasi LKPD tahun 2014 yang beropini WTP.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari permasalahan penelitian di atas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah:

1. Bagaimana artikulasi LKPD tahun 2014 se-Jawa dan Bali yang beropini WTP?
2. Apabila LKPD beropini WTP dan terjadi kondisi tidak artikulasi, apakah tipe-tipe ketidakartikulasian tersebut?

1.4 Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. menganalisis artikulasi LKPD tahun 2014 se-Jawa dan Bali yang beropini WTP,
2. mengidentifikasi tipe-tipe ketidakartikulasian LKPD.

1.5 Motivasi Penelitian

Kenaikan opini yang diberikan oleh BPK RI atas LKPD tahun 2014 mengindikasikan adanya peningkatan tata kelola keuangan yang semakin baik yang menghasilkan LKPD yang semakin berkualitas. LKPD yang berkualitas salah satunya harus memenuhi karakteristik andal. Laporan keuangan yang andal harus terbebas dari kesalahan dan salah saji material termasuk tepat dan benarnya artikulasi antarpos-pos maupun antarkomponen laporan keuangan. Adanya kenaikan opini BPK RI yang siginifikan atas LKPD tahun 2014 dan apakah LKPD yang beropini terbaik (WTP) tersebut telah berartikulasi serta belum adanya penelitian

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

sebelumnya mengenai artikulasi LKPD, merupakan motivasi yang kuat bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini.

1.6 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut.

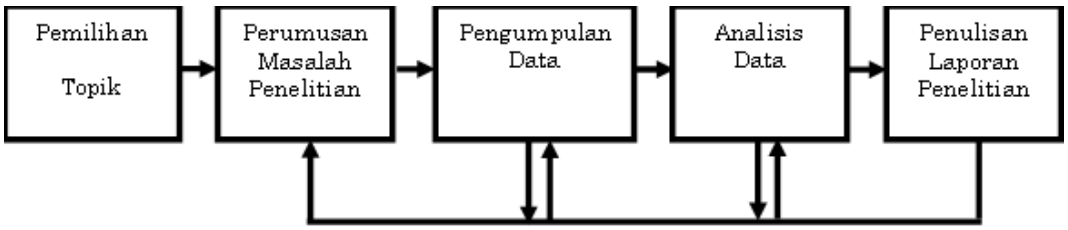
1. Kontribusi praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan masukan kepada:
   a. Kementerian Dalam Negeri dalam mempertimbangkan revisi pedoman reviu LKPD, agar permasalahan artikulasi LKPD sangat diperhatikan ketika proses reviu berlangsung,
   b. Pemerintah daerah dalam implementasi sistem akuntansi dan penyusunan LKPD untuk terus memerhatikan keartikulasian LKPD,
   c. BPK RI dalam melakukan pemeriksaan LKPD agar memasukkan dalam program auditnya mengenai analisis artikulasi LKPD, memerhatikannya, dan melakukan koreksi yang diperlukan agar LKPD yang disajikan telah artikulasi.
2. Kontribusi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan model analisis artikulasi LKPD sehingga dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak lain yang tertarik untuk menggunakan model tersebut dan dalam melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai artikulasi LKPD di Indonesia.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

1.7 Proses Penelitian

Soeratno dan Arsyad (2008 h. 2) menyatakan bahwa penelitian merupakan proses yang berjalan secara terus-menerus yang terus disempurnakan dalam usaha menjawab persoalan. Efferin (2016) -- dalam kuliah umum penelitian kualitatif di Universitas Gadjah Mada, 16 Februari 2016 -- menyampaikan metodologi penelitian kualitatif mengikuti proses timbal balik yang terus bergerak maju (*reciprocity whilst moving forward*). Proses tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1.1
Reciprocity Whilst Moving Forward



(Efferin 2016, Kuliah Umum Penelitian Kualitatif di Universitas Gadjah Mada)

Dari gambar di atas diketahui bahwa setelah pemilihan topik, proses penelitian akan terus bergerak maju hingga penulisan laporan penelitian. Namun, selama tahapan penelitian ada proses timbal balik yang dapat memengaruhi tahap sebelum maupun sesudahnya, mengingat perbaikan terus-menerus dimungkinkan untuk menghasilkan laporan penelitian yang diharapkan.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Artikulasi Laporan Keuangan

Makna *artikulasi* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia 2008) ialah *1 sendi; 2 a sambungan di antara dua bagian, msl tempat melekatnya daun pd ranting; b buku pd batang; 3 a lafal, pengucapan kata; b perubahan rongga dan ruang dl saluran suara untuk menghasilkan bunyi bahasa.* Sedangkan kata *artikulasi* dalam penggunaan ilmu akuntansi sebagaimana disampaikan oleh Suwardjono (2013, h. 220) sebagai berikut:

> artikulasi merupakan turunan atau konsekuensi dari konsep kesatuan usaha. Dengan artikulasi, akan selalu dapat ditunjukkan bahwa laba dalam statemen laba-rugi akan sama dengan laba dalam statemen berubahan ekuitas dan jumlah rupiah ekuitas akhir dalam statemen perubahan ekuitas akan sama dengan jumlah rupiah ekuitas dalam neraca.

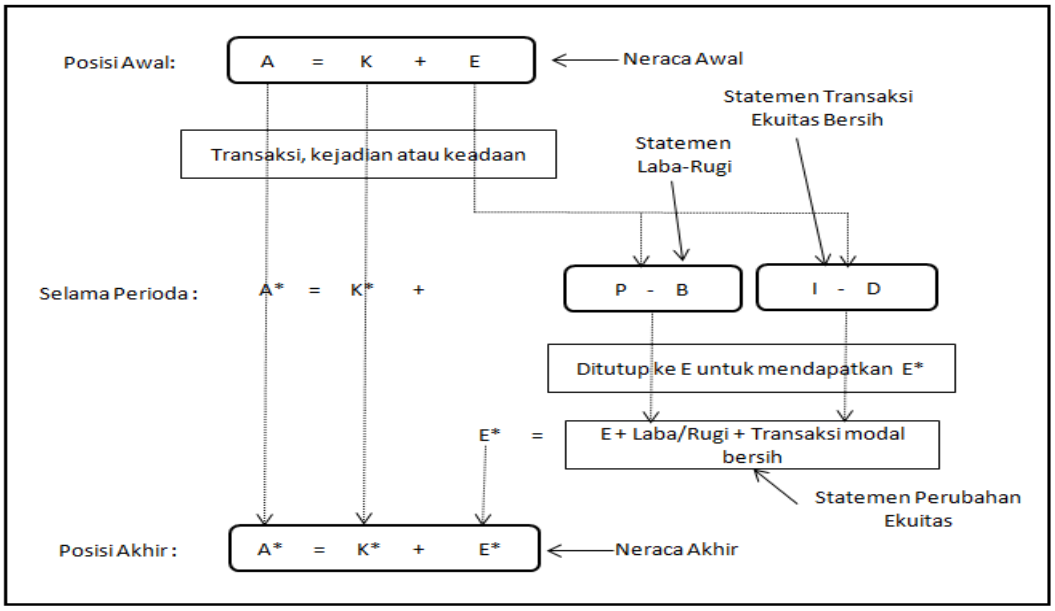
Artikulasi laporan keuangan terjadi mengingat laporan keuangan disusun dari elemen-elemen laporan keuangan yang merepesentasikan persamaan akuntansi. Suwardjono (2013, h. 220) menyatakan sistem akuntansi diorganisasi atas dasar persamaan akuntansi yang merupakan hubungan fungsional buku besar yang dinyatakan sebagai berikut:

Aset (A) = Kewajiban (K) + Ekuitas (E) + Pendapatan (P) – Biaya (B)

Artikulasi laporan keuangan dalam konteks persamaan akuntansi digambarkan oleh Suwardjono (2013, h. 221) seperti dalam gambar berikut:

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Gambar 2.1
Artikulasi Statemen Keuangan



(Suwardjono, 2013 h.220)

Dari gambar 2.1 dapat diketahui bahwa artikulasi akan terjadi pada jumlah akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas akan sama dengan jumlah ekuitas pada neraca akhir. Sedangkan jumlah ekuitas akhir dalam laporan perubahan ekuitas diperoleh dari ekuitas pada neraca awal ditambah laba/rugi dalam laporan laba-rugi dan transaksi modal bersih dalam laporan transaksi modal bersih.

Weygandt, Kimmel dan Kieso (2013, h. 22-23) menyatakan hubungan antarlaporan keuangan tidak menggunakan kata *artikulasi* melainkan menggunakan kata *saling berhubungan* (*interrelated*). Dalam organisasi privat, perusahaan menyiapkan empat jenis laporan keuangan yaitu laporan laba-rugi (*income statement*), laporan laba ditahan (*retained earnings statement*), laporan posisi keuangan/neraca (*statement of financial position/balance sheet*), dan laporan aliran kas (*statement of cash flows*). Keempat jenis laporan keuangan tersebut saling berhubungan diilustrasikan sebagai berikut:

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Gambar 2.2
Ilustrasi Hubungan Antarjenis Laporan Keuangan

Softbyte Inc.
Laporan Laba-Rugi
Untuk bulan yang berakhir 30 September 2014

Pendapatan		
Pendapatan Jasa		€ 4.700
Beban		
Beban Gaji dan Upah	€ 900	
Beban Sewa	600	
Beban Iklan	250	
Beban Perlengkapan	200	
Total Beban		1.950
Laba Bersih		**€ 2.750**

Softbyte Inc.
Laporan Laba Ditahan
Untuk bulan yang berakhir 30 September 2014

Laba ditahan, 1 September	€ 0
Ditambah: Laba Bersih	**2.750**
	2.750
Dikurangi: Deviden	1.300
Laba ditahan	**€ 1.450**

Softbyte Inc.
Laporan Posisi Keuangan
Per 30 September 2014

Aset		
Peralatan		€ 7.000
Perlengkapan		1.600
Piutang Usaha		1.400
Kas		**8.050**
Total Aset		€ 18.050
Ekuitas dan Kewajiban		
Ekuitas		€ 7.000
Modal Saham--biasa	**€ 15.000**	
Laba Ditahan	**1.450**	**€ 16.450**
Kewajiban		
Utang Usaha		1.600
Total Ekuitas dan Kewajiban		€ 18.050

Softbyte Inc.
Laporan Aliran Kas
Untuk bulan yang berakhir 30 September 2014

Aliran kas dari aktivitas operasi		
Kas masuk dari pendapatan		€ 3.300
Kas keluar untuk beban		(1.950)
Kas bersih dari aktivitas operasi		1.350
Aliran kas dari aktivitas investasi		
Pembelian Peralatan		(7.000)
Aliran kas dari aktivitas pendanaan		
Penjualan saham biasa	€ 15.000	
Pembayaran dividen kas	(1.300)	13.700
Kenaikan kas besih		8.050
Kas pada awal periode		0
Kas pada akhir periode		**€ 8.050**

Catatan:
Tanda panah menunjukkan hubungan timbal balik (*interrelationships*) dari empat jenis laporan keuangan

(Weygandt, Kimmel dan Kieso 2013 h. 23)

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Dari gambar 2.2 diketahui sebagai berikut.

1. Laporan laba rugi akan berartikulasi dengan laporan laba ditahan dimana laba/rugi bersih akan menambah/mengurangi laba ditahan pada laporan laba ditahan atau dengan kata lain jumlah laba/rugi bersih pada laporan laba rugi akan sama persis dengan laba/rugi bersih yang tercantum pada laporan laba ditahan.
2. Laporan laba ditahan akan berartikulasi dengan laporan posisi keuangan dimana jumlah laba ditahan akan menambah/mengurangi jumlah ekuitas pada laporan posisi keuangan/neraca atau dengan kata lain jumlah laba ditahan pada laporan laba ditahan akan tercantum sama dengan jumlah laba ditahan sebagai penambah/pengurang ekuitas pada laporan posisi keuangan.
3. Laporan posisi keuangan akan berartikulasi dengan laporan aliran kas dimana jumlah kas pada laporan keuangan akan sama dengan jumlah kas akhir pada laporan aliran kas.

2.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) berasal dari kata *laporan keuangan* dan *pemerintah daerah*. Laporan keuangan merupakan produk dari suatu proses akuntansi. Penjelasan tersebut dapat diketahui dari Ritonga (2010, h. 3) dalam mendefinisikan akuntansi yaitu:

> Akuntansi adalah proses identifikasi, mencatat (jurnal), menggolongkan (*posting*), dan meringkas transaksi-transaksi ekonomi/keuangan yang dilakukan oleh suatu entitas, serta melaporkan hasil-hasilnya di dalam suatu laporan keuangan yang disebut laporan keuangan.

Halim dan Kusufi (2012, h. 37) menyatakan bahwa kata *entitas* dapat

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

diartikan sebagai satuan organisasi. Contoh satuan organisasi adalah organisasi perusahaan dan organisasi pemerintahan. Organisasi pemerintahan di Indonesia terdiri atas pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi:

> Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Sehingga kata *entitas* dapat berupa pemerintahan daerah yang terdiri atas pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten dan pemerintahan kota.

Jika digabungkan penjelasan antara *laporan keuangan* dan *pemerintah daerah*, maka dapat dimengerti bahwa LKPD adalah laporan keuangan yang dihasilkan dari suatu proses akuntansi yang dilakukan oleh suatu entitas pemprov/pemkab/pemkot di Indonesia. Sehubungan dengan penerapan dua basis akuntansi yang berbeda pada penyusunan dan penyajian LKPD di Indonesia, maka LKPD dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu LKPD berbasis kas menuju akrual (sesuai PP No. 24 Tahun 2005) dan LKPD berbasis akrual (sesuai PP No. 71 Tahun 2010) yaitu:

Tabel 2.1
LKPD Berdasarkan Basis Akuntansi yang Diterapkan

Basis Kas Menuju Akrual	Basis Akrual
Laporan Realisasi Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran
Neraca	Laporan Perubahan SAL
Laporan Arus Kas (LAK)	Laporan Operasional (LO)
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	Neraca
	Laporan Arus Kas (LAK)
	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
	Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

(PP No. 24 Tahun 2005 Par. 25 dan PP No. 71 Tahun 2010 Par. 28)

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Ritonga dan Suhartono (2012 h. 24) menyebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah pusat/daerah sesuai Kerangka Konseptual Paragraf 60 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu:

Tabel 2.2
Kategori Laporan Keuangan Pemerintah Sesuai PP 71 Tahun 2010

Kategori	Laporan Keuangan
Laporan Pelaksanaan Anggaran (*Budgetary Report*)	Laporan Realisasi Anggaran
	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan Finansial	Laporan Operasional (LO)
	Neraca
	Laporan Arus Kas (LAK)
	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Catatan atas Laporan Keuangan	Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

(Ritonga dan Suhartono 2012, h. 24)

Penjelasan mengenai LKPD banyak disebutkan dalam dokumen peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai berikut:

1. Penjelasan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada bagian I. Umum angka 9. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara, diketahui LKPD sebagai berikut:

   LKPD merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) berupa laporan keuangan yang setidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, laporan arus kas (LAK) dan catatan atas laporan keuangan (CaLK) yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dan disampaikan kepada dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

2. Penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada bagian I. Umum angka 5. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran, diketahui LKPD sebagai berikut:
   a. Laporan keuangan pemerintah (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dihasilkan dari proses akuntansi,
   b. LKPD disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan, yang terdiri atas LRA, Neraca, LAK disertai dengan CaLK,
   c. LKPD sebagai pertanggungjawaban entitas pelaporan,
   d. LKPD disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir,
   e. LKPD diaudit oleh pemeriksa ekstern yang independen dan profesional sebelum disampaikan kepada DPRD.
3. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 100 menyatakan:

   Pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) menyusun LKPD terdiri atas LRA, Neraca, LAK dan CaLK. LKPD disusun dan disajikan sesuai SAP dan disampaikan kepada kepala daerah dalam rangka memenuhi pelaksanaan APBD.
4. Peraturan Pemerintah no. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 5, Pasal 11 dan Pasal 13 menyatakan:
   a. LKPD setidaknya terdiri atas LRA, Neraca, LAK dan CaLK,

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

b. PPKD menyusun LKPD untuk disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota untuk memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
c. LKPD disusun berdasarakan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah.
d. Gubernur/bupati/walikota memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap LKPD berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD seta koreksi lain berdasarkan SAP.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 169 dan Pasal 240 menyebutkan:
   a. LKPD terdiri dari LRA, Neraca, LAK dan CaLK
   b. Pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan menyusun LKPD.

2.3 Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Artikulasi LKPD bisa disebut hubungan atau kesesuaian atau pertemuan antarlaporan keuangan. Ritonga (2010) menggunakan kata *keterkaitan* pos-pos antarlaporan keuangan untuk mengatakan bahwa antarlaporan keuangan memiliki keterkaitan (berartikulasi). Ratmono dan Sholihin (2015) menggunakan kata *hubungan* untuk menjelaskan adanya hubungan antarjenis laporan keuangan. Mahmudi (2007 h. 53) menyebutkan:

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

> Pada akhir periode akuntansi, akan terdapat pertemuan antara laporan rekening riil, yaitu neraca dengan Laporan Realisasi Anggaran yang merupakan rekening nominal. Rekonsiliasi antara laporan neraca dengan Laporan Realisasi Anggaran terkait dengan perhitungan suplus/defisit dan SiLPA/SiKPA dari Laporan Realisasi Anggaran ke dalam ekuitas dana di neraca.

Sehingga artikulasi laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) bisa diartikan sebagai kondisi saling berhubungan atau keterkaitan antarkomponen dalam suatu LKPD maupun antarpos-pos/unsur dalam suatu komponen LKPD.

2.3.1 Komponen-Komponen LKPD

Penyusunan dan penyajian LKPD mengacu pada SAP. Sampai dengan saat ini pemerintah telah menerbitkan SAP sebanyak dua kali. Pertama ialah SAP sesuai dengan PP No. 24 tahun 2005 atau yang lebih dikenal dengan SAP berbasis kas menuju akrual dan SAP menurut PP No. 71 Tahun 2010 atau yang dikenal dengan SAP berbasis akrual. Penjelasan setiap komponen laporan keuangan berikut mengacu pada lampiran I.01 PP No. 71 Tahun 2010 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

1. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan (KK Par. 61).
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (KK Par. 63).
3. Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas pelaporan mengenai

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu (KK Par. 64).

4. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan (KK Par. 78).
5. Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu (KK Par. 80). Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah, pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah (KK Par. 81).
6. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, neraca dan LAK. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang dianjurkan untuk diuangkapkan di dalam SAP serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar (KK Par. 75).
7. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (KK Par. 82).
8. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LPE dan LAK.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Komponen LKPD menurut PP No. 24 Tahun 2005 dan PP No. 71 Tahun 2010 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Komponen LKPD

PP No. 24 Tahun 2005	PP No. 71 Tahun 2010
Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam LRA dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. (KK Par. 39)	Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual. (PSAP No. 1 Par.5)
Komponen laporan keuangan: Laporan keuangan pokok (PSAP No. 01 Par. 14): LRA, Neraca, LAK, CaLK, Laporan keuangan opsional (PSAP No. 01 Par. 20): Laporan kinerja keuangan dan Laporan perubahan ekuitas	Komponen laporan keuangan: Laporan keuangan pokok (PSAP No. 01 Par. 14): LRA, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), LAK, dan CaLK
LRA diperlukan dalam rangka memenuhi kewajiban yang diatur dalam peraturan perundangan	LRA diperlukan dalam rangka memenuhi kewajiban yang diatur dalam peraturan perundangan
LP SAL disebutkan sebagai laporan tersendiri	LP SAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (KK Par. 63)
LAK disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (Par 15), arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran	LAK disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum (Par 15), arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris
Laporan Kinerja Keuangan bersifat opsional, laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual. Dalam laporan dimaksud, perlu disajikan informasi mengenai pendapatan operasional, belanja	LO menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan ((KK Par. 78).

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

PP No. 24 Tahun 2005	PP No. 71 Tahun 2010
berdasarkan klasifikasi fungsional dan ekonomi, dan surplus atau defisit (KK Par. 76)	
LPE bersifat opsional yakni laporan yang menunjukkan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (KK Par. 77)	LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu (KK Par. 59) Pada bagian ekuitas dana terbagi dalam: a. Ekuitas Dana Lancar (EDL): selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek, termasuk SILPA b. Ekuitas Dana Investasi (EDI): mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang c. Ekuitas Dana Cadangan (EDC): mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu (KK Par.64). Pada bagian ekuitas tidak terbagi dalam EDL, EDI, dan EDC hanya ekuitas yaitu kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada LPE.
CaLK meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.	CaLK pada dasarnya sama dengan PP lama, perbedaan dikarenakan komponen laporan keuangan yang berbeda dengan PP lama.

(PP No. 24 Tahun 2005 dan PP No. 71 Tahun 2010)

2.3.2 Pos-pos/Unsur dalam LKPD

Pos-pos/unsur dalam satu komponen LKPD ialah bagian yang membentuk suatu komponen LKPD, seperti dalam Pernyataan Standar

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.edu.id/

Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01 Paragraf 2 yang menyebutkan:

> Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas.

Pos-pos/unsur dalam LKPD menurut PP No. 24 Tahun 2005 dan PP No. 71 Tahun 2010 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pos-pos/Unsur LKPD

PP No. 24 Tahun 2005	PP No. 71 Tahun 2010
LRA berbasis kas (KK Par. 58) a. Pendapatan adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/ Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. c. Transfer adalah penerimaan/ pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. d. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.	LRA berbasis kas (KK Par. 62) a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/ Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/ Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. d. Pembiayaan adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
LPSAL, tidak dijelaskan.	LPSAL meliputi unsur-unsur: a. Saldo Anggaran Lebih awal b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

PP No. 24 Tahun 2005	PP No. 71 Tahun 2010
	Anggaran tahun berjalan d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya e. Lain-lain f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.
Neraca berbasis akrual meliputi unsur-unsur (KK Par.60): a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Selanjutnya masing-masing unsur diklasifikasikan lebih lanjut ke dalam unsur yang lebih rinci.	Neraca berbasis akrual meliputi unsur-unsur (KK Par.65) yang tidak berbeda dengan PP lama.
LO, unsur-unsur LO tidak dijelaskan.	LO berbasis akrual meliputi unsur-unsur (KK Par. 79): a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. b. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa tidak diharapkan sering

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

PP No. 24 Tahun 2005	PP No. 71 Tahun 2010
	atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
LAK mencakup unsur-unsur (KK Par.74): Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.	LAK mencakup unsur-unsur (KK Par.81) yang tidak berbeda dengan PP lama.
LPE, unsur-unsur LPE tidak dijelaskan.	LPE mencakup unsur-unsur: a. Ekuitas awal b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, d. Ekuitas akhir.

(PP No. 24 Tahun 2005 dan PP No. 71 Tahun 2010)

2.4 Penelitian-penelitian Terdahulu

Sejauh pengetahuan terbaik peneliti, penelitian yang memfokuskan pada tema artikulasi laporan keuangan baik sektor privat maupun publik di Indonesia belum dilakukan. Penelitian yang mendekati tema artikulasi dalam penelitiannya ialah Dona (2013) meneliti tentang evaluasi pelaksanaan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah (studi pada Inspektorat Kota Payakumbuh). Tujuan penelitian tersebut untuk menilai tingkat kesesuaian pelaksanaan reviu oleh Inspektorat Kab. Payakumbuh. Hasil penelitian tersebut menunjukkan tingkat kesesuaian evaluasi dinilai cukup, dengan derajat kesesuaian tahun 2011 = 41%, 2012 = 58%, dan 2013 = 42%. Derajat kesesuian tersebut diperoleh dari evaluasi kesesuaian pos-pos LKPD dan kesesuaian antarlaporan keuangan dengan hasil sebagai berikut:

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Tabel 2.5
Derajat Kesesuaian Antarpos-pos dan Antarkomponen LKPD Pemerintah Kabupaten Payakumbuh

Uraian	2011	2012	2013
Kesesuaian Antarpos-pos LKPD	22%	51%	51%
Kesesuaian Antarkomponen LKPD	100%	64%	64%

(Dona 2013)

Dari tabel 2.5 dapat diketahui bahwa pencapaian kesesuaian antarpos-pos dan antarkomponen LKPD tahun 2012 dan 2013 tidak mencapai 100%. Hal tersebut menunjukkan adanya kondisi ketidakartikulasian LKPD. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa kondisi ketidakartikulasian sudah dapat diketahui saat proses reviu LKPD.

Beberapa penelitian lain yang membahas reviu LKPD seperti Windarsih (2015) yang meneliti hubungan kualitas reviu laporan keuangan dengan temuan pemeriksaan BPK pada pemerintah kabupaten/kota se-DIY, Prasetio (2012) meneliti implementasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas LKPD pada Inspektorat Daerah Kab. Sleman dan Bantul, dan Muchtar (2013) menganalisis peran audit internal dalam menunjang peningkatan kualitas laporan keuangan di Inspektorat Kabupaten Sleman, ketiga penelitian menyatakan kualitas reviu dan peran auditor internal sudah baik, namun penelitian tersebut tidak menjelaskan keterkaitan/kesesuaian/artikulasi LKPD baik antarpos-pos maupun antarkomponen LKPD.

Penelitian artikulasi laporan keuangan di luar negeri telah dilakukan, seperti Bahnson, Miller dan Budge (1996) meneliti dengan mendasarkan

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

pada pengalaman pribadi peneliti bahwa dalam laporan keuangan tahunan menunjukkan banyak neraca dan laporan arus kas tidak berartikulasi. Penelitian tersebut menggunakan *proxy* arus kas dari aktivitas operasi dalam LAK kemudian dibandingkan dengan perhitungan independen atas arus kas dari aktivitas operasi yang dihitung dari neraca dengan asumsi terjadi artikulasi. Kesimpulan kondisi tidak artikulasi dalam LAK jika ditemukan perbedaan paling tidak pada perubahan satu item dari neraca. Penelitian tersebut menguji atas sampel sebanyak 9.757 set laporan keuangan publik. Penelitian tersebut mampu mengungkapkan banyak perbedaan yang tidak dapat dijelaskan antara arus kas yang diperkirakan dan jumlah sebenarnya yang dilaporkan dalam laporan arus kas. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa situasi nonartikulasi laporan keuangan pada sektor swasta telah menjadi masalah serius khususnya dalam penyusunan LAK menggunakan metode tidak langsung.

Kinnunen dan Koskela (1999) meneliti artikulasi laporan keuangan menggunakan data perusahaan Finlandia yang terdaftar untuk tahun 1995-1997. Penelitian tersebut meneliti kesesuaian arus kas yang dilaporkan dengan arus kas sesuai estimasi dari data laporan laba rugi dan neraca. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa laporan arus kas tidak selalu berartikulasi dengan laporan laba rugi dan neraca dan ketidakartikulasian dapat diamati pada arus kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

Menurut Kerangka Konseptual (KK) Paragraf 33 dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyebutkan bahwa pelaporan keuangan pemerintah (pusat dan daerah) seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. LKPD yang telah melalui proses akuntansi yang sesuai SAP, reviu yang memadai dan audit yang sesuai standar pemeriksaan, akan menjadikan LKPD yang mampu memberikan manfaat bagi pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan keuangan.

LKPD yang memeroleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) adalah opini terbaik yang diperoleh oleh suatu pemda atas LKPD yang diterbitkannya. Opini WTP bisa diartikan bahwa LKPD tersebut telah disusun dan disajikan secara wajar sesuai dengan SAP, dihasilkan melalui sistem pengendalian intern yang memadai, dan terbebas dari salah saji material atas pos-pos laporan keuangan.

Pemda se-Jawa dan Bali yang wajib menyampaikan LKPD tahun 2014 sebanyak 129 pemda, 66 diantaranya telah memeroleh opini WTP, 60 pemda memeroleh opini wajar dengan pengecualian (WDP), tidak ada pemda yang memeroleh opini tidak wajar (TW), dan 3 pemda memeroleh opini tidak

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

memberikan pendapat (TMP). Rincian lebih lanjut seperti dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Ikhtisar Opini BPK RI atas LKPD Tahun 2014 Se-Jawa dan Bali

No.	Pemerintah Daerah	Opini Audit				Jumlah Pemda
		WTP	WDP	TW	TMP	
1	Provinsi Bali	7	3	0	0	10
2	Provinsi Banten	4	3	0	2	9
3	Provinsi DKI Jakarta	0	1	0	0	1
4	Provinsi Jawa Barat	13	14	0	1	28
5	Provinsi Jawa Tengah	12	24	0	0	36
6	Provinsi Jawa Timur	25	14	0	0	39
7	Provinsi DI Yogyakarta	5	1	0	0	6
	Jumlah	66	60	0	3	129

(BPK RI 2015, IHPS Semester I 2015)

Jika dibandingkan dengan hasil audit atas LKPD tahun 2013 se-Jawa dan Bali, diketahui bahwa terjadi kenaikan opini WTP yang signifikan sebesar 46,7% atau dari semula sebanyak 45 LKPD menjadi 66 LKPD. Rincian lebih lanjut seperti dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Ikhtisar Opini BPK RI atas LKPD Tahun 2014-2013 Se-Jawa dan Bali

No.	Pemerintah Daerah	Opini Audit								Jumlah LKPD Diaudit	
		WTP		WDP		TW		TMP			
		2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013
1	Prov. Bali	7	2	3	6	0	1	0	1	10	10
2	Prov. Banten	4	4	3	4	0	0	2	1	9	9
3	Prov. DKI Jakarta	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
4	Prov. Jawa Barat	13	6	14	19	0	0	1	2	28	27
5	Prov. Jawa Tengah	12	11	24	25	0	0	0	0	36	36
6	Prov. Jawa Timur	25	17	14	21	0	1	0	0	39	39
7	Prov. DI Yogyakarta	5	5	1	1	0	0	0	0	6	6
	Jumlah	66	45	60	77	0	2	3	4	129	128

(BPK RI 2015, IHPS II Tahun 2014 dan IHPS I Tahun 2015)

Penelitian ini selanjutnya akan mengkhususkan pada penelitian LKPD tahun 2014 se-Jawa dan Bali yang beropini WTP.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

3.2 Rasionalitas Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah LKPD tahun 2014 se-Jawa dan Bali yang beropini WTP. Guna menentukan obyek penelitian tersebut, peneliti menggunakan teknik purposive sampling agar diperoleh sampel yang memenuhi tujuan tertentu yang menjadi pertimbangan peneliti. Sugiyono (2015) mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang sering digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling. Teknik purposive sampling dilakukan dengan beberapa pertimbangan tertentu agar data yang diperoleh lebih representatif (Sugiyono, 2015). Beberapa pertimbangan peneliti dalam menentukan sampel sebagai berikut.

1. LKPD *audited*, kriteria *ini* dimaksudkan agar LKPD yang diteliti telah memenuhi unsur validitas dan ketepatan sesuai dengan SAP (Jusup, 2010, h. 43). LKPD *audited* secara umum merupakan LKPD yang dapat diandalkan karena telah melalui audit yang independen (Jusup, 2010, h. 45).
2. LKPD tahun 2014, kriteria tahun 2014 ditetapkan mengingat LKPD tahun 2014 adalah LKPD termutakhir yang telah diaudit oleh BPK RI sedangkan LKPD tahun 2015 sedang dalam proses audit.
3. LKPD yang beropini WTP, kriteria ini penting mengingat opini WTP adalah opini tertinggi yang menjadi jaminan keandalan suatu LKPD.
4. LKPD se-Jawa dan Bali, kriteria se-Jawa dan Bali dikarenakan persepsi umum yang menyatakan kualitas SDM dan sarana-prasarana penunjang pengelolaan keuangan dan pengauditan oleh BPK RI di Jawa dan Bali telah baik dan mirip sehingga dapat diperbandingkan.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

5. LKPD se-Jawa dan Bali sebanyak 129 LKPD dan yang memenuhi kriteria WTP sebanyak 66 LKPD merupakan jumlah signifikan untuk menjamin hasil penelitian yang valid.

3.3 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif ini digunakan karena peneliti tidak berangkat dari suatu hipotesis yang harus dibuktikan. Peneliti tidak ingin melihat hubungan antar variabel yang memengaruhi laporan keuangan apakah berartikulasi atau tidak. Peneliti ingin memahami lebih mendalam mengenai informasi akuntansi dalam LKPD yang dipandu oleh teori akuntansi bahwa laporan keuangan seharusnya berartikulasi. Peneliti akan menggunakan pengalaman pribadinya di dunia pengawasan dan audit untuk memahami obyek yang diteliti. Cresswell (2014) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Sugiyono (2015) menyatakan metode penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme untuk meneliti obyek dalam kondisi alamiah; peneliti sebagai instrumen kunci; pengambilan sampel dengan cara *purposive* dan *snowball*; teknik pengumpulan data dengan triangulasi; analisis bersifat induktif; dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Strategi penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Peneliti akan mendeskriptifkan artikulasi LKPD tahun 2014 se-Jawa dan Bali yang beropini WTP. Peneliti akan mengolah data tersebut sehingga peneliti dapat mengutarakan secara jelas dan tepat mengenai suatu LKPD berartikulasi atau tidak kepada semua pembaca yang mungkin tidak mengalami secara langsung proses terbentuknya data tersebut. Peneliti akan menjelaskan secara sistematis atas fakta-fakta yang peneliti temukan dalam obyek penelitian. Peneliti akan menggunakan pengalamannya dan juga pengalaman para pihak yang terkait dengan penyusunan dan penyajian LKPD. Soewadji (2012) menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu baik berupa keadaan, permasalahan, sikap, pendapat, kondisi, prosedur atau sistem secara faktual dan cermat. Tujuan penelitian deskriptif ialah mengumpulkan informasi aktual secara terperinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktik-praktik yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian ini akan mengumpulkan data sekunder menggunakan teknik dokumentasi dan melakukan penggalian secara mendalam atas data sekunder tersebut. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber. Data sekunder yang dimaksud adalah dokumen LKPD tahun 2014 se-Jawa dan Bali yang diperoleh dari laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

LKPD tahun 2014. Peneliti mengambil sebanyak 66 LKPD dari 129 LKPD se-Jawa dan Bali dikarenakan peneliti hanya mengambil LKPD yang beropini WTP. Peneliti akan menganalisis lembar muka (*on the face*) LKPD dan jika diperlukan akan lebih mendalam ke catatan atas laporan keuangan.

Sugiyono (2015) menyatakan bahwa instrumen utama penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, mengingat pada awalnya permasalahan belum jelas dan pasti. Tetapi setelah masalah yang akan diteliti jelas, maka dapat dikembangkan suatu instrumen lainnya.

3.5 Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis data yang akan dianalisis. Analisis data sebagaimana Sugiyono (2015, h. 244) menyatakan:

> Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data sekunder dilakukan peneliti untuk menilai tingkat artikulasi LKPD. Hal tersebut dilakukan untuk menjawab kedua pertanyaan penelitian.

Analisis data yang digunakan ialah teknik deskriptif persentase. Ritonga (2010) menyatakan bahwa teknik deskriptif persentase merupakan teknik untuk menghitung tingkat kesesuaian dengan membuat persentase dari data yang ada, kemudian dideskripsikan. Penghitungan dilakukan dengan membagi total nilai yang diperoleh dengan total kriteria dikali 100%.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Dalam persamaan matematika sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Kesesuaian} = \frac{\text{Total Nilai yang Diperoleh}}{\text{Total Kriteria}} \text{ x } 100\%$$

Langkah-langkah dalam melakukan teknik deksriptif persentase untuk menentukan tingkat kesesuaian artikulasi LKPD sebagai berikut.

a. Menentukan kriteria artikulasi LKPD sesuai dengan teori akuntansi dan SAP baik artikulasi antarpos-pos dalam suatu komponen LKPD maupun antarkomponen LKPD. Kriteria artikulasi juga ditentukan oleh basis akuntansi yang diterapkan dalam LKPD 2014 yaitu basis kas menuju akrual dan basis akrual. Penerapan basis akuntansi yang berbeda menyebabkan jenis dan jumlah kriteria akan berbeda. Kriteria untuk masing-masing basis akuntansi terlampir.
b. Mencari fakta artikulasi LKPD dalam lembar muka LKPD dengan mengambil angka-angka yang tercantum dalam LKPD kemudian memasukkan ke dalam persamaan matematika seperti yang tercantum dalam kriteria artikulasi pada poin a.
c. Memberikan nilai/skor kesesuaian fakta dan kriteria dengan skor 1 diberikan apabila fakta menyatakan sesuai dengan kriteria yang berarti berartikulasi dan skor 0 diberikan apabila fakta tidak sesuai dengan kriteria yang berarti tidak berartikulasi.
d. Menjumlahkan total skor yang diperoleh masing-masing LKPD dan memindahkan ke dalam kertas kerja rekapitulasi artikulasi LKPD.
e. Menghitung rata-rata persentase tingkat artikulasi LKPD dengan membandingkan total skor yang diperoleh dengan total skor maksimal

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

dikalikan 100%.

f. Memberikan deskripsi dan interpretasi dari skor persentase tingkat artikualasi LKPD yang diperoleh.

3.6 Validitas dan Reliabilitas

Uji keabsahan dalam penelitian ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas (Sugiyono, 2015). Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesuangguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Sedangkan reliabilitas mengindikasikan pendekatan yang digunakan peneliti konsisten jika diterapkan oleh peneliti-peneliti lain dan untuk proyek-proyek yang berbeda (Creswell, 2014).

Strategi uji validitas menurut Creswell (2014) ada delapan strategi yaitu: *triangulate*, *member checking*, menyusun deskripsi yang kaya dan padat tentang hasil penelitian, mengklarifikasi bias yang mungkin dibawa peneliti ke dalam penelitian, *negative or discrepant information*, memanfaatkan waktu yang relatif lama di lokasi penelitian, melakukan tanya jawab sesama rekan peneliti untuk meningkatkan keakuratan hasil penelitian, dan mengajak seorang auditor untuk mereiew keseluruhan proyek penelitian. Uji validitas menurut Sugiyono (2015) dapat dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan mengadakan *member check*. Adapun strategi validitas yang akan dilakukan adalah penelitian ini ialah:

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

1. meningkatkan ketekunan,
2. analisis kasus negatif,
3. menyusun deskripsi yang kaya dan padat tentang hasil penelitian,
4. triangulasi, yaitu dengan melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

Uji reliabilitas/keandalan dalam penelitian ini dilakukan dengan pengujian *dependability*. Penelitian yang andal ialah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut (Sugiyono, 2015). Uji *dependabilty* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Lebih lanjut Ia memaparkan bahwa audit tersebut dapat dilakukan oleh auditor independen atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

BAB IV

ANALISIS DAN DISKUSI

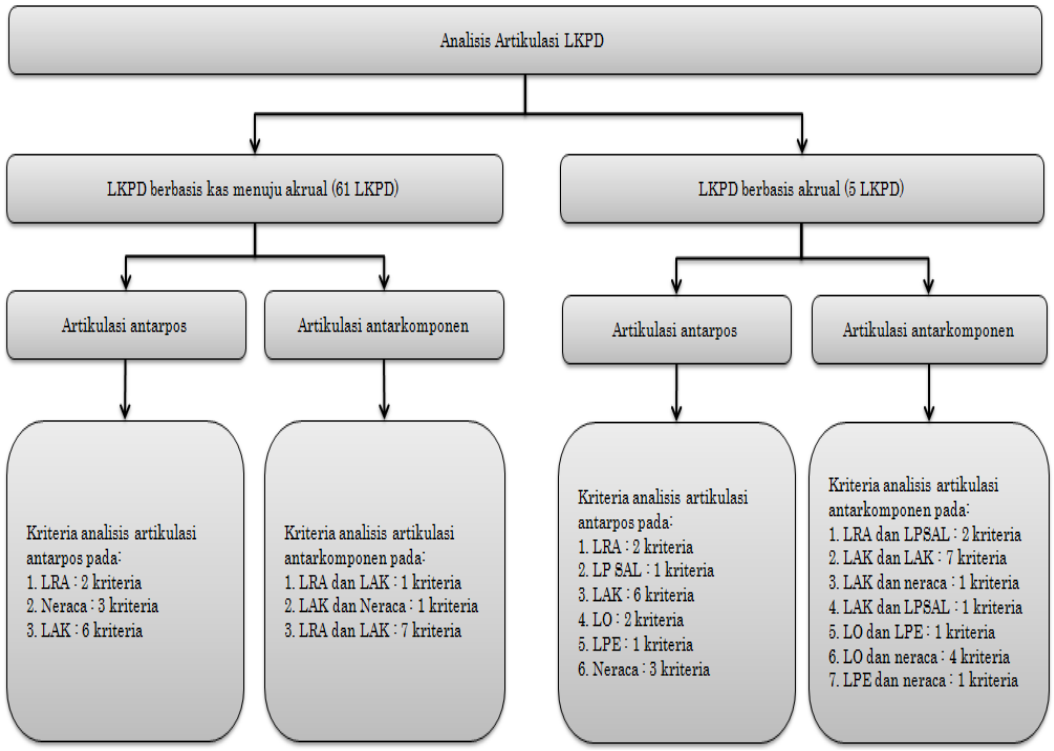
4.1 Analisis Artikulasi LKPD Se-Jawa dan Bali

Analisis artikulasi laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) se-Jawa dan Bali dilakukan terhadap 66 LKPD tahun 2014 yang telah mendapatkan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Analisis artikulasi LKPD dilakukan dalam dua kelompok analisis mengingat adanya perbedaan penerapan basis akuntansi di 66 LKPD. Dari 66 LKPD yang dianalisis sebanyak 61 LKPD disusun menggunakan basis akuntansi kas menuju akrual (*cash toward accrual*) dan 5 LKPD berbasis akrual. Kelima LKPD berbasis akrual tersebut ialah LKPD Pemerintah Kota (Pemko.) Tangerang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab.) Banyumas, Pemkab. Jepara, Pemkab. Temanggung, dan Pemkab. Banyuwangi.

Analisis artikulasi LKPD pada kedua basis akuntansi tersebut akan dianalisis pada aspek artikulasi antarpos dalam suatu komponen laporan keuangan dan artikulasi antarkomponen laporan keuangan. Pada setiap aspek akan dianalisis setiap unsur ketepatan artikulasi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Secara sederhana proses analisis artikulasi dapat digambarkan sebagai berikut:

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Gambar 4. 1 Proses Analisis Artikulasi LKPD



(Data Diolah)

Analisis artikulasi LKPD dilakukan untuk tahun 2014, dimana LKPD tahun 2014 juga menyajikan informasi keuangan komparasi tahun 2013, maka penilaian artikulasi setiap unsur juga akan menganalisasis informasi tahun 2013. Sehingga dalam satu LKPD akan diperoleh hasil analisis artikulasi antarpos informasi keuangan tahun 2014 dan 2013 serta analisis artikulasi antarkomponen laporan keuangan tahun 2014 dan 2013. Atas setiap kriteria yang berartikulasi diberikan skor 1 dan kondisi tidak artikulasi diberikan skor 0 dan secara kumulatif akan diketahui tingkat capaian artikulasinya dalam bentuk persentase (%). Suatu LKPD yang dinyatakan berartikulasi secara keseluruhan maka akan memeroleh tingkat capaian artikulasi sebesar 100% sebagaimana contoh dalam tabel berikut:

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Tabel 4.1
Contoh Hasil Analisis Artikulasi Suatu LKPD

No. Instrumen	Nama Instrumen Artikulasi	Informasi Keuangan Tahun	
		2014	2013
#X	Artikulasi antarpos dalam suatu komponen laporan keuangan	100%	100%
#Y	Artikulasi antarkomponen laporan keuangan	100%	100%
	Tingkat capaian Artikulasi Per LKPD	100%	

(Data diolah)

Tabel di atas menggambarkan tingkat capaian artikulasi per LKPD berupa nilai rata-rata dari penjumlahan nilai artikulasi instrumen #X untuk tahun 2014 dan 2013 serta instrumen #Y untuk tahun 2014 dan 2013, kemudian hasil dari penjumlahan tersebut dibagi empat. Hasil analisis artikulasi LKPD selanjutnya akan dibahas menurut basis akuntansi yang diterapkan.

Guna memudahkan pembacaan hasil analisis artikulasi LKPD berbasis kas menuju akrual yang berjumlah 61 LKPD, peneliti mengelompokkan tingkat capaian artikulasi mengikuti pembagian kelompok sebagai berikut (tidak diberlakukan bagi LKPD berbasis akrual):

Tabel 4.2
Kelompok Tingkat Capaian Artikulasi LKPD

Kelompok	Tingkat Capaian Artikulasi
1	100%
2	75% s.d. <100%
3	50% s.d. <75%
4	25% s.d. <50%
5	0% s.d. <25%

(Data diolah)

Berdasarkan hasil analisis artikulasi LKPD berbasis kas menuju akrual diperoleh 7 (tujuh) LKPD yang mencapai tingkat artikulasi 100% yaitu: Pemko. Malang, Pemko. Banjar, Pemerintah Provinsi (Pemprov.) Bali,

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Pemkab. Jembrana, Pemkab. Tabanan, Pemkab. Bantul, dan Pemkab. Sleman. Tingkat capaian artikulasi LKPD se-Jawa dan Bali yang telah dikelompokkan sesuai kelompok tingkat capaian artikulasi sebagai berikut:

Tabel 4.3
LKPD Se-Jawa dan Bali Berdasarkan Kelompok Tingkat Capaian Artikulasi

No.	LKPD	Tingkat Capaian Artikulasi					Jumlah Dianalisis
		100%	75% - <100%	50% - <75%	25% - <50%	0% - <25%	
1	Se-Jawa Timur	1	15	8	0	0	24
2	Se-Jawa Barat	1	11	1	0	0	13
3	Se-Jawa Tengah	0	4	5	0	0	9
4	Se-Bali	3	4	0	0	0	7
5	Se-DIY	2	3	0	0	0	5
6	Se-Banten	0	1	2	0	0	3
	Jumlah LKPD	7	38	16	0	0	61
	%	11,48	62,30	26,23	0,00	0,00	

(Data diolah)

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari 61 LKPD yang dianalisis, diperoleh 7 LKPD atau 11,48% memeroleh tingkat capaian artikulasi LKPD 100%, sebanyak 38 LKPD atau 62,30% memeroleh tingkat capaian artikulasi LKPD antara 75% s.d. <100% dan sebanyak 16 LKPD atau 26,23% memeroleh tingkat capaian artikulasi LKPD antara 50% s.d. <75%. Sedangkan Hasil analisis artikulasi LKPD berbasis akrual dari 5 LKPD yang dianalisis, tidak ada satupun LKPD yang memeroleh tingkat capaian artikulasi LKPD 100% sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.4
Hasil Analisis Artikulasi LKPD Berbasis Akrual

No.	Nama Pemda	Tingkat Capaian Artikulasi (%)
1	Pemko. Tangerang	81,37
2	Pemkab. Banyumas	96,88
3	Pemkab. Jepara	74,04
4	Pemkab. Temanggung	73,81
5	Pemkab. Banyuwangi	88,10

(Data diolah)

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Hasil analisis artikulasi LKPD di atas, secara ringkas diperoleh melalui langkah-langkah teknis sebagai berikut:

1. Menentukan kriteria artikulasi. Kriteria artikulasi dibagi sesuai basis akuntansi yang diterapkan, kemudian ditentukan kriteria artikulasi antarpos dan artikulasi antarkomponen LKPD.
2. Mencari fakta artikulasi LKPD dalam lembar muka LKPD dengan cara:
   a. memeroleh data LKPD tahun 2014, diperoleh data LKPD 2014 dalam format *pdf*
   b. memindahkan angka-angka yang tercantum dalam lembar muka LKPD ke dalam format *excel*,
   c. memastikan pemindahan angka tidak terjadi kesalahan.
   d. memasukkan angka-angka LKPD dalam format *excel* ke dalam persamaan matematika seperti yang tercantum dalam kriteria artikulasi pada poin 1.
   e. Secara otomatis akan diperoleh informasi kondisi artikulasi atau tidak pada setiap kriteria yang telah ditetapkan.
3. Menjumlahkan total skor yang diperoleh untuk setiap kategori serta total skor artikulasi suatu LKPD.
4. Menghitung persentase tingkat artikulasi LKPD untuk setiap tahun dan setiap kategori dengan membandingkan skor yang diperoleh dengan total kriteria dikalikan 100%.
5. Mendeskripsikan dan menginterpretasikan atas setiap capaian artikulasi LKPD.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

4.2 Analisis Artikulasi LKPD Berbasis Kas Menuju Akrual

4.2.1 Analisis Artikulasi Antarpos dalam Suatu Komponen LKPD

Analisis artikulasi antarpos dalam suatu komponen LKPD berbasis kas menuju akrual (diidentifikasi sebagai instrumen #A) untuk meyakinkan bahwa pos-pos yang menyusun suatu laporan keuangan telah tepat dan benar disusun dan disajikan sesuai dengan SAP menurut PP No. 24 Tahun 2005. Analisis artikulasi antarpos dalam suatu komponen LKPD dimulai dengan menentukan kriteria yang akan digunakan untuk menilai apakah fakta dalam lembar muka (*on the face*) LKPD telah menunjukkan kondisi yang berartikulasi. Kriteria artikulasi antarpos dalam suatu komponen LKPD yang digunakan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.5
Kriteria Artikulasi Antarpos LKPD Berbasis Kas Menuju Akrual

Uraian		2014	2013
#A.1 Artikulasi Antarpos di Laporan Realisasi Anggaran (LRA)			
#A.1.1	Jumlah Pendapatan - Jumlah Belanja - Jumlah Transfer = Surplus/Defisit	Ya = 1 ; Tdk = 0	Ya = 1 ; Tdk = 0
#A.1.2	SILPA = Surplus/Defisit + Penerimaan Pembiayaan - Pengeluaran Pembiayaan	Ya = 1 ; Tdk = 0	Ya = 1 ; Tdk = 0
#A.2 Artikulasi Antarpos di Neraca			
#A.2.1	Jumlah Aset = Jumlah Kewajiban + Jumlah Ekuitas Dana	Ya = 1 ; Tdk = 0	Ya = 1 ; Tdk = 0
#A.2.2	Jumlah Ekuitas Dana Lancar = Jumlah Aset Lancar - Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	Ya = 1 ; Tdk = 0	Ya = 1 ; Tdk = 0
#A.2.3	Jumlah Ekuitas Dana Investasi = Jml. Investasi Jangka Panjang + Jml. Aset Tetap + Jml. Aset Lainnya - Jml. Kewajiban Jangka Panjang	Ya = 1 ; Tdk = 0	Ya = 1 ; Tdk = 0
#A.2.4	Jumlah Ekuitas Dana Cadangan = Jumlah Dana Cadangan	Ya = 1 ; Tdk = 0	Ya = 1 ; Tdk = 0
#A.2.5	Jumlah Kas = SILPA + Saldo Utang PFK + Pendapatan Ditangguhkan	Ya = 1 ; Tdk = 0	Ya = 1 ; Tdk = 0
#A.2.6	Investasi Jangka Pendek = Cadangan Investasi Jangka Pendek	Ya = 1 ; Tdk = 0	Ya = 1 ; Tdk = 0
#A.2.7	Piutang = Cadangan Piutang	Ya = 1 ; Tdk = 0	Ya = 1 ; Tdk = 0
#A.2.8	Persediaan = Cadangan Persediaan	Ya = 1 ; Tdk = 0	Ya = 1 ; Tdk = 0

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Uraian		2014	2013
#A.2.9	Kewajiban Jangka Pendek - Utang PFK = Dana Disediakan untuk Pembayaran Kewajiban Jangka Pendek	Ya = 1 ; Tdk = 0	Ya = 1 ; Tdk = 0
#A.2.10	Jumlah Investasi Jangka Panjang = Ekuitas Dana Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	Ya = 1 ; Tdk = 0	Ya = 1 ; Tdk = 0
#A.2.11	Jumlah Aset Tetap = Ekuitas Dana Diinvestasikan dalam Aset Tetap	Ya = 1 ; Tdk = 0	Ya = 1 ; Tdk = 0
#A.2.12	Jumlah Aset Lainnya = Ekuitas Dana Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	Ya = 1 ; Tdk = 0	Ya = 1 ; Tdk = 0
#A.2.13	Kewajiban Jangka Panjang = Dana yang Disediakan untuk Pembayaran Kewajiban Jangka Panjang	Ya = 1 ; Tdk = 0	Ya = 1 ; Tdk = 0
#A.3 Artikulasi Antarpos di Laporan Arus Kas (LAK)			
#A.3.1	Saldo Akhir Kas di BUD tahun 2013 = Saldo Awal Kas di BUD tahun 2014	Ya = 1 ; Tdk = 0	#N/A
#A.3.2	Kas Bersih dari Aktivitas Operasi = Arus kas masuk akt. operasi - Arus kas keluar akt. Operasi	Ya = 1 ; Tdk = 0	Ya = 1 ; Tdk = 0
#A.3.3	Kas Bersih dari Aktivitas investasi aset nonkeuangan = Arus kas masuk akt. investasi aset nonkeuangan - Arus kas keluar akt. investasi aset nonkeuangan	Ya = 1 ; Tdk = 0	Ya = 1 ; Tdk = 0
#A.3.4	Kas Bersih dari Aktivitas pembiayaan = Arus kas masuk akt. pembiayaan - Arus kas keluar akt. Pembiayaan	Ya = 1 ; Tdk = 0	Ya = 1 ; Tdk = 0
#A.3.5	Kas Bersih dari Aktivitas non anggaran = Arus kas masuk akt. non anggaran - Arus kas keluar akt. non anggaran	Ya = 1 ; Tdk = 0	Ya = 1 ; Tdk = 0
#A.3.6	Kenaikan/Penurunan Kas selama periode = Penjumlahan kas bersih dari setiap aktivitas	Ya = 1 ; Tdk = 0	Ya = 1 ; Tdk = 0

(Data diolah)

Tabel di atas menunjukkan kriteria untuk menilai artikulasi antarpos LRA sebanyak 2 kriteria, neraca sebanyak 13 kriteria dan LAK pada tahun 2014 sebanyak 6 kriteria dan kriteria artikulasi antarpos LAK pada tahun 2013 sebanyak 5 kriteria. Kondisi artikulasi terjadi jika fakta sesuai dengan kriteria. Fakta yang sesuai kriteria diberi skor 1 dan yang tidak sesuai diberi skor 0. Setelah keseluruhan kriteria diberikan skor, perolehan skor dijumlahkan secara keseluruhan kemudian dibagi dengan jumlah keseluruhan kriteria dikalikan 100% untuk mengetahui tingkat capaian artikulasi dalam persentase (%).

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Hasil ringkasan analisis artikulasi antarpos dalam suatu komponen LKPD se-Jawa dan Bali ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.6
Hasil Analisis Artikulasi Antarpos LKPD Berbasis Kas Menuju Akrual Se-Jawa dan Bali

Artikulasi Antarpos	Tahun	Kelompok Tingkat Capaian Artikulasi LKPD									
		100%		75% s.d. <100%		50% s.d. <75%		25% s.d. <50%		0% s.d. <25%	
		Jml.	%	Jml.	%	Jml.	%	Jml.	%	Jml.	%
LRA	2014	61	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	2013	61	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Neraca	2014	53	86,89	7	11,48	1	1,64	0	0,00	0	0,00
	2013	49	80,33	12	19,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LAK	2014	58	95,08	3	4,92	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	2013	59	96,72	2	3,28	0	0,00	0	0,00	0	0,00

(Data diolah)

Tabel di atas menunjukkan tingkat capaian artikulasi antarpos LKPD berbasis kas menuju akrual. Artikulasi antarpos LRA tahun 2014 diperoleh 61 LKPD atau 100% berartikulasi dan pada LRA tahun 2013 diperoleh 61 LKPD atau 100% berartikulasi. Rincian capaian tingkat artikulasi antarpos LKPD berbasis kas menuju akrual se-Jawa dan Bali disajikan dalam lampiran I.

Artikulasi antarpos neraca tahun 2014 diperoleh 53 LKPD atau 86,89% memeroleh tingkat capaian artikulasi sebesar 100%, 7 LKPD atau 11,48% memeroleh tingkat capaian artikulasi antara 75% s.d. <100%, dan 1 LKPD atau 1,64% memeroleh tingkat capaian artikulasi antara 50% s.d. <75%. Pada neraca tahun 2013 diperoleh 49 LKPD atau 80,33% memeroleh tingkat artikulasi 100% dan 12 LKPD atau 19,67% memeroleh tingkat artikulasi 75% s.d. <100%.

Artikulasi antarpos LAK tahun 2014 diperoleh 58 LKPD atau 95,08% memeroleh tingkat capaian artikulasi 100%, 3 LKPD atau 4,92% memeroleh

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

tingkat capaian artikulasi 75% s.d. <100%. Pada LAK tahun 2013 diperoleh 59 LKPD atau 96,72% memeroleh tingkat artikulasi 100% dan 2 LKPD atau 3,28% memeroleh tingkat capaian artikulasi 75% s.d. <100%.

4.2.2 Analisis Artikulasi Antarkomponen LKPD

Analisis artikulasi antarkomponen LKPD berbasis kas menuju akrual (diidentifikasi sebagai instrumen #B) untuk meyakinkan bahwa hubungan antarkomponen LKPD telah disusun dan disajikan dengan tepat dan benar sesuai dengan SAP menurut PP No. 24 Tahun 2005. Analisis artikulasi antarkomponen LKPD dengan menganalisis hubungan antara lebih dari satu komponen LKPD yaitu artikulasi antara LRA dan neraca, LAK dan neraca, serta LRA dan LAK. Masing-masing hubungan antarkomponen tersebut telah ditentukan kriteria yang akan digunakan untuk menilai apakah fakta dalam lembar muka (*on the face*) antarkomponen LKPD telah menunjukkan kondisi yang berartikulasi. Kriteria artikulasi antarkomponen LKPD yang digunakan sebagaimana tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7
Kriteria Artikulasi Antarkomponen LKPD Berbasis Kas Menuju Akrual

Uraian		2014	2013
#B.1 Artikulasi antara LRA dan Neraca			
#B.1.1	SILPA di LRA = SILPA di Neraca	Ya = 1; Tdk = 0	Ya = 1; Tdk = 0
#B.2 Artikulasi antara LAK dan Neraca			
#B.2.1	Saldo Akhir Kas di LAK = Kas di Neraca	Ya = 1; Tdk = 0	Ya = 1; Tdk = 0
#B.3 Artikulasi antara LRA dan LAK			
#B.3.1	Saldo Akhir Kas di LAK >= SILPA di LRA	Ya = 1; Tdk = 0	Ya = 1; Tdk = 0
#B.3.2	Jumlah Pendapatan di LRA = Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi + Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan	Ya = 1; Tdk = 0	Ya = 1; Tdk = 0

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Uraian		2014	2013
#B.3.3	Jumlah Penerimaan Pembiayaan - Penggunaan SiLPA = Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan	Ya = 1; Tdk = 0	Ya = 1; Tdk = 0
#B.3.4	Jumlah Belanja + Transfer = Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi + Investasi Aset Nonkeuangan	Ya = 1; Tdk = 0	Ya = 1; Tdk = 0
#B.3.5	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan = Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan	Ya = 1; Tdk = 0	Ya = 1; Tdk = 0
#B.3.6	Jumlah Pendapatan di LRA + Jumlah Penerimaan Pembiayaan - Penggunaan SILPA = Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi + Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan + Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan	Ya = 1; Tdk = 0	Ya = 1; Tdk = 0
#B.3.7	Jumlah Belanja + Jumlah Transfer + Jumlah pengeluaran pembiayaan = Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi + Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan + Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan	Ya = 1; Tdk = 0	Ya = 1; Tdk = 0

(Data diolah)

Tabel di atas menunjukkan kriteria untuk menilai artikulasi antara komponen LRA dan Neraca sebanyak 1 kriteria, antara LAK dan neraca sebanyak 1 kriteria serta antara LRA dan LAK sebanyak 7 kriteria. Sama dengan penilaian artikulasi antarpos di atas, kondisi artikulasi jika fakta sesuai dengan kriteria. Fakta yang sesuai kriteria diberi skor 1 dan yang tidak sesuai diberi skor 0. Setelah keseluruhan kriteria diberikan skor, perolehan skor dijumlahkan secara keseluruhan kemudian dibagi dengan jumlah keseluruhan kriteria dikalikan 100% untuk mengetahui tingkat capaian artikulasi dalam persentase (%).

Hasil ringkasan analisis artikulasi antarkomponen LKPD se-Jawa dan Bali tahun 2014 yang beropini WTP ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.8
Hasil Analisis Artikulasi Antarkomponen LKPD Berbasis Kas Menuju Akrual

Artikulasi Antarkomponen LKPD	Tahun	Kelompok Tingkat Capaian Artikulasi LKPD									
		100%		75% s.d. <100%		50% s.d. <75%		25% s.d. <50%		0% s.d. <25%	
		Jml.	%	Jml.	%	Jml.	%	Jml.	%	Jml.	%
LRA – Neraca	2014	57	93,44	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	6,56
	2013	53	86,89	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	13,11
LAK – Neraca	2014	44	72,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17	27,87
	2013	46	75,41	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	24,59

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Artikulasi Antarkomponen LKPD	Tahun	Kelompok Tingkat Capaian Artikulasi LKPD									
		100%		75% s.d. <100%		50% s.d. <75%		25% s.d. <50%		0% s.d. <25%	
		Jml.	%	Jml.	%	Jml.	%	Jml.	%	Jml.	%
LRA – LAK	2014	23	37,70	0	0,00	0	0,00	36	59,02	2	3,28
	2013	23	37,70	0	0,00	1	1,64	35	57,38	2	3,28

(Data diolah)

Tabel di atas menunjukkan kondisi keartikulasian antarkomponen LKPD berbasis kas menuju akrual. Hasil analisis artikulasi antarkomponen LRA dan neraca pada tahun 2014 diperoleh 57 LKPD atau 93,44% memeroleh tingkat capaian artikulasi 100% dan 4 LKPD atau 6,56% memeroleh tingkat artikulasi 0% s.d. <25%. Sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 53 LKPD atau 86,89% memeroleh tingkat capaian artikulasi 100% dan 8 LKPD atau 13,11% memeroleh tingkat artikulasi 0% s.d. <25%.

Hasil analisis artikulasi antarkomponen LAK dan neraca pada tahun 2014 diperoleh 44 LKPD atau 72,13% memeroleh tingkat capaian artikulasi 100% dan 17 LKPD atau 27,87% memeroleh tingkat artikulasi 0% s.d. <25%. Sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 46 LKPD atau 75,41% memeroleh tingkat capaian artikulasi 100% dan 15 LKPD atau 24,59% memeroleh tingkat artikulasi 0% s.d. <25%.

Artikulasi antarkomponen LRA dan LAK pada tahun 2014 diperoleh 23 LKPD atau 37,70% memeroleh tingkat capaian artikulasi 100%, 36 LKPD atau 59,02% memeroleh tingkat artikulasi 25% s.d. <50%, dan 2 LKPD atau 3,28% memeroleh tingkat capaian artikulasi 0% s.d. <25%. Sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 23 LKPD atau 37,70% memeroleh tingkat capaian artikulasi 100%, 1 LKPD atau 1,64% memeroleh tingkat artikulasi 50% s.d. <75%, 35 LKPD atau 57,38% memeroleh tingkat artikulasi 25% s.d. <50%, dan 2 LKPD atau 3,28% memeroleh tingkat artikulasi 0% s.d. <25%. Rincian

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

capaian tingkat artikulasi antarkomponen LKPD berbasis kas menuju akrual se-Jawa dan Bali disajikan dalam lampiran II.

4.2.3 Artikulasi Kumulatif LKPD Berbasis Kas Menuju Akrual

Pada bagian ini disampaikan perolehan tingkat artikulasi kumulatif LKPD berbasis kas menuju akrual dengan cara mengakumulasikan tingkat capaian artikulasi antarpos LKPD dan tingkat capaian artikulasi antarkomponen LKPD suatu pemda kemudian diperoleh nilai rata-rata per LKPD.

Tabel 4.9
Tingkat Artikulasi Kumulatif LKPD Berbasis Kas Menuju Akrual

No.	LKPD Pemda	Tahun	Capaian Kumulatif			
			#A	#B	#A dan #B Per Tahun	#A dan #B Per LKPD
1	Pemkab. Bojonegoro	2014	100,00	55,56	77,78	77,78
		2013	100,00	55,56	77,78	
2	Pemkab. Bondowoso	2014	100,00	55,56	77,78	75,00
		2013	100,00	44,44	72,22	
3	Pemkab. Jombang	2014	100,00	55,56	77,78	77,78
		2013	100,00	55,56	77,78	
4	Pemkab. Lumajang	2014	100,00	44,44	72,22	72,22
		2013	100,00	44,44	72,22	
5	Pemkab. Madiun	2014	100,00	55,56	77,78	72,22
		2013	100,00	33,33	66,67	
6	Pemkab. Magetan	2014	100,00	55,56	77,78	75,28
		2013	90,00	55,56	72,78	
7	Pemkab. Malang	2014	100,00	44,44	72,22	75,00
		2013	100,00	55,56	77,78	
8	Pemkab. Mojokerto	2014	100,00	55,56	77,78	75,28
		2013	90,00	55,56	72,78	
9	Pemkab. Nganjuk	2014	100,00	55,56	77,78	77,78
		2013	100,00	55,56	77,78	
10	Pemkab. Ngawi	2014	100,00	44,44	72,22	75,00
		2013	100,00	55,56	77,78	
11	Pemkab. Pacitan	2014	100,00	55,56	77,78	74,03
		2013	85,00	55,56	70,28	
12	Pemkab. Pamekasan	2014	100,00	33,33	66,67	72,22
		2013	100,00	55,56	77,78	

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

No.	LKPD Pemda	Tahun	Capaian Kumulatif			
			#A	#B	#A dan #B Per Tahun	#A dan #B Per LKPD
13	Pemkab. Pasuruan	2014	100,00	22,22	61,11	61,11
		2013	100,00	22,22	61,11	
14	Pemkab. Ponorogo	2014	100,00	33,33	66,67	66,67
		2013	100,00	33,33	66,67	
15	Pemkab. Probolinggo	2014	90,48	33,33	61,90	61,79
		2013	90,00	33,33	61,67	
16	Pemkab. Sidoarjo	2014	90,48	44,44	67,46	69,84
		2013	100,00	44,44	72,22	
17	Pemkab. Situbondo	2014	100,00	55,56	77,78	77,78
		2013	100,00	55,56	77,78	
18	Pemkab. Tulungagung	2014	100,00	55,56	77,78	75,00
		2013	100,00	44,44	72,22	
19	Pemko. Blitar	2014	100,00	55,56	77,78	77,78
		2013	100,00	55,56	77,78	
20	Pemko. Kediri	2014	100,00	55,56	77,78	77,78
		2013	100,00	55,56	77,78	
21	Pemko. Madiun	2014	100,00	55,56	77,78	77,78
		2013	100,00	55,56	77,78	
22	Pemko. Malang	2014	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	
23	Pemko. Mojokerto	2014	100,00	55,56	77,78	88,89
		2013	100,00	100,00	100,00	
24	Pemko. Surabaya	2014	100,00	55,56	77,78	77,78
		2013	100,00	55,56	77,78	
25	Pemprov. Jawa Barat	2014	100,00	88,89	94,44	91,67
		2013	100,00	77,78	88,89	
26	Pemkab. Bekasi	2014	90,48	100,00	95,24	96,37
		2013	95,00	100,00	97,50	
27	Pemkab. Ciamis	2014	100,00	100,00	100,00	97,22
		2013	100,00	88,89	94,44	
28	Pemkab. Cianjur	2014	100,00	100,00	100,00	87,70
		2013	95,24	55,56	75,40	
29	Pemkab. Kuningan	2014	100,00	88,89	94,44	94,44
		2013	100,00	88,89	94,44	
30	Pemkab. Majalengka	2014	100,00	55,56	77,78	80,83
		2013	90,00	77,78	83,89	
31	Pemkab. Sukabumi	2014	100,00	44,44	72,22	80,56
		2013	100,00	77,78	88,89	
32	Pemkab. Sumedang	2014	95,24	100,00	97,62	97,56
		2013	95,00	100,00	97,50	
33	Pemkab. Tasik	2014	95,24	22,22	58,73	58,67
		2013	95,00	22,22	58,61	

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

No.	LKPD Pemda	Tahun	Capaian Kumulatif			
			#A	#B	#A dan #B Per Tahun	#A dan #B Per LKPD
34	Pemko. Banjar	2014	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	
35	Pemko. Cimahi	2014	100,00	88,89	94,44	94,44
		2013	100,00	88,89	94,44	
36	Pemko. Depok	2014	95,24	88,89	92,06	93,25
		2013	100,00	88,89	94,44	
37	Pemko. Sukabumi	2014	100,00	88,89	94,44	94,44
		2013	100,00	88,89	94,44	
38	Pemprov. Jawa Tengah	2014	95,24	55,56	75,40	72,56
		2013	95,00	44,44	69,72	
39	Pemkab. Banjarnegara	2014	100,00	55,56	77,78	77,78
		2013	100,00	55,56	77,78	
40	Pemkab. Blora	2014	100,00	55,56	77,78	75,00
		2013	100,00	44,44	72,22	
41	Pemkab. Boyolali	2014	100,00	55,56	77,78	74,03
		2013	85,00	55,56	70,28	
42	Pemkab. Karanganyar	2014	71,43	55,56	63,49	70,63
		2013	100,00	55,56	77,78	
43	Pemkab. Kudus	2014	100,00	55,56	77,78	77,78
		2013	100,00	55,56	77,78	
44	Pemkab. Purworejo	2014	100,00	55,56	77,78	77,78
		2013	100,00	55,56	77,78	
45	Pemkab. Semarang	2014	100,00	55,56	77,78	72,22
		2013	100,00	33,33	66,67	
46	Pemko. Surakarta	2014	100,00	44,44	72,22	69,44
		2013	100,00	33,33	66,67	
47	Pemprov. Bali	2014	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	
48	Pemkab. Badung	2014	100,00	55,56	77,78	75,00
		2013	100,00	44,44	72,22	
49	Pemkab. Buleleng	2014	95,24	100,00	97,62	98,81
		2013	100,00	100,00	100,00	
50	Pemkab. Gianyar	2014	90,48	77,78	84,13	92,06
		2013	100,00	100,00	100,00	
51	Pemkab. Jembrana	2014	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	
52	Pemkab. Tabanan	2014	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	
53	Pemko. Denpasar	2014	90,48	100,00	95,24	97,62
		2013	100,00	100,00	100,00	
54	Pemprov. D.I. Yogyakarta	2014	100,00	88,89	94,44	90,69
		2013	85,00	88,89	86,94	

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

No.	LKPD Pemda	Tahun	Capaian Kumulatif			
			#A	#B	#A dan #B Per Tahun	#A dan #B Per LKPD
55	Pemkab. Bantul	2014	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	
56	Pemkab. Kulon Progo	2014	100,00	88,89	94,44	97,22
		2013	100,00	100,00	100,00	
57	Pemkab. Sleman	2014	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	
58	Pemko. Yogyakarta	2014	100,00	100,00	100,00	97,50
		2013	90,00	100,00	95,00	
59	Pemkab. Serang	2014	100,00	100,00	100,00	82,36
		2013	85,00	44,44	64,72	
60	Pemkab. Tangerang	2014	100,00	33,33	66,67	66,67
		2013	100,00	33,33	66,67	
61	Pemko. Cilegon	2014	100,00	44,44	72,22	69,44
		2013	100,00	33,33	66,67	

(Data diolah)

Tabel di atas menjelaskan tingkat capaian artikulasi kumulatif LKPD setiap pemda. Instrumen #A merupakan artikulasi antarpos dalam suatu LKPD sedangkan instrumen #B merupakan artikulasi antarkomponen LKPD.

Contoh kertas kerja analisis artikulasi LKPD berbasis kas menuju akrual disajikan pada lampiran III.

4.3 Analisis Artikulasi LKPD Berbasis Akrual

4.3.1 Analisis Artikulasi Antarpos dalam Suatu Komponen LKPD

Analisis artikulasi antarpos dalam suatu komponen LKPD berbasis akrual (diidentifikasi sebagai instrumen #C) untuk meyakinkan bahwa hubungan pos-pos yang menyusun suatu laporan keuangan yang meliputi LRA, laporan perubahan saldo anggaran lebih (LPSAL), laporan operasional (LO), neraca, dan laporan perubahan ekuitas (LPE) telah tepat dan benar disusun dan disajikan sesuai dengan SAP menurut PP No. 71 Tahun 2010. Analisis artikulasi antarpos dalam suatu komponen LKPD dimulai dengan

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

menentukan kriteria yang akan digunakan untuk menilai apakah fakta dalam lembar muka (*on the face*) LKPD telah menunjukkan kondisi yang berartikulasi. Kriteria artikulasi antarpos LKPD sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.10
Kriteria Artikulasi Antarpos dalam Suatu LKPD Berbasis Akrual

Uraian		2014	2013
#C.1 ARTIKULASI ANTARPOS LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
#.C.1.1	Jumlah Pendapatan LRA - Jumlah Belanja - Jumlah Transfer = Surplus/Defisit LRA	Ya = 1; Tidak = 0	Ya = 1; Tidak = 0
#.C.1.2	SiLPA/SiKPA= Surplus/Defisit LRA + Penerimaan Pembiayaan - Pengeluaran Pembiayaan	Ya = 1; Tidak = 0	Ya = 1; Tidak = 0
#C.2 ARTIKULASI ANTARPOS DI LAPORAN PERUBAHAN SAL			
#C.2.1	SAL akhir 2013 = SAL Awal 2014	Ya = 1; Tidak = 0	#N/A
#C.3 ARTIKULASI ANTARPOS DI LAPORAN ARUS KAS			
#C.3.1	Saldo Akhir Kas di BUD tahun 20x0 = Saldo Awal Kas di BUD tahun 20x1	Ya = 1; Tidak = 0	Ya = 1; Tidak = 0
#C.3.2	Kas Bersih dari Aktivitas Operasi = Arus kas masuk akt. operasi - Arus kas keluar akt. Operasi	Ya = 1; Tidak = 0	Ya = 1; Tidak = 0
#C.3.3	Kas Bersih dari Aktivitas investasi = Arus kas masuk akt. investasi - Arus kas keluar akt. investasi	Ya = 1; Tidak = 0	Ya = 1; Tidak = 0
#C.3.4	Kas Bersih dari Aktivitas pendanaan = Arus kas masuk Aktivitas Pendanaan - Arus kas keluar Aktivitas Pendanaan	Ya = 1; Tidak = 0	Ya = 1; Tidak = 0
#C.3.5	Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris = Arus kas masuk akt. transitoris - Arus kas keluar akt. Transitoris	Ya = 1; Tidak = 0	Ya = 1; Tidak = 0
#C.3.6	Kenaikan/Penurunan Kas selama periode = Penjumlahan kas bersih dari setiap aktivitas	Ya = 1; Tidak = 0	Ya = 1; Tidak = 0
#C.4 ARTIKULASI ANTARPOS LAPORAN OPERASIONAL			
#C.4.1	Jumlah Pendapatan LO - Jumlah Beban = Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	Ya = 1; Tidak = 0	Ya = 1; Tidak = 0
#C.4.2	Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional + Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional + Pos Luar Biasa = Surplus/Defisit-LO	Ya = 1; Tidak = 0	Ya = 1; Tidak = 0
#C.5 ARTIKULASI ANTARPOS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
#C.5.1	Ekuitas akhir 2013 = Ekuitas Awal 2014	Ya = 1; Tidak = 0	#N/A
#C.6 ARTIKULASI ANTARPOS DALAM NERACA			
#C.6.1	Jumlah Aset = Jumlah Kewajiban + Jumlah Ekuitas	Ya = 1; Tidak = 0	Ya = 1; Tidak = 0

(Data diolah)

Tabel di atas menunjukkan kriteria untuk menilai artikulasi antarpos dalam

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

LRA sebanyak 2 kriteria, LPSAL sebanyak 1 kriteria di tahun 2014 dan tidak menilai tahun 2013, LAK sebanyak 6 kriteria, LO sebanyak 4 kriteria, LPE sebanyak 1 kriteria dan tidak menilai tahun 2013, dan neraca sebanyak 1 kriteria. Fakta yang sesuai kriteria diberi skor 1 dan yang tidak sesuai diberi skor 0. Setelah keseluruhan kriteria diberikan skor, perolehan skor dijumlahkan secara keseluruhan kemudian dibagi dengan jumlah keseluruhan kriteria dikalikan 100% untuk mengetahui tingkat capaian artikulasi dalam persentase (%).

Hasil ringkasan analisis artikulasi antarpos LKPD tahun 2014 berbasis akrual yang beropini WTP ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.11
Tingkat Capaian Artikulasi Antarpos LKPD Berbasis Akrual

Artikulasi pada Antarpos dalam	Pemko. Tangerang		Pemkab. Banyumas		Pemkab. Jepara		Pemkab. Temanggung		Pemkab. Banyuwangi	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013
LRA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
LPSAL	100,00	n.a	100,00	n.a	100,00	n.a	100,00	n.a	0,00	n.a
LAK	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
LO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
LPE	100,00	n.a	100,00	n.a	100,00	n.a	100,00	n.a	100,00	n.a
Neraca	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Per Tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	93,33	100,00
Per Pemda	100,00		100,00		100,00		100,00		96,67	

(Data diolah)

Tabel di atas menjelaskan tingkat capaian artikulasi antarpos dalam suatu LKPD berbasis akrual pada 5 LKPD yang dianalisis. Hasil analisis menyatakan bahwa 4 LKPD mencapai tingkat capaian 100% sedangkan Pemkab. Banyuwangi mencapai tingkat capaian artikulasi sebesar 96,67%. Tingkat capaian artikulasi sebesar 100% mempunyai arti bahwa seluruh

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

hubungan antarpos pada masing-masing komponen LKPD telah sesuai dengan kriteria artikulasi.

4.3.2 Analisis Artikulasi Antarpos dalam Suatu Komponen LKPD

Analisis artikulasi antarkomponen LKPD berbasis akrual (instrumen #D) untuk meyakinkan bahwa hubungan antarkomponen LKPD telah disusun dan disajikan dengan tepat dan benar sesuai dengan SAP menurut PP No. 71 Tahun 2010. Analisis artikulasi antarkomponen LKPD dengan menganalisis hubungan antara lebih dari satu komponen LKPD yaitu artikulasi antara LRA dan LPSAL, LRA dan LAK, LAK dan neraca, LAK dan LPSAL, LO dan LPE, LO dan neraca, serta LPE dan neraca.

Masing-masing hubungan antarkomponen tersebut telah ditentukan kriteria yang akan digunakan untuk menilai apakah fakta dalam lembar muka (*on the face*) antarkomponen LKPD telah menunjukkan kondisi yang berartikulasi. Kriteria artikulasi antarkomponen LKPD yang digunakan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.12
Kriteria Artikulasi Antarkomponen LKPD Berbasis Akrual

Uraian		2014	2013
#D.1 ARTIKULASI ANTARA LRA DAN LPSAL			
#D.1.1	Penggunaan SILPA di LRA = Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan di LPSAL	Ya = 1; Tidak = 0	Ya = 1; Tidak = 0
#D.1.2	SILPA/SIKPA di LRA = SILPA/SIKPA di LPSAL	Ya = 1; Tidak = 0	Ya = 1; Tidak = 0
#D.2 ARTIKULASI LRA DAN LAK			
#D.2.1	Kas di LAK >= SILPA di LRA	Ya = 1; Tidak = 0	Ya = 1; Tidak = 0
#D.2.2	Jumlah Pendapatan di LRA = Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi + Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi - Hasil Penjuala Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - Pencairan Dana Cadangan	Ya = 1; Tidak = 0	Ya = 1; Tidak = 0

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Uraian		2014	2013
#D.2.3	Jumlah Penerimaan Pembiayaan - Penggunaan SILPA - Pencairan Dana Cadangan - Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan = Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	Ya = 1; Tidak = 0	Ya = 1; Tidak = 0
#D.2.4	Jumlah Belanja dan Transfer = Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi + Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi - Pembentukan Dana Cadangan - Penyertaan Modal Pemerintah	Ya = 1; Tidak = 0	Ya = 1; Tidak = 0
#D.2.5	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan - Pembentuka Dana Cadangan - Penyertaan Modal Pemerintah = Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	Ya = 1; Tidak = 0	Ya = 1; Tidak = 0
#D.2.6	Jumlah Pendapatan di LRA + Jumlah Penerimaan Pembiayaan - Penggunaan SILPA = Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi + Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi + Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	Ya = 1; Tidak = 0	Ya = 1; Tidak = 0
#D.2.7	Jumlah Belanja + Jumlah Transfer + Jumlah pengeluaran pembiayaan = Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi + Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi + Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	Ya = 1; Tidak = 0	Ya = 1; Tidak = 0
#D.3 ARTIKULASI ANTARA LAK DAN NERACA			
#D.3.1	Saldo Kas Akhir di LAK = Saldo Kas di Neraca	Ya = 1; Tidak = 0	Ya = 1; Tidak = 0
#D.4 ARTIKULASI ANTARA LAK DAN LPSAL			
#D.4.1	Saldo Kas Akhir di LAK >= LP SAL	Ya = 1; Tidak = 0	Ya = 1; Tidak = 0
#D.5 ARTIKULASI ANTARA LO DAN LPE			
#D.5.1	Surplus/Defisit - LO di LO = Surplus/Defisit LO di LPE	Ya = 1; Tidak = 0	Ya = 1; Tidak = 0
#D.6 ARTIKULASI ANTARA LO DAN NERACA			
#D.6.1	Beban Penyusutan di LO = Beban Penyusutan Aset Tetap + Beban Penyusutan Aset Lain-lain di CaLK	Ya = 1; Tidak = 0	Ya = 1; Tidak = 0
#D.6.2	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2013 + Penyusutan Aset Tetap karena perubahan kebijakan + Penyusutan Aset Tetap 2014 - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Dihapuskan = Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2014	Ya = 1; Tidak = 0	Ya = 1; Tidak = 0
#D.6.3	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2013 + Penyusutan Aset Lain-lain karena perubahan kebijakan + Penyusutan Aset Lain-lain 2014 - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain yang Dihapuskan = Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2014	Ya = 1; Tidak = 0	Ya = 1; Tidak = 0
#D.6.4	Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih 20x1 di Neraca = Penyisihan Piutang Tak Tertagih 20x0 di Neraca + Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 20x1 di LO	Ya = 1; Tidak = 0	Ya = 1; Tidak = 0
#D.7 ARTIKULASI ANTARA LPE DAN NERACA			
#D.7.1	Ekuitas Akhir di LPE = Ekuitas di Neraca	Ya = 1; Tidak = 0	Ya = 1; Tidak = 0

(Data diolah)

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Tabel di atas menunjukkan kriteria untuk menilai artikulasi antara komponen LRA dan LPSAL sebanyak 2 kriteria, antara LRA dan LAK sebanyak 7 kriteria, antara LAK dan neraca sebanyak 1 kriteria, antara LAK dan LPSAL sebanyak 1 kriteria, antara LO dan LPE sebanyak 1 kriteria, antara LO dan neraca sebanyak 4 kriteria dan antara LPE dan neraca sebanyak 1 kriteria. Fakta yang sesuai kriteria diberi skor 1 dan yang tidak sesuai diberi skor 0. Setelah keseluruhan kriteria diberikan skor, perolehan skor dijumlahkan secara keseluruhan kemudian dibagi dengan jumlah keseluruhan kriteria dikalikan 100% untuk mengetahui tingkat capaian artikulasi dalam persentase (%).

Hasil ringkasan analisis artikulasi antarkomponen LKPD tahun 2014 yang beropini WTP ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.13
Tingkat Capaian Artikulasi Antarkomponen LKPD Berbasis Akrual

Artikulasi Antarkomponen	Pemko. Tangerang		Pemkab. Banyumas		Pemkab. Jepara		Pemkab. Temanggung		Pemkab. Banyuwangi	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013
LRA - LPSAL	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
LRA – LAK	33,33	33,33	83,33	100,00	16,67	16,67	0,00	0,00	33,33	16,67
LAK - Neraca	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
LAK - LPSAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
LO – LPE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
LO - Neraca	25,00	100,00	75,00	100,00	50,00	100,00	75,00	100,00	50,00	100,00
LPE - Neraca	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Per Tahun	56,25	69,23	87,50	100,00	50,00	46,15	56,25	46,15	62,50	61,54
Per Pemda	62,74		93,75		48,08		51,20		62,02	

(Data diolah)

Tabel di atas menyatakan bahwa tidak ada satupun LKPD yang memenuhi kriteria 100%. Capaian tertinggi diperoleh oleh LKPD Pemkab. Banyumas dengan tingkat capaian artikulasi sebesar 93,75%.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

4.3.3 Artikulasi Kumulatif LKPD Berbasis Akrual

Pada bagian ini disampaikan perolehan tingkat artikulasi LKPD berbasis akrual dengan mengakumulasikan tingkat capaian artikulasi antara tingkat capaian artikulasi antarpos LKPD dan tingkat capaian artikulasi antarkomponen LKPD suatu pemda. Hasil analisis artikulasi kumulatif tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.14
Tingkat Capaian Artikulasi Kumulatif LKPD Berbasis Akrual

No.	LKPD Pemda	Tahun	Capaian Kumulatif			
			Instrumen #C	Instrumen #D	#C dan #D Per Tahun	#C dan #D Per LKPD
1	Pemko. Tangerang	2014	100,00	56,25	89,88	81,37
		2013	100,00	69,23	95,24	
2	Pemkab. Banyumas	2014	100,00	87,50	97,02	96,88
		2013	100,00	100,00	100,00	
3	Pemkab. Jepara	2014	100,00	50,00	86,90	74,04
		2013	100,00	46,15	86,90	
4	Pemkab. Temanggung	2014	100,00	56,25	91,07	73,81
		2013	100,00	100,00	85,71	
5	Pemkab. Banyuwangi	2014	93,33	62,50	83,33	88,10
		2013	100,00	61,54	94,05	

(Data diolah)

Tabel di atas menjelaskan tingkat capaian artikulasi kumulatif LKPD berbasis akrual per pemerintah daerah. Instrumen #C merupakan artikulasi antarpos dalam suatu LKPD sedangkan instrumen #D merupakan artikulasi antarkomponen LKPD. Tingkat capaian artikulasi tertinggi diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas sebesar 96,88% dan capaian tingkat artikulasi terrendah diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Contoh kertas kerja analisis artikulasi LKPD berbasis akrual disajikan pada lampiran IV.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

4.4 Identifikasi Tipe Ketidakartikulasian LKPD Berbasis Kas Menuju Akrual

Hasil analisis artikulasi di atas menyebutkan LKPD yang tidak mencapai tingkat artikulasi 100% sebanyak 59 LKPD yang terdiri dari 54 LKPD berbasis kas menuju akrual dan 5 LKPD berbasis akrual. Kondisi tersebut mendorong mendorong peneliti untuk mengidentifikasi tipe ketidakartikulasian LKPD secara menyeluruh. Teknik pengumpulan data yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tipe ketidakartikulasian tersebut ialah teknik dokumentasi dengan menggali informasi yang tersedia dalam data sekunder (laporan hasil audit BPK RI).

Berdasarkan hasil analisis artikulasi LKPD berbasis kas menuju akrual dan hasil mensarikan dari kertas kerja analisis artikulasi LKPD, peneliti mengelompokkan tipe ketidakartikulasian LKPD ke dalam 12 (dua belas) tipe sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.15
Tipe Ketidakartikulasian LKPD Berbasis Kas Menuju Akrual

Kode	Uraian Tipe Ketidakartikulasian LKPD	Kejadian	
		Jml.	%
1	Ketidakartikulasian antara LRA dan LAK karena perbedaan perlakuan konsolidasi pada LRA dan LAK	37	38,14
2	Perbedaan saldo akhir kas di LAK dan kas di neraca	18	18,56
3	Perbedaan SILPA di LRA dan SILPA di neraca	9	9,28
4	Perbedaan jumlah pengeluaran pembiayaan dengan arus kas keluar dari aktivitas pembiayaan	3	3,09
5	Tidak sesuainya dana disediakan untuk pembayaran kewajiban jangka pendek dengan kondisi kewajiban jangka pendeknya.	7	7,22
6	Kesalahan klerikal berupa salah mencantumkan angka dengan tepat pada LKPD.	2	2,06
7	Saldo kas lebih kecil dari SILPA	5	5,15
8	Saldo kas tidak merefleksikan SILPA, utang PFK dan pendapatan yang ditangguhkan.	7	7,22

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Kode	Uraian Tipe Ketidakartikulasian LKPD	Kejadian	
		Jml.	%
9	Jumlah penerimaan pembiayaan selain penggunaan SILPA tidak sama dengan arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan	5	5,15
10	Kesalahan penjulahan dalam LAK	1	1,03
11	Saldo awal kas di BUD tahun 2014 berbeda dengan saldo akhir kas di BUD tahun 2013	2	2,06
12	Kesalahan klasifikasi akun	1	1,03
`	Jumlah	97	100,00

(Data diolah)

Tabel di atas menjelaskan tipe ketidakartikulasian LKPD berbasis kas menuju akrual. Kejadian tipe ketidakartikulasian terbanyak sebesar 37 kejadian atau 38,14% dari total kejadian berupa ketidakartikulasian antara LRA dan LAK karena perbedaan perlakuan konsolidasi pada LRA dan LAK. Adapun sebaran kejadian tipe ketidakartikulasian LKPD berbasis kas menuju akrual disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.16
Sebaran Kejadian Tipe Ketidakartikulasian LKPD

No.	LKPD Pemda	Kode Tipe Katidak Artikulasian											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pemkab. Bojonegoro	1											
2	Pemkab. Bondowoso	1	1										
3	Pemkab. Jombang	1											
4	Pemkab. Lumajang	1		1									
5	Pemkab. Madiun	1	1					1					
6	Pemkab. Magetan	1				1							
7	Pemkab. Malang	1			1								
8	Pemkab. Mojokerto	1				1							
9	Pemkab. Nganjuk	1											
10	Pemkab. Ngawi	1	1										
11	Pemkab. Pacitan	1					1						
12	Pemkab. Pamekasan	1			1								
13	Pemkab. Pasuruan	1	1	1				1					

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

No.	LKPD Pemda	Kode Tipe Katidak Artikulasian											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Pemkab. Ponorogo	1	1					1					
15	Pemkab. Probolinggo	1	1										
16	Pemkab. Sidoarjo	1	1						1				
17	Pemkab. Situbondo	1											
18	Pemkab. Tulungagung	1								1			
19	Pemko. Blitar	1											
20	Pemko. Kediri	1											
21	Pemko. Madiun	1											
22	Pemko. Mojokerto	1											
23	Pemko. Surabaya	1											
24	Pemprov. Jawa Barat		1	1									
25	Pemkab. Bekasi					1			1				
26	Pemkab. Ciamis		1										
27	Pemkab. Cianjur				1					1			
28	Pemkab. Kuningan		1										
29	Pemkab. Majalengka					1			1				
30	Pemkab. Sukabumi	1	1										
31	Pemkab. Sumedang					1							
32	Pemkab. Tasik	1									1		
33	Pemko. Cimahi		1										
34	Pemko. Depok		1									1	
35	Pemko. Sukabumi		1										
36	Pemprov. Jawa Tengah	1				1							
37	Pemkab. Banjarnegara	1											
38	Pemkab. Blora	1								1			
39	Pemkab. Boyolali	1					1						
40	Pemkab. Karanganyar	1				1							1
41	Pemkab. Kudus	1											
42	Pemkab. Purworejo	1											
43	Pemkab. Semarang	1		1						1			

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

No.	LKPD Pemda	Kode Tipe Katidak Artikulasian											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Pemko. Surakarta	1	1	1						1			
45	Pemkab. Badung	1		1									
46	Pemkab. Buleleng											1	
47	Pemkab. Gianyar		1	1					1				
48	Pemko. Denpasar								1				
49	Pemprov. D.I. Yogyakarta								1				
50	Pemkab. Kulon Progo			1									
51	Pemko. Yogyakarta								1				
52	Pemkab. Serang		1					1					
53	Pemkab. Tangerang	1											
54	Pemko. Cilegon	1	1	1				1					
	Jumlah	37	18	9	3	7	2	5	7	5	1	2	1
	%	38,14	18,56	9,28	3,09	7,22	2,06	5,15	7,22	5,15	1,03	2,06	1,03

(Data diolah)

Tabel di atas menjelaskan pengelompokkan penyebab LKPD tidak mencapai tingkat artikulasi 100%. Dari 54 LKPD yang tidak berartikulasi diidentifikasi bahwa suatu LKPD dapat disebabkan oleh satu/lebih tipe ketidakartikulasian LKPD. Penjelasan lebih lanjut mengenai tipe ketidakartikulasian LKPD sebagai berikut:

1. Ketidakartikulasian antara LRA dan LAK karena perbedaan perlakuan konsolidasi pada LRA dan LAK.

   LRA dan LAK keduanya berbasis kas dimana semua transaksi kas yang memengaruhi LRA akan sama terlaporkan dalam LAK. Ketidakartikulasian terjadi karena LRA badan layanan umum daerah (BLUD) dikonsolidasikan ke dalam LRA pemerintah daerah sedangkan LAK BLUD tidak dikonsolidasikan ke dalam LAK pemerintah daerah.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 13 paragraf 117 menyatakan LRA badan layanan umum (BLU) dikonsolidasikan ke dalam LRA entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya. Demikian juga pada paragraf 119 menyatakan bahwa LAK BLU dikonsolidasikan pada LAK unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum dalam hal ini pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) di entitas pelaporan pemerintah daerah. Contoh kejadian tersebut terjadi pada LKPD Pemkab. Pacitan sebagai berikut:

Tabel 4.17
Akibat Perlakuan Berbeda pada LRA BLUD dan LAK BLUD Saat Konsolidasi

Uraian	2014	2013
Pendapatan	1.260.505.396.063,59	1.061.397.988.848,16
Jumlah arus masuk kas dari aktivitas operasional dan investasi aset nonkeuangan	1.215.139.655.870,62	1.035.736.304.445,62
Selisih?	45.365.740.192,97	25.661.684.402,54
Jumlah Belanja dan Transfer	1.202.651.576.765,69	1.036.980.098.890,10
Jumlah arus masuk kas dari aktivitas operasional dan investasi aset nonkeuangan	1.163.999.789.702,19	1.010.426.120.961,21
Selisih?	38.651.787.063,50	26.553.977.928,89

(Data diolah)

Tabel di atas menjelakan perbedaan yang mengakibatkan LRA dan LAK tidak artikulasi karena adanya perbedaan perlakuan konsolidasi pada LRA dan LAK BLUD. Kondisi tersebut di alami oleh 37 LKPD.

2. Perbedaan Saldo Akhir Kas di LAK dan Kas di Neraca

Kas di neraca harus didukung oleh saldo akhir kas di LAK. Neraca dan LAK memiliki tanggal pelaporan yang sama yaitu 31 Desember. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu (KK Par. 59). Sedangkan LAK menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaaan, perubahan kas dan

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan (PSAP No. 01 Par. 85). Sehingga kas dan setara kas di neraca harus didukung oleh saldo kas dan setara kas di LAK untuk tanggal pelaporan yang sama. Contoh kejadian tersebut terjadi pada LKPD Pemkab. Bondowoso sebagai berikut:

Tabel 4.18
Penyajian Saldo Akhir Kas di LAK dan Neraca LKPD Pemkab. Bondowoso

Uraian	2014	2013
Saldo Akhir Kas di LAK	159.647.138.032,33	97.563.553.974,15
Kas di Neraca	159.647.138.032,33	96.734.990.389,18
Selisih	0,00	828.563.584,97

(Data diolah)

Tabel di atas menjelaskan bahwa saldo akhir kas di LAK pada tanggal pelaporan 31 Desember 2013 lebih besar dari kas yang tercantum dalam neraca sebesar Rp828.563.584,97, sedangkan pada tanggal pelaporan 31 Desember 2014 tidak terjadi selisih. Kondisi perbedaan seperti yang terjadi pada LKPD Pemkab. Bondowoso juga terjadi pada 17 LKPD lainnya.

3. Perbedaan SILPA di LRA dan SILPA di Neraca

LKPD yang berartikulasi ditunjukkan dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) di neraca didukung oleh SILPA di LRA. SILPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) selama satu periode pelaporan (PSAP 01 Par. 8) dimana pendapatan, belanja dan pembiayaan di LRA akan mempengaruhi SILPA dalam ekuitas dana lancar di neraca. Contoh kejadian tersebut terjadi pada LKPD Pemkab. Pasuruan sebagai berikut:

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Tabel 4.19
Perbedaan SILPA di LRA dan Neraca LKPD Pemkab. Pasuruan

Uraian	2014	2013
SILPA di LRA	468.662.491.563,05	262.418.451.362,62
SILPA di Neraca	468.662.837.309,05	262.416.439.364,62
SILPA di LRA	(345.746,00)	2.011.998,00

(Data diolah)

Tabel di atas menjelaskan bahwa perbedaan SILPA di LRA dan neraca pada tahun 2014 dan 2013 pada LKPD Pemkab. Pasuruan. Kondisi perbedaan seperti yang terjadi pada LKPD Pemkab. Pasuruan juga terjadi pada 8 LKPD lainnya dengan nilai selisih yang berbeda-beda.

4. Perbedaan Jumlah Pengeluaran Pembiayaan dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan

Jumlah pengeluaran pembiayaan di LRA harus didukung oleh arus kas keluar dari aktivitas pembiayaan di LAK. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan (PSAP No. 2 Par. 55). Arus kas keluar dari aktivitas pembiayaan adalah pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran (PSAP No. 03 Par. 8). Dari kedua definisi tersebut, pengeluaran pembiayaan di LRA seharusnya tercermin dalam arus kas keluar dari aktivitas pembiayaan.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Contoh kejadian tersebut terjadi pada LKPD Pemkab. Malang sebagai berikut:

Tabel 4.20
Perbedaan Pengeluaran Pembiayaan di LRA dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan Pemkab. Malang

Uraian	2014	2013
Pengeluaran Pembiayaan	20.572.985.162,44	17.694.629.138,70
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan	17.000.000.000,00	17.694.629.138,70
Selisih?	3.572.985.162,44	0,00

(Data diolah)

Tabel di atas menjelaskan bahwa LKPD Pemkab. Malang pada tahun 2014 terdapat selisih pengeluaran pembiayaan dan arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp3.572.985.162,44 dimana pada tahun 2013 tidak terjadi selisih. Kondisi perbedaan seperti di atas juga terjadi pada LKPD Pemkab. Pamekasan dan LKPD Pemkab. Cianjur.

5. Tidak Sesuainya Dana Disediakan untuk Pembayaran Kewajiban Jangka Pendek dengan Kondisi Kewajiban Jangka Pendeknya.

Akun penyeimbang Kewajiban Jangka Pendek adalah Dana Disediakan untuk Pembayaran Kewajiban Jangka Pendek sebagai pengurang Ekuitas Dana Lancar di neraca. Unsur Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Utang PFK merupakan potongan oleh bendahara pengeluaran maupun bendahara umum daerah berupa pajak/iuran wajib pegawai/tabungan perumahan maka perhitungan Dana Disediakan untuk Kewajiban Jangka Pendek tidak memperhitungkan Utang PFK. Contoh kejadian tersebut terjadi pada LKPD Pemkab. Magetan sebagai berikut:

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Tabel 4.21
Perbedaan Dana Disediakan untuk Pembayaran Kewajiban Jangka Pendek dengan Kewajiban Jangka Pendek Pemkab. Magetan

Uraian	2014	2013
Kewajiban Jangka Pendek selain Utang PFK	1.588.417.278,30	4.448.756.012,05
Dana Disediakan untuk Pembayaran Kewajiban Jangka Pendek	(1.588.417.278,30)	(4.448.604.171,05)
Selisih?	0,00	151.841,00

(Data diolah)

Tabel di atas menjelaskan bahwa LKPD Pemkab. Magetan pada tahun 2013 terdapat selisih antara Kewajiban Jangka Pendek (tidak termasuk Utang PFK) dengan Dana Disediakan untuk Pembayaran Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp15.841,00 dimana pada tahun 2014 tidak terjadi selisih. Kondisi perbedaan seperti yang terjadi pada LKPD Pemkab. Magetan juga terjadi 6 LKPD lainnya dengan nilai selisih yang berbeda-beda.

6. Kesalahan Klerikal Berupa Salah Mencantumkan Angka Dengan Tepat pada LKPD.

Kesalahan klerikal merupakan kesalahan yang sederhana, namun berakibat pada tingkat capaian artikulasi LKPD secara keseluruhan. Contoh kejadian tersebut terjadi pada LKPD Pemkab. Pacitan sebagai berikut:

Tabel 4.22
Kesalahan Klerikal pada LKPD Pemkab. Pacitan

Uraian	2014	2013
T a n a h	464.008.995.264,09	465.613.335.690,00
Peralatan dan mesin	273.145.128.219,06	237.453.300.118,22
Gedung dan Bangunan	575.481.185.124,24	443.474.263.768,23
Jalan, Irigasi dan Jaringan	749.083.668.790,24	639.400.016.080,33
Aset Tetap Lainnya	45.765.990.136,30	39.733.285.747,08
Konstruksi Dalam Pengerjaan	11.111.431.878,99	10.382.389.233,38
Akumulasi Penyusutan	(578.629.536.492,55)	(442.181.503.902,35)
Hasil Penjumlahan	**1.539.966.862.920,37**	**1.393.875.086.734,89**
Nilai tercantum di neraca	**1.539.966.862.920,37**	**1.393.875.086.734,98**
Selisih	**0,00**	**0,09**

(Data diolah)

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Tabel di atas menunjukkan kesalahan klerikal, seharusnya hasil penjumlahan diperoleh Rp1.393.875.086.734,89 namun tertulis Rp1.393.875.086.734,98 yang mengakibatkan selisih 0,09. Kondisi ini juga terjadi pada LKPD Pemkab. Boyolali dimana nilai total aset sebesar Rp2.568.486.391.950,37 namun tercantum total ekuitas dana dan kewajiban sebesar Rp2.568.486.391.950,36 atau selisih 0,01.

7. Saldo Kas Lebih Kecil dari SILPA

Saldo kas seharusnya sama atau lebih besar dari SILPA mengingat SILPA dibentuk dari transaksi anggaran saja, sedangkan kas dibentuk dari transaksi anggaran dan transaksi non anggaran. Transaksi anggaran berupa realisasi belanja dan pengeluaran pembiayaan dilarang melebihi dari yang dianggarkan sedangkan realisasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan bisa lebih atau kurang dari yang dianggarkan. Contoh kejadian tersebut terjadi pada LKPD Pemkab. Pasuruan sebagai berikut:

Tabel 4.23
Kas Lebih Kecil dari SILPA pada LKPD Pemkab. Pasuruan

Uraian	2014	2013
Kas di LAK	434.806.675.841,09	257.479.068.385,55
SILPA di LRA	468.662.491.563,05	262.418.451.362,62
Selisih	(33.855.815.721,96)	(4.939.382.977,07)

(Data diolah)

Tabel di atas menunjukkan kas di LAK lebih kecil dari SILPA di LRA. Hal ini disebabkan saldo kas di BLUD tidak dimasukkan ke dalam saldo kas di LAK. Kejadian ini juga dialami oleh 3 LKPD lainnya dengan sebab yang sama dan LKPD Pemkab. Cilegon disebabkan adanya koreksi SILPA setelah pembiayaan netto di LRA.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

8. Saldo Kas Tidak Merefleksikan SILPA, Utang PFK dan Pendapatan yang Ditangguhkan.

Kas di neraca dibentuk oleh SILPA, utang PFK yang terdapat pada bendahara pengeluran maupun BUD dan pendapatan yang ditangguhkan berupa penerimaan kas dari pendapatan oleh bendahara penerimaan yang belum disetorkan hingga tanggal pelaporan 31 Desember. Contoh kejadian tersebut terjadi pada LKPD Pemkab. Sidoarjo sebagai berikut:

Tabel 4.24
Saldo Kas Tidak Mencerminkan SILPA, Utang PFK dan Pendapatan yang Ditangguhkan pada LKPD Pemkab. Sidoarjo

Uraian	2014	2013
Jumlah Kas	716.242.617.936,27	483.969.736.493,87
SILPA	714.009.122.998,74	483.957.500.755,87
Saldo Utang PFK	2.074.398.697,53	12.235.738,00
Pendapatan yang Ditangguhkan	0,00	0,00
Jumlah	716.083.521.696,27	483.969.736.493,87
Selisih?	159.096.240,00	0,00

(Data diolah)

Tabel di atas menunjukkan jumlah kas melebihi penjumlahan SILPA, utang PFK dan pendapatan yang ditangguhkan di neraca sebesar Rp 159.096.240.000,00 pada neraca tahun 2014 dan tidak terjadi pada neraca tahun 2013.

9. Jumlah Penerimaan Pembiayaan Selain Penggunaan SILPA Tidak Sama Dengan Arus Masuk Kas Aktivitas Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain penerimaan pinjaman, penjualan obligasi, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman daerah, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

cadangan (PSAP No. 2 Par. 50). Salah satu unsur penerimaan pembiayaan dalam LRA ialah Penggunaan SILPA yang tidak termasuk definisi penerimaan pembiayaan. Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan ialah penerimaan kas yang perlu dibayar kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran (PSAP 03 Par. 8). Contoh pada kejadian tersebut terdapat pada LKPD Pemkab. Tulungagung sebagai berikut:

Tabel 4.25
Penerimaan Pembiayaan Selain Penggunaan SILPA Tidak Sama Dengan Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan Pada Pemkab. Tulungagung

Uraian	2014	2013
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	181.608.908.282,95	94.377.204.358,82
Penggunaan SILPA	181.608.908.282,95	83.845.373.991,37
Jumlah	0,00	10.531.830.367,45
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan	0,00	3.874.091.247,45
Selisih?	0,00	6.657.739.120,00

(Data diolah)

Tabel di atas menunjukkan arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan di LAK lebih kecil dari jumlah penerimaan pembiayaan selain penggunaan SILPA di LRA pada tahun 2013 sebesar Rp6.657.739.120,00. Hal tersebut juga terjadi pada 4 LKPD lainnya yaitu LKPD Pemkab. Cianjur, LKPD Pemkab. Blora, LKPD Pemkab. Semarang, dan LPKD Pemkab. Surakarta.

10. Kesalahan Penjumlahan dalam LAK

Kesalahan dalam LAK berupa kesalahan penjumlahan pos-pos dalam LAK. Hal tersebut terjadi pada 1 LKPD yaitu LKPD Pemkab. Tasik. Kesalahan LAK berupa kesalahan penjumlahan pada arus masuk kas dari aktivitas operasi sebagai berikut:

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Tabel 4.26
Kesalahan Penjulahan LAK pada LKPD Pemkab. Tasik Tahun 2014

Uraian	Tercantum	Seharusnya
Pajak Daerah	44.253.007.592,00	44.253.007.592,00
Retribusi Daerah	33.530.282.672,00	33.530.282.672,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.227.491.780,00	10.227.491.780,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	19.573.233.375,00	19.573.233.375,00
Dana Bagi Hasil Pajak	50.055.292.012,00	50.055.292.012,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	34.780.512.057,00	34.780.512.057,00
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	2.953.809.893,00	2.953.809.893,00
Dana Alokasi Umum	1.342.934.278.000,00	1.342.934.278.000,00
Dana Alokasi Khusus	110.312.210.000,09	110.312.210.000,09
Dana Penyesuaian	411.137.653.000,00	411.137.653.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak	90.983.601.513,00	90.983.601.513,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi	369.107.198.403,00	369.107.198.403,00
Jumlah	2.619.848.360.297,00	2.519.848.570.297,09

(Data diolah)

Tabel di atas menunjukkan kesalahan penjumlahan dari seharusnya Rp2.519.848.570.297,09 namun tercantum Rp2.619.848.360.297,00 atau terjadi selisih mendekati Rp100.000.000.000,00. Kesalahan penjumlahan juga terjadi pada penjumlahan arus keluar kas dari aktivitas operasi.

11. Saldo Awal Kas di BUD Tahun 2014 Berbeda Dengan Saldo Akhir Kas di BUD Tahun 2013

Kesalahan pencantuman saldo akhir tahun sebelumnya menjadi saldo awal tahun berjalan merupakan kesalahan yang sederhana, namun mengakibatkan ketidakartikulasian secara keseluruhan. Sebagai contoh kejadian pada LKPD Pemkab. Depok dan Pemkab. Buleleng sebagi berikut:.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Tabel 4.27
Saldo Awal Kas di BUD Tahun 2014 Berbeda Dengan Saldo Akhir Kas di BUD Tahun 2013 pada LKPD Pemkab. Buleleng dan Pemkab. Depok

Uraian	Pemkab. Buleleng	Pemkab. Depok
Saldo Akhir Kas di BUD tahun 2013	111.632.701.512,59	582.691.092.838,29
Saldo Awal Kas di BUD tahun 2014	111.631.931.788,59	582.690.607.838,29
Selisih	769.724,00	485.000,00

(Data diolah)

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada LKPD Pemkab. Buleleng diketahui saldo awal kas di BUD tahun 2014 lebih kecil dari saldo akhir kas di BUD tahun 2013 sebesar Rp769.724,00 dan pada LKPD Pemkab Depok saldo awal kas di BUD tahun 2014 lebih kecil dari saldo akhir kas di BUD tahun 2013 lebih kecil sebesar Rp485.000,00.

12. Kesalahan Klasifikasi Akun

Kesalahan klasifikasi akun terjadi pada LKPD Pemkab. Karanganyar yaitu pencantuman nilai Dana Disediakan untuk Pembayaran Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp4.078.539.369,00, yang seharusnya nilai tersebut diklasifikasikan sebagai Dana yang Disediakan untuk Pembayaran Kewajiban Jangka Pendek di ekuitas dana lancar.

4.5 Identifikasi Tipe Ketidakartikulasian LKPD Berbasis Akrual

Berdasarkan hasil analisis artikulasi LKPD berbasis akrual di atas, dari 5 LKPD yang dianalisis, semua dinyatakan tidak memeroleh tingkat capaian artikulasi LKPD 100%. Tabel berikut akan menjelaskan hasil identifikasi tipe ketidakartikulasian LKPD berbasis akrual.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Tabel 4.28
Tipe Ketidakartikulasian LKPD Berbasis Akrual

No.	Uraian Tipe/Jenis Ketidakartikulasian	Kejadian	
		Jml.	%
1	Jumlah pengeluaran pembiayaan selain pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal di LRA tidak terefleksikan dalam arus kas keluar dari aktivitas pendanaan di LAK	3	12,50
2	Saldo anggaran lebih (SAL) akhir tahun 2013 berbeda dengan SAL awal tahun 2014	1	4,17
3	Ketidakartikulasian antara LRA dan LAK karena perbedaan perlakuan konsolidasi pada LRA dan LAK	4	16,67
4	Selisih akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2014 dengan tahun 2013 di neraca tidak terrefleksikan dalam beban penyusutan aset tetap di LO dan pengurangan akumulasi penyusutan akibat penghapusan aset tetap	4	16,67
5	Selisih amortisasi aset tidak berwujud tahun 2014 dengan tahun 2013 di neraca terrefleksikan dalam beban amortisasi di LO	4	16,67
6	Selisih penyisihan piutang tahun 2014 dengan tahun 2013 di neraca terrefleksikan dalam beban penyisihan piutang di LO	4	16,67
7	selisih Penggunaan SILPA di LRA dengan penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan di LPSAL	1	4,17
8	Kesalahan pencantuman SILPA di LRA dengan SILPA di LPSAL.	1	4,17
9	Selisih penerimaan pembiayaan selain penggunaan SILPA, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan di LRA dengan arus masuk dari aktivitas pendanaan di LAK,	1	4,17
10	Saldo akhir kas di LAK berbeda dengan kas dan setara kas di neraca pada laporan keuangan tahun 2013.	1	4,17
	Jumlah Kejadian	24	100,00

(Data diolah)

Berdasarkan kertas kerja artikulasi, peneliti melakukan review kembali kepada kertas kerja artikulasi untuk mngidentifikasi tipe ketidakartikulasian LKPD berbasis akrual. Hasil identifikasi ketidakartikulasian disajikan sebagai berikut:

1. LKPD Pemkab. Banyumas

   Tingkat capaian artikulasi LKPD Pemkab. Banyumas sebesar 96,88% atau tidak mencapai 100% disebabkan oleh jumlah pengeluaran pembiayaan selain pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal di LRA terrefleksikan dalam arus kas keluar dari aktivitas pendanaan di LAK.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

2. LKPD Pemkab. Banyuwangi

   Tingkat capaian artikulasi LKPD Pemkab. Banyuwangi sebesar 88,10% atau tidak mencapai 100% disebabkan oleh:

   a. Saldo anggaran lebih (SAL) akhir tahun 2013 berbeda dengan SAL awal tahun 2014 sebesar Rp200,00. Kejadian ini disebabkan oleh kesalahan penjumlahan pada saat penyusunan LRA tahun 2013 dimana hasil perhitungan SILPA seharusnya Rp227.680.687.893,66, namun tertulis SILPA sebesar Rp Rp227.680.687.693,66. Hal tersebut berpengaruh pada artikulasi pada LPSAL,
   b. Ketidakartikulasian antara LRA dan LAK. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan perlakuan konsolidasi LRA BLUD dan LAK BLUD terhadap LKPD di entitas pelaporan seperti pada LKPD berbasis kas menuju akrual,
   c. Jumlah pengeluaran pembiayaan selain pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal di LRA terrefleksikan dalam arus kas keluar dari aktivitas pendanaan di LAK,
   d. Selisih akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2014 dengan tahun 2013 di neraca terrefleksikan dalam beban penyusutan aset tetap di LO dan pengurangan akumulasi penyusutan akibat penghapusan aset tetap.
   e. Selisih penyisihan piutang tahun 2014 dengan tahun 2013 di neraca terrefleksikan dalam beban penyisihan piutang di LO.

3. LKPD Pemko. Tangerang

   Tingkat capaian artikulasi LKPD Pemko. Tangerang sebesar 81,37%

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

atau tidak mencapai 100% disebabkan oleh:

a. Ketidakartikulasian antara LRA dan LAK. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan perlakuan konsolidasi LRA BLUD dan LAK BLUD terhadap LKPD di entitas pelaporan seperti pada LKPD berbasis kas menuju akrual,
b. Selisih akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2014 dengan tahun 2013 di neraca terrefleksikan dalam beban penyusutan aset tetap di LO dan pengurangan akumulasi penyusutan akibat penghapusan aset tetap,
c. Selisih amortisasi aset tidak berwujud tahun 2014 dengan tahun 2013 di neraca terrefleksikan dalam beban amortisasi di LO,
d. Selisih penyisihan piutang tahun 2014 dengan tahun 2013 di neraca terrefleksikan dalam beban penyisihan piutang di LO.

4. LKPD Pemkab. Jepara

Tingkat capaian artikulasi LKPD Pemkab. Jepara sebesar 74,04% atau tidak mencapai 100% disebabkan oleh:

a. Ketidakartikulasian antara LRA dan LPSAL dimana masih terjadi selisih Penggunaan SILPA di LRA dengan penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan di LPSAL. Kondisi ini terjadi baik pada laporan keuangan tahun 2014 dan 2013,
b. Kesalahan pencantuman SILPA di LRA dengan SILPA di LPSAL,
c. Ketidakartikulasian antara LRA dan LAK. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan perlakuan konsolidasi LRA BLUD dan LAK BLUD terhadap LKPD di entitas pelaporan.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

d. Selisih akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2014 dengan tahun 2013 di neraca terrefleksikan dalam beban penyusutan aset tetap di LO dan pengurangan akumulasi penyusutan akibat penghapusan aset tetap,
e. Selisih penyisihan piutang tahun 2014 dengan tahun 2013 di neraca terrefleksikan dalam beban penyisihan piutang di LO.

5. LKPD Pemkab. Temanggung

Tingkat capaian artikulasi LKPD Pemkab. Temanggung sebesar 73,81% atau tidak mencapai 100% disebabkan oleh:

a. Ketidakartikulasian antara LRA dan LAK. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan perlakuan konsolidasi LRA BLUD dan LAK BLUD terhadap LKPD di entitas pelaporan seperti pada LKPD berbasis kas menuju akrual,
b. Selisih penerimaan pembiayaan selain penggunaan SILPA, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan di LRA dengan arus masuk dari aktivitas pendanaan,
c. Selisih pengeluaran pembiayaan selain pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal pemerintah di LRA dengan arus keluar kas dari aktivitas pendanaan di LAK,
d. Selisih akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2014 dengan tahun 2013 di neraca terrefleksikan dalam beban penyusutan aset tetap di LO dan pengurangan akumulasi penyusutan akibat penghapusan aset tetap,
e. Selisih penyisihan piutang tahun 2014 dengan tahun 2013 di neraca

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

terrefleksikan dalam beban penyisihan piutang di LO,

f. Saldo akhir kas di LAK berbeda dengan kas dan setara kas di neraca pada laporan keuangan tahun 2013.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. LKPD yang mencapai tingkat artikulasi LKPD 100% sebanyak 7 LKPD yaitu LKPD Pemko. Malang, LKPD Pemko. Banjar, LKPD Pemprov. Bali, LKPD Pemkab. Jembrana, LKPD Pemkab. Tabanan, LKPD Pemkab. Bantul, dan LKPD Pemkab. Sleman.
2. Sebanyak 54 LKPD berbasis kas menuju akrual dan 5 LKPD berbasis akrual mencapai tingkat artikulasi LKPD kurang dari 100%,
3. Hasil identifikasi tipe ketidakartikulasian LKPD berbasis kas menuju akrual diperoleh setidaknya oleh 12 tipe yaitu:
    a. Ketidakartikulasian antara LRA dan LAK karena perbedaan perlakuan konsolidasi pada LRA dan LAK,
    b. Perbedaan saldo akhir kas di LAK dan kas di neraca,
    c. Perbedaan SILPA di LRA dan SILPA di neraca,
    d. Perbedaan jumlah pengeluaran pembiayaan dengan arus kas keluar dari aktivitas pembiayaan,
    e. Tidak sesuainya dana disediakan untuk pembayaran kewajiban jangka pendek dengan kondisi kewajiban jangka pendeknya,
    f. Kesalahan klerikal berupa salah mencantumkan angka dengan tepat

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

pada LKPD,

g. Saldo kas lebih kecil dari SILPA,

h. Saldo kas tidak merefleksikan SILPA, utang PFK dan pendapatan yang ditangguhkan,

i. Jumlah penerimaan pembiayaan selain penggunaan SILPA tidak sama dengan arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan,

j. Kesalahan penjulahan dalam LAK,

k. Saldo awal kas di BUD tahun 2014 berbeda dengan saldo akhir kas di BUD tahun 2013,

l. Kesalahan klasifikasi akun.

4. Hasil identifikasi tipe ketidakartikulasian LKPD berbasis akrual sebanyak 10 tipe yaitu:

a. Jumlah pengeluaran pembiayaan selain pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal di LRA tidak terefleksikan dalam arus kas keluar dari aktivitas pendanaan di LAK,

b. Saldo anggaran lebih (SAL) akhir tahun 2013 berbeda dengan SAL awal tahun 2014,

c. Ketidakartikulasian antara LRA dan LAK karena perbedaan perlakuan konsolidasi pada LRA dan LAK,

d. Selisih akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2014 dengan tahun 2013 di neraca tidak terrefleksikan dalam beban penyusutan aset tetap di LO dan pengurangan akumulasi penyusutan akibat penghapusan aset tetap,

e. Selisih amortisasi aset tidak berwujud tahun 2014 dengan tahun

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

2013 di neraca terrefleksikan dalam beban amortisasi di LO,

f. Selisih penyisihan piutang tahun 2014 dengan tahun 2013 di neraca terrefleksikan dalam beban penyisihan piutang di LO,

g. selisih Penggunaan SILPA di LRA dengan penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan di LPSAL,

h. Kesalahan pencantuman SILPA di LRA dengan SILPA di LPSAL,

i. Selisih penerimaan pembiayaan selain penggunaan SILPA, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan di LRA dengan arus masuk dari aktivitas pendanaan di LAK,

j. Saldo akhir kas di LAK berbeda dengan kas dan setara kas di neraca pada laporan keuangan tahun 2013.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, disampaikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut.

1. Penyusun LKPD dan Konsultan Pendamping semestinya:
   a. melakukan konsolidasi yang konsisten pada LRA BLUD dan LAK BLUD menjadi LKPD,
   b. memanfaatkan teknologi informasi yang andal dan terintegrasi guna mengeliminasi *human error* dan kesalahan klerikal yang tidak perlu,
   c. melakukan penilaian artikulasi LKPD secara mandiri sebelum LKPD diserahkan kepada inspektorat daerah untuk direviu.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

2. Inspektorat Daerah semestinya:
   a. melakukan reviu atas LKPD dengan seksama sesuai dengan Permendagri Nomor 4 Tahun 2008,
   b. melakukan analisis artikulasi secara mendalam sebelum menerbitkan laporan hasil reviu yang berisi pernyataan tanggung jawab dari kepala daerah berupa pernyataan atau asersi yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan SAP.
3. BPK RI semestinya:
   a. dapat mempertimbangkan untuk memasukan analisis artikulasi LKPD pada program pemeriksaan untuk melihat secara menyeluruh LKPD yang akan diperiksa,
   b. melakukan koreksi yang diperlukan setelah dilakukan pendalaman apabila ditemukan LKPD tidak berartikulasi,
4. Penyusun Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kementerian Dalam Negari agar menyusun pedoman penyusunan LKPD dalam suatu buletin teknis guna menjawab perbedaan persepsi khususnya saat penyusunan laporan konsolidasian dan perlakuan jika suatu pemerintah daerah memiliki entitas akuntansi/entitas pelaporan berupa BLUD.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal identifikasi faktor-faktor penyebab LKPD tidak berartikulasi. Peneliti hanya mampu menggali

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

tipe ketidakartikulasian dengan keterbatasan sebagai berikut:

a. penggunaan sumber data dalam menganalisis dan mengidentifikasi tipe ketidakartikulasian hanya berasal dari informasi data sekunder dan tidak dilakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak terkait.
b. Identifikasi tipe ketidakartikulasian tidak menggunakan data primer melalui teknik wawancara. Hal tersebut mengakibatkan tingkat kedalaman identifikasi menjadi lebih terbatas.

Disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk dapat menggali penyebab LKPD tidak berartikulasi dengan menentukan obyek penelitian yang lebih spesifik namun dengan penelitian yang lebih mendalam.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pemeriksa Keuangan RI 2015, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II BPK RI Tahun 2014*.

_____ 2015, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK RI Tahun 2015.*

Bahnson, PR, Miller, PBW, & Budge, BP 1996, 'Nonarticulation in Cash Flow Statements and Implications for Education, Research and Practice', *Accounting Horizons,* 10(4), 1-15, dilihat 28 Januari 2016, http://search.proquest.com/docview/208903152?accountid=13771.

Creswell, JW 2014, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th Edition, Sage Publications, California.

Dona, S 2013, 'Evaluasi Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Inspektorat Kota Payakumbuh)', Tesis pada Program Studi Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Givens, HR 1966, 'Basic Accounting Postulates', *The Accounting Review*, 41(3), 458–463, dilihat 28 Januari 2016, http://www.jstor.org/stable/244475.

Halim, A, Kusufi, MS 2012, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta.

Hennink, M, Hutter, I, Bailey, A 2011, *Qualitative Research Methods*, Sage Publication, California.

Jusup, AH 2010, *Auditing (Pengauditan)*, Bagian Penerbitan STIE YKPN, Yogyakarta.

Kinnunen, J, Koskella, M, 1999, 'Do cash flows reported by firms articulate with their income statements and balance sheets? Descriptive evidence from Finland', *The European Accounting Review*, 8:4.

Mahmudi 2007, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik,* UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Muchtar, A 2013, 'Analisis Peran Auditor Internal Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Inspektorat Kabupaten Sleman', Tesis pada Program Magister Ekonomika Pembangunan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Prasetio, A 2012, 'Implementasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas LKPD pada Inspektorat Daerah Kab. Sleman dan Bantul', Tesis pada Program Studi Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, dilihat pada 2 Mei 2016, http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php.

Ratmono, D, Sholihin, M 2015, *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual,* Cetakan Pertama, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Republik Indonesia 1945, *Undang-Undang Dasar Negara Repblik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV.*

_____ 2003, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.*

_____ 2004, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.*

_____ 2005, *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*

_____ 2005, *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*

_____ 2006, *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.*

_____ 2006, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

_____ 2008, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.*

_____ 2010, *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*

Ritonga, IT 2010, *Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,* LKMPD, Yogyakarta.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Ritonga, IT, Suhartono, E 2012, *Akuntansi Keuangan Daerah (Sesuai PP 71/2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan),* Edisi I, LKMPD, Yogyakarta.

Soeratno, Arsyad, L 2008, *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis,* UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Soewadji, Y, 2012, Pengantar Metodologi Penelitian, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Sugiyono 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung.

Sujoko, E 2016, 'Introduction to Qualitative Research', lembaran kuliah dibagikan pada Kuliah Umum Penelitian Kualitatif, Universitas Gadjah Mada, Gedung Pertamina Tower Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 18 Februari.

Suwardjono 2013, *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan,* Edk 3, BPFE, Yogyakarta.

Windarsih, W 2015, 'Hubungan Kualitas Reviu Laporan Keuangan dengan Temuan Pemeriksaan BPK pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY', Tesis pada Program Studi Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Rincian Capaian Tingkat Artikulasi Antarpos LKPD Berbasis Kas Menuju Akrual Se-Jawa dan Bali

No.	LKPD	Komp. LK	Tahun	Kelompok Tingkat Capaian Artikulasi LKPD									
				100%		75% - <100%		50% - <75%		25% - <50%		0% - <25%	
				Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	Se-Jawa Timur	LRA	2014	24	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			2013	24	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		Neraca	2014	22	91,67	2	8,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			2013	20	83,33	4	16,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		LAK	2014	24	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			2013	24	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		Per Tahun	2014	22	91,67	2	8,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			2013	20	83,33	4	16,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Se-Jawa Barat	LRA	2014	13	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			2013	13	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		Neraca	2014	11	84,62	2	15,38	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			2013	10	76,92	3	23,08	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		LAK	2014	11	84,62	2	15,38	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			2013	11	84,62	2	15,38	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		Per Tahun	2014	9	69,23	4	30,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			2013	8	61,54	5	38,46	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	Se-Jawa Tengah	LRA	2014	9	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			2013	9	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		Neraca	2014	7	77,78	1	11,11	1	11,11	0	0,00	0	0,00
			2013	7	77,78	1	11,11	1	11,11	0	0,00	0	0,00
		LAK	2014	9	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			2013	9	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		Per Tahun	2014	7	77,78	1	11,11	1	11,11	0	0,00	0	0,00
			2013	7	77,78	2	22,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Se-Bali	LRA	2014	7	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			2013	7	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		Neraca	2014	5	71,43	2	28,57	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			2013	7	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		LAK	2014	6	85,71	1	14,29	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			2013	7	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		Per Tahun	2014	4	57,14	3	42,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			2013	7	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	Se-D.I. Yogyakarta	LRA	2014	5	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			2013	5	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		Neraca	2014	5	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			2013	3	60,00	2	40,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		LAK	2014	5	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			2013	5	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		Per Tahun	2014	5	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			2013	3	60,00	2	40,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	Se-Banten	LRA	2014	3	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			2013	3	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		Neraca	2014	3	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			2013	2	66,67	1	33,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		LAK	2014	3	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			2013	3	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		Per Tahun	2014	3	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			2013	2	66,67	1	33,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Se-Jawa dan Bali	LRA	2014	61	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			2013	61	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		Neraca	2014	53	86,89	7	11,48	1	1,64	0	0,00	0	0,00
			2013	49	80,33	11	18,03	1	1,64	0	0,00	0	0,00
		LAK	2014	58	95,08	3	4,92	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			2013	59	96,72	2	3,28	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		Per Tahun	2014	50	81,97	10	16,39	1	1,64	0	0,00	0	0,00
			2013	47	77,05	14	22,95	0	0,00	0	0,00	0	0,00

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Rincian Capaian Tingkat Artikulasi Antarpos LKPD Berbasis Kas Menuju Akrual
Se-Provinsi Jawa Timur

No.	LKPD Pemda	Tahun	No. Instrumen Artikulasi Antarpos (%)				(%) Capaian Per Pemda
			#A.1	#A.2	#A.3	#A	
			LRA	Neraca	LAK	Per Tahun	
1	Pemkab. Bojonegoro	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Pemkab. Bondowoso	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Pemkab. Jombang	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Pemkab. Lumajang	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	Pemkab. Madiun	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	Pemkab. Magetan	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	95,00
		2013	100,00	84,62	100,00	90,00	
7	Pemkab. Malang	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	
8	Pemkab. Mojokerto	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	95,00
		2013	100,00	84,62	100,00	90,00	
9	Pemkab. Nganjuk	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	
10	Pemkab. Ngawi	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	
11	Pemkab. Pacitan	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	92,50
		2013	100,00	76,92	100,00	85,00	
12	Pemkab. Pamekasan	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	
13	Pemkab. Pasuruan	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	
14	Pemkab. Ponorogo	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	
15	Pemkab. Probolinggo	2014	100,00	84,62	100,00	90,48	90,24
		2013	100,00	84,62	100,00	90,00	
16	Pemkab. Sidoarjo	2014	100,00	84,62	100,00	90,48	95,24
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	
17	Pemkab. Situbondo	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	
18	Pemkab. Tulungagung	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	
19	Pemko. Blitar	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	
20	Pemko. Kediri	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	
21	Pemko. Madiun	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	
22	Pemko. Malang	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	
23	Pemko. Mojokerto	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	
24	Pemko. Surabaya	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Lampiran I / 3 - 7

Rincian Capaian Tingkat Artikulasi Antarpos LKPD Berbasis Kas Menuju Akrual Se-Provinsi Jawa Barat

No.	LKPD Pemda	Tahun	No. Instrumen Artikulasi Antarpos (%)				(%) Capaian Per Pemda
			#A.1	#A.2	#A.3	#A	
			LRA	Neraca	LAK	Per Tahun	
1	Pemprov. Jawa Barat	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Pemkab. Bekasi	2014	100,00	84,62	100,00	90,48	92,74
		2013	100,00	92,31	100,00	95,00	
3	Pemkab. Ciamis	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Pemkab. Cianjur	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	97,62
		2013	100,00	100,00	80,00	95,24	
5	Pemkab. Kuningan	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	Pemkab. Majalengka	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	95,00
		2013	100,00	84,62	100,00	90,00	
7	Pemkab. Sukabumi	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	
8	Pemkab. Sumedang	2014	100,00	92,31	100,00	95,24	95,12
		2013	100,00	92,31	100,00	95,00	
9	Pemkab. Tasik	2014	100,00	100,00	83,33	95,24	95,12
		2013	100,00	100,00	80,00	95,00	
10	Pemko. Banjar	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	
11	Pemko. Cimahi	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	
12	Pemko. Depok	2014	100,00	100,00	83,33	95,24	97,62
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	
13	Pemko. Sukabumi	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Lampiran I / 4 - 7

Rincian Capaian Tingkat Artikulasi Antarpos LKPD Berbasis Kas Menuju Akrual Se-Provinsi Jawa Tengah

No.	LKPD Pemda	Tahun	No. Instrumen Artikulasi Antarpos (%)				(%) Capaian Per Pemda
			#A.1	#A.2	#A.3	#A	
			LRA	Neraca	LAK	Per Tahun	
1	Pemprov. Jawa Tengah	2014	100,00	92,31	100,00	95,24	87,62
		2013	100,00	69,23	100,00	80,00	
2	Pemkab. Banjarnegara	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Pemkab. Blora	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Pemkab. Boyolali	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	92,50
		2013	100,00	76,92	100,00	85,00	
5	Pemkab. Karanganyar	2014	100,00	53,85	100,00	71,43	85,71
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	Pemkab. Kudus	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	
7	Pemkab. Purworejo	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	
8	Pemkab. Semarang	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	
9	Pemko. Surakarta	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Lampiran I / 5 - 7

Rincian Capaian Tingkat Artikulasi Antarpos LKPD Berbasis Kas Menuju Akrual Se-Provinsi Bali

No.	LKPD Pemda	Tahun	No. Instrumen Artikulasi Antarpos (%)				(%) Capaian Per Pemda
			#A.1	#A.2	#A.3	#A	
			LRA	Neraca	LAK	Per Tahun	
1	Pemprov. Bali	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Pemkab. Badung	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Pemkab. Buleleng	2014	100,00	100,00	83,33	95,45	97,73
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Pemkab. Gianyar	2014	100,00	84,62	100,00	90,48	95,24
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	Pemkab. Jembrana	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	Pemkab. Tabanan	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	
7	Pemko. Denpasar	2014	100,00	85,71	100,00	90,91	95,45
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Lampiran I / 6 - 7

Rincian Capaian Tingkat Artikulasi Antarpos LKPD Berbasis Kas Menuju Akrual Se-D.I. Yogyakarta

No.	LKPD Pemda	Tahun	No. Instrumen Artikulasi Antarpos (%)				(%) Capaian Per Pemda
			#A.1	#A.2	#A.3	#A	
			LRA	Neraca	LAK	Per Tahun	
1	Pemprov. D.I. Yogyakar	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	95,00
		2013	100,00	84,62	100,00	90,00	
2	Pemkab. Bantul	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Pemkab. Kulon Progo	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Pemkab. Sleman	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	Pemko. Yogyakarta	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	95,00
		2013	100,00	84,62	100,00	90,00	

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Rincian Capaian Tingkat Artikulasi Antarpos LKPD Berbasis Kas Menuju Akrual Se-Provinsi Banten

No.	LKPD Pemda	Tahun	No. Instrumen Artikulasi Antarpos (%)				(%) Capaian Per Pemda
			#A.1	#A.2	#A.3	#A	
			LRA	Neraca	LAK	Per Tahun	
1	Pemkab. Serang	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	95,00
		2013	100,00	84,62	100,00	90,00	
2	Pemkab. Tangerang	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Pemko. Cilegon	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Rincian Capaian Tingkat Artikulasi Antarkomponen LKPD Berbasis Kas Menuju Akrual Se-Jawa dan Bali

No.	LKPD	Komp. LK	Tahun	Capaian									
				100%		75% - <100%		50% - <75%		25% - <50%		0% - <25%	
				Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	Se-Jawa Timur	LRA - Neraca	2014	23	95,83	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,17
			2013	23	95,83	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,17
		LAK - Neraca	2014	18	75,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	25,00
			2013	19	79,17	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	20,83
		LRA - LAK	2014	1	4,17	0	0,00	0	0,00	22	91,67	1	4,17
			2013	2	8,33	0	0,00	0	0,00	21	87,50	1	4,17
		Per Tahun	2014	1	4,17	0	0,00	15	62,50	7	29,17	1	4,17
			2013	2	8,33	0	0,00	14	58,33	7	29,17	1	4,17
2	Se-Jawa Barat	LRA - Neraca	2014	12	92,31	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	7,69
			2013	11	84,62	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	15,38
		LAK - Neraca	2014	7	53,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	46,15
			2013	6	46,15	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	53,85
		LRA - LAK	2014	9	69,23	0	0,00	1	7,69	2	15,38	1	7,69
			2013	10	76,92	0	0,00	1	7,69	1	7,69	1	7,69
		Per Tahun	2014	5	38,46	4	30,77	2	15,38	2	15,38	0	0,00
			2013	3	23,08	8	61,54	1	7,69	1	7,69	0	0,00
3	Se-Jawa Tengah	LRA - Neraca	2014	9	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			2013	6	66,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	33,33
		LAK - Neraca	2014	8	88,89	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	11,11
			2013	8	88,89	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	11,11
		LRA - LAK	2014	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	100,00	0	0,00
			2013	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	88,89	1	11,11
		Per Tahun	2014	0	0,00	0	0,00	8	88,89	1	11,11	0	0,00
			2013	0	0,00	0	0,00	5	55,56	3	33,33	1	11,11
4	Se-Bali	LRA - Neraca	2014	6	85,71	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	14,29
			2013	6	85,71	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	14,29
		LAK - Neraca	2014	6	85,71	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	14,29
			2013	7	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		LRA - LAK	2014	6	85,71	0	0,00	0	0,00	1	14,29	0	0,00
			2013	6	85,71	0	0,00	0	0,00	1	14,29	0	0,00
		Per Tahun	2014	5	71,43	1	14,29	1	14,29	0	0,00	0	0,00
			2013	6	85,71	0	0,00	0	0,00	1	14,29	0	0,00
5	Se-D.I. Yogyakarta	LRA - Neraca	2014	4	80,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	20,00
			2013	4	80,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	20,00
		LAK - Neraca	2014	4	80,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	20,00
			2013	4	80,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	20,00
		LRA - LAK	2014	5	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			2013	5	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		Per Tahun	2014	3	60,00	2	40,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			2013	4	80,00	1	20,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	Se-Banten	LRA - Neraca	2014	3	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			2013	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	100,00
		LAK - Neraca	2014	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	100,00
			2013	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	100,00
		LRA - LAK	2014	3	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			2013	3	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		Per Tahun	2014	0	0,00	2	66,67	1	33,33	0	0,00	0	0,00
			2013	0	0,00	3	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Se-Jawa dan Bali	LRA - Neraca	2014	57	93,44	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	6,56
			2013	50	81,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	18,03
		LAK - Neraca	2014	43	70,49	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	29,51
			2013	44	72,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17	27,87
		LRA - LAK	2014	24	39,34	0	0,00	1	1,64	34	55,74	2	3,28
			2013	26	42,62	0	0,00	1	1,64	31	50,82	3	4,92
		Per Tahun	2014	14	22,95	9	14,75	27	44,26	10	16,39	1	1,64
			2013	15	24,59	12	19,67	20	32,79	12	19,67	2	3,28

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Rincian Capaian Tingkat Artikulasi Antarkomponen LKPD Berbasis Kas Menuju Akrual Se-Provinsi Jawa Timur

No.	LKPD Pemda	Tahun	% Capaian Artikulasi Antarkomponen				(%) Capaian Per Pemda
			#B.1	#B.2	#B.3	#B	
			LRA - Neraca	LAK - Neraca	LRA - LAK	Per Tahun	
1	Pemkab. Bojonegoro	2014	100,00	100,00	42,86	55,56	55,56
		2013	100,00	100,00	42,86	55,56	
2	Pemkab. Bondowoso	2014	100,00	100,00	42,86	55,56	50,00
		2013	100,00	100,00	28,57	44,44	
3	Pemkab. Jombang	2014	100,00	100,00	42,86	55,56	55,56
		2013	100,00	100,00	42,86	55,56	
4	Pemkab. Lumajang	2014	100,00	0,00	42,86	44,44	44,44
		2013	100,00	0,00	42,86	44,44	
5	Pemkab. Madiun	2014	100,00	100,00	42,86	55,56	44,44
		2013	100,00	100,00	14,29	33,33	
6	Pemkab. Magetan	2014	100,00	100,00	42,86	55,56	55,56
		2013	100,00	100,00	42,86	55,56	
7	Pemkab. Malang	2014	100,00	100,00	28,57	44,44	50,00
		2013	100,00	100,00	42,86	55,56	
8	Pemkab. Mojokerto	2014	100,00	100,00	42,86	55,56	55,56
		2013	100,00	100,00	42,86	55,56	
9	Pemkab. Nganjuk	2014	100,00	100,00	42,86	55,56	55,56
		2013	100,00	100,00	42,86	55,56	
10	Pemkab. Ngawi	2014	100,00	0,00	42,86	44,44	50,00
		2013	100,00	100,00	42,86	55,56	
11	Pemkab. Pacitan	2014	100,00	100,00	42,86	55,56	55,56
		2013	100,00	100,00	42,86	55,56	
12	Pemkab. Pamekasan	2014	100,00	100,00	14,29	33,33	44,44
		2013	100,00	100,00	42,86	55,56	
13	Pemkab. Pasuruan	2014	0,00	0,00	28,57	22,22	22,22
		2013	0,00	0,00	28,57	22,22	
14	Pemkab. Ponorogo	2014	100,00	0,00	28,57	33,33	33,33
		2013	100,00	0,00	28,57	33,33	
15	Pemkab. Probolinggo	2014	100,00	0,00	28,57	33,33	33,33
		2013	100,00	0,00	28,57	33,33	
16	Pemkab. Sidoarjo	2014	100,00	0,00	42,86	44,44	44,44
		2013	100,00	0,00	42,86	44,44	
17	Pemkab. Situbondo	2014	100,00	100,00	42,86	55,56	55,56
		2013	100,00	100,00	42,86	55,56	
18	Pemkab. Tulungagung	2014	100,00	100,00	42,86	55,56	50,00
		2013	100,00	100,00	28,57	44,44	
19	Pemko. Blitar	2014	100,00	100,00	42,86	55,56	55,56
		2013	100,00	100,00	42,86	55,56	
20	Pemko. Kediri	2014	100,00	100,00	42,86	55,56	55,56
		2013	100,00	100,00	42,86	55,56	
21	Pemko. Madiun	2014	100,00	100,00	42,86	55,56	55,56
		2013	100,00	100,00	42,86	55,56	
22	Pemko. Malang	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	
23	Pemko. Mojokerto	2014	100,00	100,00	42,86	55,56	77,78
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	
24	Pemko. Surabaya	2014	100,00	100,00	42,86	55,56	55,56
		2013	100,00	100,00	42,86	55,56	
	Jumlah	2014	91,67	70,83	39,88	67,46	68,45
		2013	91,67	75,00	41,67	69,44	

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Lampiran II / 3 - 7

Rincian Capaian Tingkat Artikulasi Antarkomponen LKPD Berbasis Kas Menuju Akrual Se-Provinsi Jawa Barat

No.	LKPD Pemda	Tahun	% Capaian Artikulasi Antarkomponen				(%) Capaian Per Pemda
			#B.1	#B.2	#B.3	#B	
			LRA - Neraca	LAK - Neraca	LRA - LAK	Per Tahun	
1	Pemprov. Jawa Barat	2014	100,00	0,00	100,00	88,89	83,33
		2013	0,00	0,00	100,00	77,78	
2	Pemkab. Bekasi	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Pemkab. Ciamis	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	94,44
		2013	100,00	0,00	100,00	88,89	
4	Pemkab. Cianjur	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	77,78
		2013	100,00	100,00	42,86	55,56	
5	Pemkab. Kuningan	2014	100,00	0,00	100,00	88,89	88,89
		2013	100,00	0,00	100,00	88,89	
6	Pemkab. Majalengka	2014	100,00	100,00	33,33	55,56	65,28
		2013	100,00	100,00	66,67	75,00	
7	Pemkab. Sukabumi	2014	100,00	0,00	42,86	44,44	61,11
		2013	0,00	0,00	100,00	77,78	
8	Pemkab. Sumedang	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	
9	Pemkab. Tasik	2014	100,00	100,00	0,00	33,33	29,17
		2013	100,00	100,00	0,00	25,00	
10	Pemko. Banjar	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	
11	Pemko. Cimahi	2014	100,00	0,00	100,00	88,89	88,89
		2013	100,00	0,00	100,00	88,89	
12	Pemko. Depok	2014	0,00	0,00	71,43	55,56	72,22
		2013	100,00	0,00	100,00	88,89	
13	Pemko. Sukabumi	2014	100,00	0,00	100,00	88,89	88,89
		2013	100,00	0,00	100,00	88,89	
	Jumlah	2014	92,31	53,85	80,59	75,58	73,81
		2013	84,62	46,15	85,35	72,04	

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Lampiran II / 4 - 7

Rincian Capaian Tingkat Artikulasi Antarpos LKPD Berbasis Kas Menuju Akrual
Se-Provinsi Jawa Tengah

No.	LKPD Pemda	Tahun	% Capaian Artikulasi Antarkomponen				(%) Capaian Per Pemda
			#B.1	#B.2	#B.3	#B	
			LRA - Neraca	LAK - Neraca	LRA - LAK	Per Tahun	
1	Pemprov. Jawa Tengah	2014	100,00	100,00	42,86	55,56	33,33
		2013	0,00	0,00	14,29	11,11	
2	Pemkab. Banjarnegara	2014	100,00	100,00	42,86	55,56	55,56
		2013	100,00	100,00	42,86	55,56	
3	Pemkab. Blora	2014	100,00	100,00	42,86	55,56	50,00
		2013	100,00	100,00	28,57	44,44	
4	Pemkab. Boyolali	2014	100,00	100,00	42,86	55,56	55,56
		2013	100,00	100,00	42,86	55,56	
5	Pemkab. Karanganyar	2014	100,00	100,00	42,86	55,56	55,56
		2013	100,00	100,00	42,86	55,56	
6	Pemkab. Kudus	2014	100,00	100,00	42,86	55,56	55,56
		2013	100,00	100,00	42,86	55,56	
7	Pemkab. Purworejo	2014	100,00	100,00	42,86	55,56	55,56
		2013	100,00	100,00	42,86	55,56	
8	Pemkab. Semarang	2014	100,00	100,00	42,86	55,56	44,44
		2013	0,00	100,00	28,57	33,33	
9	Pemko. Surakarta	2014	100,00	0,00	42,86	44,44	38,89
		2013	0,00	100,00	28,57	33,33	
	Jumlah	2014	100,00	88,89	42,86	54,32	49,38
		2013	66,67	88,89	34,92	44,44	

ib

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Lampiran II / 5- 7

Rincian Capaian Tingkat Artikulasi Antarkomponen LKPD Berbasis Kas Menuju Akrual Se-Provinsi Bali

No.	LKPD Pemda	Tahun	% Capaian Artikulasi Antarkomponen				(%) Capaian Per Pemda
			#B.1	#B.2	#B.3	#B	
			LRA - Neraca	LAK - Neraca	LRA - LAK	Per Tahun	
1	Pemprov. Bali	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Pemkab. Badung	2014	100,00	100,00	42,86	55,56	50,00
		2013	0,00	100,00	42,86	44,44	
3	Pemkab. Buleleng	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Pemkab. Gianyar	2014	0,00	0,00	100,00	77,78	88,89
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	Pemkab. Jembrana	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	Pemkab. Tabanan	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	
7	Pemko. Denpasar	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Jumlah	2014	85,71	85,71	91,84	90,48	91,27
		2013	85,71	100,00	91,84	92,06	

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Lampiran II / 6 - 7

Rincian Capaian Tingkat Artikulasi Antarkomponen LKPD Berbasis Kas Menuju Akrual Se-D.I. Yogyakarta

No.	LKPD Pemda	Tahun	% Capaian Artikulasi Antarkomponen				(%) Capaian Per Pemda
			#B.1	#B.2	#B.3	#B	
			LRA - Neraca	LAK - Neraca	LRA - LAK	Per Tahun	
1	Pemprov. D.I. Yogyakar	2014	100,00	0,00	100,00	88,89	83,33
		2013	0,00	0,00	100,00	77,78	
2	Pemkab. Bantul	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Pemkab. Kulon Progo	2014	0,00	100,00	100,00	88,89	94,44
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Pemkab. Sleman	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	Pemko. Yogyakarta	2014	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2013	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Jumlah	2014	80,00	80,00	100,00	95,56	95,56
		2013	80,00	80,00	100,00	95,56	

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Lampiran II / 7 - 7

Rincian Capaian Tingkat Artikulasi Antarkomponen LKPD Berbasis Kas Menuju Akrual Se-Provinsi Banten

No.	LKPD Pemda	Tahun	% Capaian Artikulasi Antarkomponen				(%) Capaian Per Pemda
			#B.1	#B.2	#B.3	#B	
			LRA - Neraca	LAK - Neraca	LRA - LAK	Per Tahun	
1	Pemkab. Serang	2014	100,00	0,00	100,00	66,67	72,22
		2013	0,00	0,00	100,00	77,78	
2	Pemkab. Tangerang	2014	100,00	0,00	100,00	88,89	83,33
		2013	0,00	0,00	100,00	77,78	
3	Pemko. Cilegon	2014	100,00	0,00	100,00	88,89	83,33
		2013	0,00	0,00	100,00	77,78	
	Jumlah	2014	100,00	0,00	100,00	81,48	79,63
		2013	0,00	0,00	100,00	77,78	

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

CONTOH KERTAS KERJA ANALIS ARTIKULASI LKPD BERBASIS KAS MENUJU AKRUAL

Lembar Muka (On the Face) LKPD yang Dianalisis

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2014

URAIAN	Ref	2014			2013
		Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
PENDAPATAN DAERAH	*5.1.1*	**1.687.453.633.925,67**	**1.727.968.712.800,33**	**102,40**	**1.547.605.213.107,47**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	*5.1.1 A.*	**644.117.977.749,00**	**698.739.758.265,29**	**108,48**	**658.974.707.435,78**
Pendapatan Pajak Daerah	*5.1.1 A.*	490.800.592.125,00	510.582.655.887,08	104,03	504.981.564.103,82
Pendapatan Retribusi Daerah	*5.1.1 A.*	48.754.559.000,00	54.764.869.960,00	112,33	47.874.288.091,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	*5.1.1 A. 3)*	22.893.460.624,00	24.953.437.777,60	109,00	20.774.562.997,87
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	*5.1.1 A.*	81.669.366.000,00	108.438.794.640,61	132,78	85.344.292.243,09
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		**644.117.977.749,00**	**698.739.758.265,29**	**108,48**	**658.974.707.435,78**
PENDAPATAN TRANSFER	*5.1.1 B.*	**1.033.870.584.176,67**	**1.024.868.882.535,04**	**99,13**	**886.587.608.545,69**
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		**710.063.321.426,00**	**693.247.533.041,00**	**97,63**	**661.103.049.179,00**
Dana Bagi Hasil Pajak	*5.1.1 B.*	68.638.702.443,00	69.316.158.278,00	100,99	71.412.107.062,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	*5.1.1 B.*	819.932.983,00	576.634.763,00	70,33	789.322.117,00
Dana Alokasi Umum	*5.1.1 B.*	615.961.906.000,00	615.961.906.000,00	100,00	580.807.702.000,00
Dana Alokasi Khusus	*5.1.1 B.*	24.642.780.000,00	7.392.834.000,00	30,00	8.093.918.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		**710.063.321.426,00**	**693.247.533.041,00**	**97,63**	**661.103.049.179,00**
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		**204.874.218.000,00**	**204.874.218.000,00**	**100,00**	**127.408.208.000,00**
Dana Penyesuaian	*5.1.1 B.*	204.874.218.000,00	204.874.218.000,00	100,00	127.408.208.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya		**204.874.218.000,00**	**204.874.218.000,00**	**100,00**	**127.408.208.000,00**
Transfer Pemerintah Provinsi		**118.933.044.750,67**	**126.747.131.494,04**	**106,57**	**98.076.351.366,69**
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	*5.1.1 B.*	118.933.044.750,67	126.747.131.494,04	106,57	98.076.351.366,69
Jumlah Pendapatan Transfer Provinsi		**118.933.044.750,67**	**126.747.131.494,04**	**106,57**	**98.076.351.366,69**
Total Pendapatan Transfer		**1.033.870.584.176,67**	**1.024.868.882.535,04**	**99,13**	**886.587.608.545,69**
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	*5.1.1 C.*	**9.465.072.000,00**	**4.360.072.000,00**	**46,06**	**2.042.897.126,00**
Pendapatan Hibah		9.110.072.000,00	4.110.072.000,00	45,12	1.487.687.126,00
Pendapatan Lainnya		355.000.000,00	250.000.000,00	70,42	555.210.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Transfer yang		**9.465.072.000,00**	**4.360.072.000,00**	**46,06**	**2.042.897.126,00**
JUMLAH PENDAPATAN		**1.687.453.633.925,67**	**1.727.968.712.800,33**	**102,40**	**1.547.605.213.107,47**
BELANJA DAERAH	*5.1.2*	**1.855.730.157.744,18**	**1.619.334.768.626,23**	**87,26**	**1.516.339.625.295,64**
BELANJA OPERASI	*5.1.2. 1.*	**1.547.490.176.298,18**	**1.385.268.397.095,23**	**89,52**	**1.253.207.170.712,45**
Belanja Pegawai	*5.1.2. 1.*	853.870.784.051,34	770.710.000.211,52	90,26	722.766.956.994,86
Belanja Barang	*5.1.2. 1.*	556.834.889.404,40	496.141.308.053,00	89,10	413.253.920.184,65
Belanja Hibah	*5.1.2. 1.*	53.680.593.200,00	46.883.417.000,00	87,34	74.401.488.722,10
Belanja Bantuan Sosial		325.000.000,00	162.500.000,00	50,00	4.008.651.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	*5.1.2. 1.*	82.778.909.642,44	71.371.171.830,71	86,22	38.776.153.810,84
Jumlah Belanja Operasi		**1.547.490.176.298,18**	**1.385.268.397.095,23**	**89,52**	**1.253.207.170.712,45**
BELANJA MODAL	*5.1.2. 2.*	**305.239.981.446,00**	**234.041.721.656,00**	**76,67**	**254.008.352.591,00**
Belanja Tanah	*5.1.2.2.*	75.000.000,00	69.435.700,00	92,58	1.253.408.400,00
Belanja Peralatan dan Mesin	*5.1.2.2.*	69.535.552.764,00	52.941.262.468,00	76,14	71.195.101.890,00
Belanja Bangunan dan Gedung	*5.1.2.2.*	111.723.913.415,00	87.775.777.022,00	78,56	93.900.992.513,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	*5.1.2.2.*	112.169.227.097,00	86.945.187.439,00	77,51	84.531.251.463,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	*5.1.2.2.*	9.776.495.470,00	4.925.397.665,00	50,38	1.791.142.825,00
Belanja Aset Lainnya	*5.1.2.2.*	1.959.792.700,00	1.384.661.362,00	70,65	1.336.455.500,00
Jumlah Belanja Modal		**305.239.981.446,00**	**234.041.721.656,00**	**76,67**	**254.008.352.591,00**
BELANJA TAK TERDUGA	*5.1.2. 3.*	**3.000.000.000,00**	**24.649.875,00**	**0,82**	**9.124.101.992,19**
Belanja Tak Terduga		3.000.000.000,00	24.649.875,00	0,82	9.124.101.992,19
Jumlah Belanja Tak Terduga		**3.000.000.000,00**	**24.649.875,00**	**0,82**	**9.124.101.992,19**
JUMLAH BELANJA		**1.855.730.157.744,18**	**1.619.334.768.626,23**	**87,26**	**1.516.339.625.295,64**
TRANSFER	*5.1.2. 4.*	**29.044.000.000,00**	**29.044.000.000,00**	**100,00**	**21.544.000.000,00**
Transfer Bagi Hasil Ke Kab/Kota/Desa		29.044.000.000,00	29.044.000.000,00	100,00	21.544.000.000,00
JUMLAH TRANSFER		**29.044.000.000,00**	**29.044.000.000,00**	**100,00**	**21.544.000.000,00**
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		**1.884.774.157.744,18**	**1.648.378.768.626,23**	**87,46**	**1.537.883.625.295,64**
SURPLUS/(DEFISIT)		**(197.320.523.818,51)**	**79.589.944.174,10**	**(40,34)**	**9.721.587.811,83**
PEMBIAYAAN	*5.1.3*	**197.320.523.818,51**	**202.344.527.381,51**	**102,55**	**212.643.283.406,68**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	*5.1.3 A.*	**222.364.871.218,51**	**222.364.871.218,51**	**100,00**	**257.805.712.971,61**
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)		222.344.061.218,51	222.364.871.218,51	100,01	257.796.738.849,61
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir		0,00	0,00		8.974.122,00
Penerimaan Piutang Daerah		20.810.000,00	0,00	0,00	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		**222.364.871.218,51**	**222.364.871.218,51**	**100,00**	**257.805.712.971,61**

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

URAIAN	Ref	2014			2013
		Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3 B.	25.044.347.400,00	20.020.343.837,00	79,94	45.162.429.564,93
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		25.000.000.000,00	19.999.306.437,00	80,00	45.054.173.324,93
Pembayaran Pokok Hutang		44.347.400,00	21.037.400,00	47,44	108.256.240,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		25.044.347.400,00	20.020.343.837,00	79,94	45.162.429.564,93
PEMBIAYAAN NETTO		197.320.623.818,51	202.344.527.381,51	102,55	212.643.283.406,68
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA)		0,00	281.934.471.555,61		222.364.871.218,51

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

WALIKOTA DENPASAR

I.B. RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.edu.id/

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

NERACA

PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

URAIAN	Ref	2014	2013
I. ASET	5.2.1	**3.650.050.680.647,19**	**3.309.788.098.526,10**
1. Aset Lancar	5.2.1.1	**535.004.344.397,79**	**448.014.922.992,94**
1) Kas di Kas Daerah	5.2.1.1. 1)	271.287.418.494,61	212.259.771.773,51
2) Kas di Bendahara Pengeluaran	5.2.1.1. 2)	54.289.919,00	160.329.678,72
3) Kas di RSUD Wangaya	5.2.1.1. 3)	10.646.745.942,00	10.093.341.364,50
4) Kas di Bendahara Penerimaan	5.2.1.1. 4)	769.039.690,66	0,00
5) Bagian Lancar TGR	5.2.1.1. 5)	1.302.696.991,00	1.302.696.991,00
6) Penyisihan Bagian Lancar TGR		(1.302.696.991,00)	0,00
7) Piutang Pajak	5.2.1.1. 6)	266.543.014.203,97	245.805.989.735,16
8) Penyisihan Piutang Pajak		(64.503.665.315,53)	(57.487.781.661,61)
9) Piutang Retribusi	5.2.1.1. 7)	1.242.420.127,00	5.669.213.059,37
10) Penyisihan Piutang Retribusi		(277.526.467,35)	0,00
11) Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	5.2.1.1. 8)	23.476.068.061,33	12.589.140.390,67
12) Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi		(2.347.606.806,13)	0,00
13) Piutang Lain-lain	5.2.1.1. 9)	8.504.948.295,89	325.291.559,38
14) Penyisihan Piutang Lain-lain		(940.620.812,16)	0,00
15) Biaya Sewa Dibayar Dimuka	5.2.1.1. 10)	1.062.842.595,52	1.710.393.292,16
16) Biaya Asuransi Dibayar Dimuka	5.2.1.1. 11)	236.189.759,00	193.940.408,97
17) Persediaan	5.2.1.1. 12)	19.250.786.709,98	15.392.596.401,11
Jumlah Aset Lancar		**535.004.344.397,79**	**448.014.922.992,94**
2. Investasi Jangka Panjang	5.2.1.2	**158.561.299.462,76**	**123.157.447.310,57**
1) Investasi Non Permanen Dana Bergulir	5.2.1.2.1)	6.894.984.000,00	7.437.232.827,00
Jumlah Investasi Non Permanen		**6.894.984.000,00**	**7.437.232.827,00**
2) Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.2.1.2.2)	151.666.315.462,76	115.720.214.483,57
Jumlah Investasi Permanen		**151.666.315.462,76**	**115.720.214.483,57**
Jumlah Investasi Jangka Panjang		**158.561.299.462,76**	**123.157.447.310,57**
3. Aset Tetap	5.2.1.3	**2.916.810.294.269,15**	**2.669.943.220.792,22**
1) Tanah	5.2.1.3.1)	1.000.317.824.966,00	981.912.589.266,00
2) Peralatan dan Mesin	5.2.1.3.2)	346.865.374.971,98	298.119.566.085,57
3) Gedung dan Bangunan	5.2.1.3.3)	700.071.893.736,44	615.785.444.908,94
4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.2.1.3.4)	815.632.267.334,83	732.606.238.283,81
5) Aset Tetap Lainnya	5.2.1.3.5)	45.822.935.877,90	34.199.387.965,90
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.2.1.3.6)	8.099.997.382,00	7.319.994.282,00
Jumlah Aset Tetap		**2.916.810.294.269,15**	**2.669.943.220.792,22**
4. Aset Lainnya	5.2.1.4	**39.674.742.517,49**	**68.672.507.430,37**
1) Kemitraan dengan Pihak ketiga	5.2.1.4.1)	18.983.175.120,00	19.208.175.120,00
2) Aset Lain-lain	5.2.1.4.2)	16.236.437.035,49	46.283.663.310,37
3) Aset Tak Berwujud	5.2.1.4.3)	4.455.130.362,00	3.180.669.000,00
Jumlah Aset Lainnya		**39.674.742.517,49**	**68.672.507.430,37**
JUMLAH ASET		**3.650.050.680.647,19**	**3.309.788.098.526,10**
II. KEWAJIBAN	5.2.2	**8.899.412.973,47**	**16.054.559.369,60**
1. Kewajiban Jangka Pendek	5.2.2.1	**8.899.412.973,47**	**16.054.559.369,60**
1) Hutang Perhitungan Fihak Ketiga	5.2.2.1.1)	0,00	148.571.598,22
2) Hutang Jangka Pendek Lainnya	5.2.2.1.2)	8.899.412.973,47	15.905.987.771,38
3) Hutang Kepada Pemerintah Pusat	5.2.2.1.3)	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**8.899.412.973,47**	**16.054.559.369,60**

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.edu.id/

URAIAN	Ref	2014	2013
2. Kewajiban Jangka Panjang	5.2.2.1	0,00	0,00
1) Hutang Kontigensi	5.2.2.2.1)	0,00	0,00
2) Hutang Jangka Panjang Lainnya	5.2.2.2.2)	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		8.899.412.973,47	16.054.559.369,60
III. EKUITAS DANA	5.2.3	3.641.151.267.673,72	3.293.733.539.156,50
1. Ekuitas Dana Lancar	5.2.3.1	526.104.931.424,32	431.960.363.623,34
1) SILPA	5.2.3.1.1)	281.934.471.555,61	222.364.871.218,51
2) Pendapatan yang Ditangguhkan	5.2.3.1.2)	769.039.690,66	0,00
3) Cadangan Piutang	5.2.3.1.3)	232.996.063.641,54	210.108.883.775,10
4) Cadangan Persediaan	5.2.3.1.4)	19.250.786.709,98	15.392.596.401,11
5) Dana Yang hrs disediakan utk Pembayaran Hutang Jangka Pendek	5.2.3.1.5)	(8.845.430.173,47)	(15.905.987.771,38)
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		526.104.931.424,32	431.960.363.623,34
2. Ekuitas Dana Investasi	5.2.3.2	3.115.046.336.249,40	2.861.773.175.533,16
1) Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Pan	5.2.3.2.1)	158.561.299.462,76	123.157.447.310,57
2) Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	5.2.3.2.2)	2.916.810.294.269,15	2.669.943.220.792,22
3) Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	5.2.3.2.3)	39.674.742.517,49	68.672.507.430,37
4) Dana Yang hrs disediakan utk Pembayaran Hutang Jangka Panjang	5.2.3.2.4)	0,00	0,00
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		3.115.046.336.249,40	2.861.773.175.533,16
JUMLAH EKUITAS DANA		3.641.151.267.673,72	3.293.733.539.156,50
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		3.650.050.680.647,19	3.309.788.098.526,10

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

WALIKOTA DENPASAR

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.edu.id/

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2014 dan 2013

URAIAN	Ref	2014	2013
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.3.1	**312.945.225.830,10**	**263.176.119.402,83**
Arus Kas Masuk	5.3.1.1)	**1.727.282.272.800,33**	**1.547.051.392.107,47**
Pendapatan Pajak Daerah	5.3.1.1).a	510.582.655.887,08	504.981.564.103,82
Hasil Retribusi Daerah	5.3.1.1).b	54.764.869.960,00	47.874.288.091,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.1.1).c	24.953.437.777,60	20.774.562.997,87
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.3.1.1).d	107.752.354.640,61	84.790.471.243,09
Bagi Hasil Bukan Pajak	5.3.1.1).e	576.634.763,00	789.322.117,00
Bagi Hasil Pajak	5.3.1.1).f	69.316.158.278,00	71.412.107.062,00
Dana Alokasi Umum	5.3.1.1).g	615.961.906.000,00	580.807.702.000,00
Dana Alokasi Khusus	5.3.1.1).h	7.392.834.000,00	8.093.918.000,00
Pendapatan Hibah	5.3.1.1).i	4.110.072.000,00	1.487.687.126,00
Dana Darurat	5.3.1.1).j	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah	5.3.1.1).k	126.747.131.494,04	98.076.351.366,69
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	5.3.1.1).l	204.874.218.000,00	127.408.208.000,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	5.3.1.1).m	250.000.000,00	555.210.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		**1.727.282.272.800,33**	**1.547.051.392.107,47**
Arus Kas Keluar	5.3.1.2)	**1.414.337.046.970,23**	**1.283.875.272.704,64**
Belanja Pegawai	5.3.1.2).a	770.710.000.211,52	722.766.956.994,86
Belanja Bunga	5.3.1.2).b	0,00	0,00
Belanja Subsidi	5.3.1.2).c	0,00	0,00
Belanja Hibah	5.3.1.2).d	46.883.417.000,00	74.401.488.722,10
Belanja Bantuan Sosial	5.3.1.2).e	162.500.000,00	4.008.651.000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	5.3.1.2).f	29.044.000.000,00	21.544.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	5.3.1.2).g	71.371.171.830,71	38.776.153.810,84
Belanja Tidak Terduga	5.3.1.2).h	24.649.875,00	9.124.101.992,19
Belanja Barang dan Jasa	5.3.1.2).i	496.141.308.053,00	413.253.920.184,65
Jumlah Arus Kas Keluar		- **1.414.337.046.970,23**	**1.283.875.272.704,64**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		**312.945.225.830,10**	**263.176.119.402,83**
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	5.3.2	**(233.355.281.656,00)**	**(253.454.531.591,00)**
Arus Kas Masuk	5.3.2.1)	**686.440.000,00**	**553.821.000,00**
Pelepasan Hak Atas Tanah		0,00	0,00
Penjualan Peralatan / Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	5.3.2.1).a	686.440.000,00	551.640.000,00
Penjualan Mesin / Alat-alat Berat Tidak Terpakai		0,00	0,00
Penjualan Rumah Jabatan / Rumah Dinas		0,00	0,00
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua		0,00	0,00
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat		0,00	0,00
Penjualan Drum Bekas	5.3.2.1).b	0,00	2.181.000,00
Penjualan Hasil Penebangan Pohon		0,00	0,00
Penjualan Lampu Hias Bekas		0,00	0,00
Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan		0,00	0,00
Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas		0,00	0,00
Penjualan Obat-obatan dan hasil farmasi		0,00	0,00
Penjualan hasil Pertanian		0,00	0,00
Penjualan hasil Kehutanan		0,00	0,00
Penjualan hasil Perkebunan		0,00	0,00
Penjualan hasil Peternakan		0,00	0,00
Penjualan hasil Perikanan		0,00	0,00
Penjualan hasil Sitaan		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		- **686.440.000,00**	**553.821.000,00**

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Arus Kas Keluar	5.3.2.2)	234.041.721.656,00	254.008.352.591,00
Belanja Tanah	5.3.2.2).a	69.435.700,00	1.253.408.400,00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.3.2.2).b	52.941.262.468,00	71.195.101.890,00
Belanja Bangunan dan Gedung	5.3.2.2).c	87.775.777.022,00	93.900.992.513,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.2.2).d	86.945.187.439,00	84.531.251.463,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.3.2.2).e	4.925.397.665,00	1.791.142.825,00
Belanja Aset Lainnya	5.3.2.2).f	1.384.661.362,00	1.336.455.500,00
Jumlah Arus Kas Keluar		234.041.721.656,00	254.008.352.591,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan		(233.355.281.656,00)	(253.454.531.591,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	5.3.3	(20.020.343.837,00)	(45.153.455.442,93)
Arus Kas Masuk	5.3.3.1)	0,00	8.974.122,00
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman		0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah		0,00	0,00
Penarikan kembali Penyertaan Modal Pemda (Divestasi)		0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan-Dana bergulir	5.3.3.1).1	0,00	8.974.122,00
Jumlah Arus Kas Masuk		0,00	8.974.122,00
Arus Kas Keluar	5.3.3.2)	20.020.343.837,00	45.162.429.564,93
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.3.3.2) 1	19.999.306.437,00	45.054.173.324,93
Pembayaran Pokok Utang		21.037.400,00	108.256.240,00
Pembayaran Utang		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		20.020.343.837,00	45.162.429.564,93
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		(20.020.343.837,00)	(45.153.455.442,93)
Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	5.3.4	11.450.961,50	6.515.331,28
Arus Kas Masuk	5.3.4.1)	50.540.602.229,50	45.283.505.809,78
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.3.4.1)	50.528.844.149,00	45.265.232.398,00
Penerimaan Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu		11.758.080,50	18.273.411,78
Jumlah Arus Kas Masuk		50.540.602.229,50	45.283.505.809,78
Arus Kas Keluar	5.3.4.2)	50.529.151.268,00	45.276.990.478,50
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.3.4.2)	50.528.844.149,00	45.265.232.398,00
Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran tahun berkenaan		307.119,00	11.758.080,50
Jumlah Arus Kas Keluar		50.529.151.268,00	45.276.990.478,50
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran		11.450.961,50	6.515.331,28
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode		59.581.051.298,60	(35.425.352.299,82)
Saldo Awal Kas BUD dan BLUD	5.3.5	222.353.113.138,01	257.778.465.437,83
Saldo Akhir Kas BUD dan BLUD	5.3.6	281.934.164.436,61	222.353.113.138,01
Kas di BUD		271.287.418.494,61	212.259.771.773,51
Kas di BLUD		10.646.745.942,00	10.093.341.364,50
Kas di Bendahara Pengeluaran		54.289.919,00	160.329.678,72
Kas di Bendahara Penerimaan		769.039.690,66	0,00
Saldo Akhir Kas		282.757.494.046,27	222.513.442.816,73

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

WALIKOTA DENPASAR

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

CONTOH KERTAS KERJA ANALISIS ARTIKULASI LKPD BERBASIS KAS MENUJU AKRUAL
Hasil Memindahkan Angka Lembar Muka LKPD ke dalam Format *Excel*

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
NERACA
Per 31 Desember 2014 dan 2013

(dalam rupiah)

URAIAN	2014	2013
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	271.287.418.494,61	212.259.771.773,51
Kas di Bendahara Pengeluaran	54.289.919,00	160.329.678,72
Kas di RSUD Wangaya	10.646.745.942,00	10.093.341.364,50
Kas di Bendahara Penerimaan	769.039.690,66	0,00
Bagian Lancar TGR	1.302.696.991,00	1.302.696.991,00
Penyisihan Bagian Lancar TGR	(1.302.696.991,00)	0,00
Piutang Pajak	266.543.014.203,97	245.805.989.735,16
Penyisihan Piutang Pajak	(64.503.665.315,53)	(57.487.781.661,61)
Piutang Retribusi	1.242.420.127,00	5.669.213.059,37
Penyisihan Piutang Retribusi	(277.526.467,35)	0,00
Piutang Bagi Hasil Provinsi	23.476.068.061,33	12.589.140.390,67
Penyisihan Piutang Bagi Hasil Provinsi	(2.347.606.806,13)	0,00
Piutang Lain-lain	8.504.948.295,89	325.291.559,38
Penyisihan Piutang Lain-lain	(940.620.812,16)	0,00
Biaya Sewa Dibayar Dimuka	1.062.842.595,52	1.710.393.292,16
Biaya Asuransi Dibayar Dimuka	236.189.759,00	193.940.408,97
Persediaan	19.250.786.709,98	15.392.596.401,11
Jumlah Aset Lancar (2 s.d. 12)	**535.004.344.397,79**	**448.014.922.992,94**
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen		
Dana Bergulir	6.894.984.000,00	7.437.232.827,00
Jumlah investasi Non Permanen (15)	**6.894.984.000,00**	**7.437.232.827,00**
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah	151.666.315.462,76	115.720.214.483,57
Jumlah Investasi Permanen (18 s.d. 19)	**151.666.315.462,76**	**115.720.214.483,57**
Jumlah Investasi Jangka Panjang (16+20)	**158.561.299.462,76**	**123.157.447.310,57**
ASET TETAP		
T a n a h	1.000.317.824.966,00	981.912.589.266,00
Peralatan dan mesin	346.865.374.971,98	298.119.566.085,57
Gedung dan Bangunan	700.071.893.736,44	615.785.444.908,94
Jalan, Irigasi dan Jaringan	815.632.267.334,83	732.606.238.283,81
Aset Tetap Lainnya	45.822.935.877,90	34.199.387.965,90
Konstruksi Dalam Pengerjaan	8.099.997.382,00	7.319.994.282,00
Jumlah Aset Tetap (22 s.d. 27)	**2.916.810.294.269,15**	**2.669.943.220.792,22**
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
Jumlah Dana Cadangan (29)	**0,00**	**0,00**
ASET LAINNYA		
Kemitraan dengan Piha Ketiga	18.983.175.120,00	19.208.175.120,00
Aset Lain-lain	16.236.437.035,49	46.283.663.310,37
Aset Tak Berwujud	4.455.130.362,00	3.180.669.000,00
Jumlah Aset Lainnya (31 s.d. 35)	**39.674.742.517,49**	**68.672.507.430,37**
TOTAL ASET (13+21+28+30+36)	**3.650.050.680.647,19**	**3.309.788.098.526,10**
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	148.571.598,22
Utang Jangka Pendek Lainnya	8.899.412.973,47	15.905.987.771,38
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (39 s.d. 41)	**8.899.412.973,47**	**16.054.559.369,60**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (43 s.d. 44)	**0,00**	**0,00**
TOTAL KEWAJIBAN (42+45)	**8.899.412.973,47**	**16.054.559.369,60**

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

URAIAN	2014	2013
EKUITAS		
EKUITAS DANA LANCAR		
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	281.934.471.555,61	222.364.871.218,51
Cadangan Piutang	232.996.063.641,54	210.108.883.775,10
Cadangan Persediaan	19.250.786.709,98	15.392.596.401,11
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek	(8.845.430.173,47)	(15.905.987.771,38)
Pendapatan yang ditangguhkan	769.039.690,66	0,00
Jumlah Ekuitas Dana Lancar (47 s.d. 53)	**526.104.931.424,32**	**431.960.363.623,34**
EKUITAS DANA INVESTASI		
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	158.561.299.462,76	123.157.447.310,57
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	2.916.810.294.269,15	2.669.943.220.792,22
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	39.674.742.517,49	68.672.507.430,37
Dana Pembayaran Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Jumlah Ekuitas Dana Investasi (55 s.d. 58)	**3.115.046.336.249,40**	**2.861.773.175.533,16**
EKUITAS DANA CADANGAN		
Ekuitas Dana Cadangan	0,00	0,00
Jumlah Ekuitas Dana Cadangan (60)	**0,00**	**0,00**
TOTAL EKUITAS (54+59+61)	**3.641.151.267.673,72**	**3.293.733.539.156,50**
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS (46+62)	**3.650.050.690.647,19**	**3.309.788.098.526,10**

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

CONTOH KERTAS KERJA ANALISIS ARTIKULASI LKPD BERBASIS KAS MENUJU AKRUAL
Hasil Memindahkan Angka Lembar Muka LKPD ke dalam Format *Excel*

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

(dalam rupiah)

URAIAN	REALISASI 2014	REALISASI 2013
PENDAPATAN		
PENDAPATAN ASLI DAERAH		
Pendapatan Pajak Daerah	510.582.655.887,08	504.981.564.103,82
Pendapatan Retribusi Daerah	54.764.869.960,00	47.874.288.091,00
Pendapatan Hsl Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	24.953.437.777,60	20.774.562.997,87
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	108.438.794.640,61	85.344.292.243,09
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)	**698.739.758.265,29**	**658.974.707.435,78**
PENDAPATAN TRANSFER		
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		
Dana Bagi Hasil Pajak	69.316.158.278,00	71.412.107.062,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	576.634.763,00	789.322.117,00
Dana Alokasi Umum	615.961.906.000,00	580.807.702.000,00
Dana Alokasi Khusus	7.392.834.000,00	8.093.918.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s.d. 13)	**693.247.533.041,00**	**661.103.049.179,00**
Transfer Pemerintah Pusat- Lainya		
Dana Penyesuaian	204.874.218.000,00	127.408.208.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Lainya (16 s.d. 17)	**204.874.218.000,00**	**127.408.208.000,00**
Transfer Pemerintah Provinsi		
Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	126.747.131.494,04	98.076.351.366,69
Jumlah Pendapatan Pemerintah Provinsi (20 s.d. 21)	**126.747.131.494,04**	**98.076.351.366,69**
Total Pendapatan Transfer (14+18+22)	**1.024.868.882.535,04**	**886.587.608.545,69**
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		
Pendapatan Hibah	4.110.072.000,00	1.487.687.126,00
Pendapatan Lainnya	250.000.000,00	555.210.000,00
Total Lain-lain Pendapatan yang Sah (25 s.d. 27)	**4.360.072.000,00**	**2.042.897.126,00**
JUMLAH PENDAPATAN (7+19+24)	**1.727.968.712.800,33**	**1.547.605.213.107,47**
BELANJA OPERASI		
Belanja Pegawai	770.710.000.211,52	722.766.956.994,86
Belanja Barang	496.141.308.053,00	413.253.920.184,65
Belanja Hibah	46.883.417.000,00	74.401.488.722,10
Belanja Bantuan Sosial	162.500.000,00	4.008.651.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	71.371.171.830,71	38.776.153.810,84
Jumlah Belanja operasi (28 s/d 34)	**1.385.268.897.095,23**	**1.253.207.170.712,45**
BELANJA MODAL		
Belanja Tanah	69.435.700,00	1.253.408.400,00
Belanja Peralatan dan Mesin	52.941.262.468,00	71.195.101.890,00
Belanja Gedung dan Bangunan	87.775.777.022,00	93.900.992.513,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	86.945.187.439,00	84.531.251.463,00
Belanja Aset Tetap Lainya	4.925.397.665,00	1.791.142.825,00
Belanja Aset Lainya	1.384.661.362,00	1.336.455.500,00
Jumlah Belanja Modal (37 s/d 42)	**234.041.721.656,00**	**254.008.352.591,00**
BELANJA TIDAK TERDUGA		
Belanja Tidak Terduga	24.649.875,00	9.124.101.992,19
Jumlah Belanja Tidak terduga (45)	**24.649.875,00**	**9.124.101.992,19**
JUMLAH BELANJA (35+43+46)	**1.619.334.768.626,23**	**1.516.339.625.295,64**
TRANSFER		
Bagi Hasil ke Kab/Kota/Desa	29.044.000.000,00	21.544.000.000,00
Jml Transfer Bg Hsl Pajak (48 s/d 50)	**29.044.000.000,00**	**21.544.000.000,00**
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (47+52)	**1.648.378.768.626,23**	**1.537.883.625.295,64**
SURPLUS / DEFISIT (25-53)	**79.589.944.174,10**	**9.721.587.811,83**
PEMBIAYAAN		
Penerimaan Daerah		
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	222.364.871.218,51	257.796.738.849,61
Penerimaan Kembali Pemberian Dana Bergulir	0,00	8.974.122,00
Jumlah Penerimaan (57 s/d 63)	**222.364.871.218,51**	**257.805.712.971,61**
Pengeluaran Daerah		
Penyertaan Modal	19.999.306.437,00	45.054.173.324,93
Pembayaran Hutang Pokok	21.037.400,00	108.256.240,00
Jumlah Pengeluaran (66 s/d 71)	**20.020.343.837,00**	**45.162.429.564,93**
Pembiayaan Netto (64-72)	**202.344.527.381,51**	**212.643.283.406,68**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (54+73)	**281.934.471.555,61**	**222.364.871.218,51**

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

CONTOH KERTAS KERJA ANALISIS ARTIKULASI LKPD BERBASIS KAS MENUJU AKRUAL
Hasil Memindahkan Angka Lembar Muka LKPD ke dalam Format *Excel*

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

(dalam rupiah)

URAIAN	Tahun 2014	Tahun 2013
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Kas Masuk:		
Pendapatan Pajak Daerah	510.582.655.887,08	504.981.564.103,82
Pendapatan Retribusi Daerah	54.764.869.960,00	47.874.288.091,00
Pendapatan Hsl Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	24.953.437.777,60	20.774.562.997,87
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	107.752.354.640,61	84.790.471.243,09
Dana Bagi Hasil Pajak	69.316.158.278,00	71.412.107.062,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	576.634.763,00	789.322.117,00
Dana Alokasi Umum	615.961.906.000,00	580.807.702.000,00
Dana Alokasi Khusus	7.392.834.000,00	8.093.918.000,00
Dana Penyesuaian	204.874.218.000,00	127.408.208.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	126.747.131.494,04	98.076.351.366,69
Pendapatan Hibah	4.110.072.000,00	1.487.687.126,00
Pendapatan Lainnya	250.000.000,00	555.210.000,00
Jumlah (3 s/d 15)	**1.727.282.272.800,33**	**1.547.061.392.107,47**
Arus Kas Keluar:		
Belanja Pegawai	770.710.000.211,52	722.766.956.994,86
Belanja Barang	496.141.308.053,00	413.253.920.184,65
Belanja Hibah	46.883.417.000,00	74.401.488.722,10
Belanja Bantuan Sosial	162.500.000,00	4.008.651.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	71.371.171.830,71	38.776.153.810,84
Bagi Hasil ke Kab/Kota/Desa	29.044.000.000,00	21.544.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	24.649.875,00	9.124.101.992,19
Jumlah (18 s/d 26)	**1.414.337.046.970,23**	**1.283.875.272.704,64**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16-27)	**312.945.225.830,10**	**263.176.119.402,83**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN		
Arus Kas Masuk:		
Penjualan Peralatan dan Mesin	686.440.000,00	551.640.000,00
Penjualan Drum Bekas	0,00	2.181.000,00
Jumlah (31 s/d 36)	**686.440.000,00**	**553.821.000,00**
Arus Kas Keluar:		
Belanja Tanah	69.435.700,00	1.253.408.400,00
Belanja Peralatan dan Mesin	52.941.262.468,00	71.195.101.890,00
Belanja Gedung dan Bangunan	87.775.777.022,00	93.900.992.513,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	86.945.187.439,00	84.531.251.463,00
Belanja Aset Tetap Lainya	4.925.397.665,00	1.791.142.825,00
Belanja Aset Lainya	1.384.661.362,00	1.336.455.500,00
Jumlah (39 s/d 44)	**234.041.721.656,00**	**254.008.352.591,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (37-45)	**(233.355.281.656,00)**	**(253.454.531.591,00)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN		
Arus Kas Masuk:		
Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir	0,00	8.974.122,00
Jumlah (49 s/d 54)	**0,00**	**8.974.122,00**
Arus Kas Keluar:		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	19.999.306.437,00	45.054.173.324,93
Pembayaran Pokok Utang	21.037.400,00	108.256.240,00
Jumlah (57 s/d 62)	**20.020.343.837,00**	**45.162.429.564,93**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (55-63)	**(20.020.343.837,00)**	**(45.153.455.442,93)**

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

URAIAN	Tahun 2014	Tahun 2013
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN		
Arus Kas Masuk:		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	50.528.844.149,00	45.265.232.398,00
Penerimaan Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu	11.758.080,00	18.273.411,78
Jumlah (67)	**50.540.602.229,00**	**45.283.505.809,78**
Arus Kas Keluar:		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga	50.528.844.149,00	45.265.232.398,00
Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Berkenan	307.119,00	11.758.080,50
Jumlah (71)	**50.529.151.268,00**	**45.276.990.478,50**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (69-72)	**11.450.961,00**	**6.515.331,28**
Kenaikan (Penurunan) Kas	**59.581.051.298,10**	**(35.425.352.299,82)**
Saldo Awal Kas BUD dan BLUD	**222.353.113.138,01**	**257.778.465.437,83**
Saldo Akhir Kas BUD dan BLUD	**281.934.164.436,11**	**222.353.113.138,01**
Kas di BUD	**271.287.418.494,61**	**212.259.771.773,51**
Kas di BLUD	**10.646.745.942,00**	**10.093.341.364,50**
Kas di Bendahara Pengeluaran	**54.289.919,00**	**160.329.678,72**
Kas di Bendahara Penerimaan	**769.039.690,66**	**0,00**
Saldo Akhir Kas	**282.757.494.046,27**	**222.513.442.816,73**

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

CONTOH KERTAS KERJA ANALISIS ARTIKULASI LKPD BERBASIS KAS MENUJU AKRUAL
Hasil Memasukkan Angka-angka dari LKPD Format *Excel* ke dalam Kriteria Artikulasi

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
ANALISIS ARTIKULASI ANTARPOS-POS DALAM SUATU KOMPONEN LKPD (A)
Per 31 Desember 2014 dan 2013

	Uraian	2014	2013
#A.1 ARTIKULASI ANTARPOS DALAM LRA			
#A.1.1	Jumlah Pendapatan - Jumlah Belanja - Jumlah Transfer = Surplus/Defisit		
	Pendapatan	1.727.968.712.800,33	1.547.605.213.107,47
	-/- Belanja	1.619.334.768.626,23	1.516.339.625.295,64
	-/- Transfer	29.044.000.000,00	21.544.000.000,00
	Jumlah	79.589.944.174,10	9.721.587.811,83
	Surplus/Defisit	79.589.944.174,10	9.721.587.811,83
	Selisih?	0,00	0,00
	Artikulasi?	**Ya**	**Ya**
#A.1.2	SILPA = Surplus/Defisit + Penerimaan Pembiayaan - Pengeluaran Pembiayaan		
	SILPA	281.934.471.555,61	222.364.871.218,51
	Surplus/Defisit	79.589.944.174,10	9.721.587.811,83
	+/+ Penerimaan Pembiayaan	222.364.871.218,51	257.805.712.971,61
	-/- Pengeluaran Pembiayaan	20.020.343.837,00	45.162.429.564,93
	Jumlah	281.934.471.555,61	222.364.871.218,51
	Selisih?	0,00	0,00
	Artikulasi?	**Ya**	**Ya**
#A.2 ARTIKULASI ANTARPOS DALAM NERACA			
#A.2.1	Jumlah Aset = Jumlah Kewajiban + Jumlah Ekuitas Dana		
	Jumlah Aset	3.650.050.680.647,19	3.309.788.098.526,10
	Jumlah Kewajiban	8.899.412.973,47	16.054.559.369,60
	+/+ Jumlah Ekuitas	3.641.151.267.673,72	3.293.733.539.156,50
	Jumlah	3.650.050.680.647,19	3.309.788.098.526,10
	Selisih?	0,00	0,00
	Artikulasi?	**Ya**	**Ya**
#A.2.2	Jumlah Ekuitas Dana Lancar = Jumlah Aset Lancar - Jumlah Kewajiban Jangka		
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar	526.104.931.424,32	431.960.363.623,34
	Jumlah Aset Lancar	535.004.344.397,79	448.014.922.992,94
	-/- Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	8.899.412.973,47	16.054.559.369,60
	Jumlah	526.104.931.424,32	431.960.363.623,34
	Selisih?	0,00	0,00
	Artikulasi?	**Ya**	**Ya**
#A.2.3	Jumlah Ekuitas Dana Investasi = Jml. Investasi Jangka Panjang + Jml. Aset Tetap + Jml. Aset Lainnya - Jml. Kewajiban Jangka Panjang		
	Jumlah Ekuitas Dana Investasi	3.115.046.336.249,40	2.861.773.175.533,16
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	158.561.299.462,76	123.157.447.310,57
	+/+ Jumlah Investasi Aset Tetap	2.916.810.294.269,15	2.669.943.220.792,22
	+/+ Jumlah Investasi Lainnya	39.674.742.517,49	68.672.507.430,37
	-/- Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
	Jumlah	3.115.046.336.249,40	2.861.773.175.533,16
	Selisih?	0,00	0,00
	Artikulasi?	**Ya**	**Ya**
#A.2.4	Jumlah Ekuitas Dana Cadangan = Jumlah Dana Cadangan		
	Jumlah Ekuitas Dana Cadangan	0,00	0,00
	Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00
	Selisih?	0,00	0,00
	Artikulasi?	**Ya**	**Ya**
#A.2.5	Jumlah Kas = SILPA + Saldo Utang PFK + Pendapatan yang Ditangguhkan		
	Jumlah Kas	282.757.494.046,27	222.513.442.816,73
	SILPA	281.934.471.555,61	222.364.871.218,51
	+/+ Saldo Utang PFK	0,00	148.571.598,22
	+/+ Pendapatan yang Ditangguhkan	769.039.690,66	0,00
	Jumlah	282.703.511.246,27	222.513.442.816,73
	Selisih?	53.982.800,00	0,00
	Artikulasi?	**Tidak**	**Ya**
#A.2.6	Investasi Jangka Pendek = Cadangan untuk Investasi Jangka Pendek	#N/A	#N/A
	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
	Cadangan untuk Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
	Selisih?	0,00	0,00
	Artikulasi?	**Ya**	**Ya**

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
ANALISIS ARTIKULASI ANTARPOS-POS DALAM SUATU KOMPONEN LKPD (A)
Per 31 Desember 2014 dan 2013

	Uraian	2014	2013
#A.2.7	Piutang = Cadangan Piutang		
	Piutang	232.996.063.641,54	210.108.883.775,10
	Cadangan Piutang	232.996.063.641,54	210.108.883.775,10
	Selisih?	0,00	0,00
	Artikulasi?	**Ya**	**Ya**
#A.2.8	Persediaan = Cadangan Persediaan		
	Persediaan	19.250.786.709,98	15.392.596.401,11
	Cadangan Persediaan	19.250.786.709,98	15.392.596.401,11
	Selisih?	0,00	0,00
	Artikulasi?	**Ya**	**Ya**
#A.2.9	Kewajiban Jangka Pendek - Utang Utang PFK= Dana Disediakan untuk Pembayaran Kewajiban Jangka Pendek		
	Kewajiban Jangka Pendek	8.899.412.973,47	16.054.559.369,60
	-/- Utang PFK	0,00	148.571.598,22
	Jumlah	8.899.412.973,47	15.905.987.771,38
	Dana Disediakan untuk Pembayaran Kewajiban Jangka Pendek	(8.845.430.173,47)	(15.905.987.771,38)
	Selisih?	53.982.800,00	0,00
	Artikulasi?	**Tidak**	**Ya**
#A.2.10	Jumlah Investasi Jangka Panjang = Ekuitas Dana Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang		
	Investasi Jangka Panjang	158.561.299.462,76	123.157.447.310,57
	Ekuitas Dana Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	158.561.299.462,76	123.157.447.310,57
	Selisih?	0,00	0,00
	Artikulasi?	**Ya**	**Ya**
#A.2.11	Jumlah Aset Tetap = Ekuitas Dana Diinvestasikan dalam Aset Tetap		
	Aset Tetap	2.916.810.294.269,15	2.669.943.220.792,22
	Ekuitas Dana Diinvestasikan dalam Aset Tetap	2.916.810.294.269,15	2.669.943.220.792,22
	Selisih?	0,00	0,00
	Artikulasi?	**Ya**	**Ya**
#A.2.12	Jumlah Aset Lainnya = Ekuitas Dana Diinvestasikan dalam Aset Lainnya		
	Aset Lainnya	39.674.742.517,49	68.672.507.430,37
	Ekuitas Dana Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	39.674.742.517,49	68.672.507.430,37
	Selisih?	0,00	0,00
	Artikulasi?	**Ya**	**Ya**
#A.2.13	Kewajiban Jangka Panjang = Dana yang Disediakan untuk Pembayaran Kewajiban		
	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
	Dana yang Disediakan untuk Pembayaran Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
	Selisih?	0,00	0,00
	Artikulasi?	**Ya**	**Ya**
#A.3	**ARTIKULASI ANTARPOS LAPORAN ARUS KAS**		
#A.3.1	Saldo Akhir Kas di BUD tahun 20x0 = Saldo Awal Kas di BUD tahun 20x1		
	Saldo Akhir Kas di BUD tahun 20x0	222.353.113.138,01	
	Saldo Awal Kas di BUD tahun 20x1	222.353.113.138,01	
	Selisih?	0,00	
	Artikulasi?	**Ya**	
#A.3.2	Kas Bersih dari Aktivitas Operasi = Arus kas masuk akt. operasi - Arus kas keluar akt. operasi		
	Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	312.945.225.830,10	263.176.119.402,83
	Arus kas masuk dari aktivitas operasi	1.727.282.272.800,33	1.547.051.392.107,47
	-/- Arus kas keluar dari aktivitas operasi	1.414.337.046.970,23	1.283.875.272.704,64
	Jumlah	312.945.225.830,10	263.176.119.402,83
	Selisih?	0,00	0,00
	Artikulasi?	**Ya**	**Ya**
#A.3.3	Kas Bersih dari Aktivitas investasi aset nonkeuangan = Arus kas masuk akt. investasi aset		
	Kas Bersih dari Aktivitas investasi aset nonkeuangan	(233.355.281.656,00)	(253.454.531.591,00)
	Arus kas masuk dari aktivitas investasi aset nonkeuangan	686.440.000,00	553.821.000,00
	-/- Arus kas keluar dari aktivitas investasi aset nonkeuangan	234.041.721.656,00	254.008.352.591,00
	Jumlah	(233.355.281.656,00)	(253.454.531.591,00)
	Selisih?	0,00	0,00
	Artikulasi?	**Ya**	**Ya**

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
ANALISIS ARTIKULASI ANTARPOS-POS DALAM SUATU KOMPONEN LKPD (A)
Per 31 December 2014 dan 2013

	Uraian	2014	2013
#A.3.4	Kas Bersih dari Aktivitas pembiayaan = Arus kas masuk akt. pembiayaan - Arus kas keluar akt. pembiayaan		
	Kas Bersih dari Aktivitas pembiayaan	(20.020.343.837,00)	(45.153.455.442,93)
	Arus kas masuk dari aktivitas pembiayaan	0,00	8.974.122,00
	-/- Arus kas keluar dari aktivitas pembiayaan	20.020.343.837,00	45.162.429.564,93
	Jumlah	(20.020.343.837,00)	(45.153.455.442,93)
	Selisih?	0,00	0,00
	Artikulasi?	**Ya**	**Ya**
#A.3.5	Kas Bersih dari Aktivitas non anggaran = Arus kas masuk akt. non anggaran - Arus kas keluar akt. non anggaran		
	Kas Bersih dari Aktivitas non anggaran	11.450.961,00	6.515.331,28
	Arus kas masuk dari aktivitas non anggaran	50.540.602.229,00	45.283.505.809,78
	-/- Arus kas keluar dari aktivitas non anggaran	50.529.151.268,00	45.276.990.478,50
	Jumlah	11.450.961,00	6.515.331,28
	Selisih?	0,00	0,00
	Artikulasi?	**Ya**	**Ya**
#A.3.6	Kenaikan/Penurunan Kas selama periode = Penjumlahan kas bersih dari setiap aktivitas		
	Kenaikan/Penurunan Kas selama periode	59.581.051.298,10	(35.425.352.299,82)
	Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	312.945.225.830,10	263.176.119.402,83
	+/+ Kas Bersih dari Aktivitas investasi aset nonkeuangan	(233.355.281.656,00)	(253.454.531.591,00)
	+/+ Kas Bersih dari Aktivitas pembiayaan	(20.020.343.837,00)	(45.153.455.442,93)
	+/+ Kas Bersih dari Aktivitas non anggaran	11.450.961,00	6.515.331,28
	Jumlah	59.581.051.298,10	(35.425.352.299,82)
	Selisih?	0,00	0,00
	Artikulasi?	**Ya**	**Ya**

RESUME

#A.1	Jumlah Seharusnya berartikulasi antarpos LRA	2,00	2,00
	Jumlah tidak berartikulasi antarpos LRA	0,00	0,00
	Jumlah berartikulasi antarpos LRA	2,00	2,00
	% Jumlah berartikulasi	100,00	100,00
#A.2	Jumlah Seharusnya berartikulasi antarpos Neraca	13,00	13,00
	Jumlah tidak berartikulasi antarpos Neraca	2,00	0,00
	Jumlah berartikulasi antarpos Neraca	11,00	13,00
	% Jumlah berartikulasi	84,62	100,00
#A.3	Jumlah Seharusnya berartikulasi antarpos LAK	6,00	5,00
	Jumlah tidak berartikulasi antarpos LAK	0,00	0,00
	Jumlah berartikulasi antarpos LAK	6,00	5,00
	% Jumlah berartikulasi	100,00	100,00
#A	Jumlah Seharusnya berartikulasi antarpos LKPD	21,00	20,00
	Jumlah tidak berartikulasi antarpos LKPD	2,00	0,00
	Jumlah berartikulasi antarpos LKPD	19,00	20,00
	% Jumlah berartikulasi	90,48	100,00

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

CONTOH KERTAS KERJA ANALISIS ARTIKULASI LKPD BERBASIS KAS MENUJU AKRUAL
Hasil Memasukkan Angka-angka dari LKPD Format *Excel* ke dalam Kriteria Artikulasi

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
ANALISIS ARTIKULASI ANTARKOMPONEN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (B)
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

	Uraian	2014	2013
#B.1 Artikulasi antara LRA dan Neraca			
#B.1.1	SILPA di LRA = SILPA di Neraca		
	SILPA di LRA	281.934.471.555,61	222.364.871.218,51
	SILPA di Neraca	281.934.471.555,61	222.364.871.218,51
	Selisih?	0,00	0,00
	Artikulasi?	**Ya**	**Ya**
#B.2 Artikulasi antara LAK dan Neraca			
#B.2.1	Saldo Akhir Kas di LAK = Kas di Neraca		
	Saldo Akhir Kas	282.757.494.046,27	222.513.442.816,73
	Kas di Neraca	282.757.494.046,27	222.513.442.816,73
	Selisih?	0,00	0,00
	Artikulasi?	**Ya**	**Ya**
#B.3 Artikulasi antara LRA dan LAK			
#B.3.1	Kas di LAK >= SILPA di LRA		
	Kas di LAK	282.757.494.046,27	222.513.442.816,73
	SILPA di LRA	281.934.471.555,61	222.364.871.218,51
	Selisih >/=?	823.022.490,66	148.571.598,22
	Artikulasi?	**Ya**	**Ya**
#B.3.2	Jumlah Pendapatan di LRA = Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi + Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan		
	Jumlah Pendapatan	1.727.968.712.800,33	1.547.605.213.107,47
	Arus masuk kas dari aktivitas operasi	1.727.282.272.800,33	1.547.051.392.107,47
	+/+ Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan	686.440.000,00	553.821.000,00
	Jumlah	1.727.968.712.800,33	1.547.605.213.107,47
	Selisih?	0,00	0,00
	Artikulasi?	**Ya**	**Ya**
#B.3.3	Jumlah Penerimaan Pembiayaan - Penggunaan SiLPA = Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan		
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	222.364.871.218,51	257.805.712.971,61
	-/- Penggunaan SILPA	222.364.871.218,51	257.796.738.849,61
	Jumlah	0,00	8.974.122,00
	Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan	0,00	8.974.122,00
	Selisih?	0,00	0,00
	Artikulasi?	**Ya**	**Ya**
#B.3.4	Jumlah Belanja + Transfer = Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi + Investasi Aset Nonkeuangan		
	Jumlah Belanja	1.619.334.768.626,23	1.516.339.625.295,64
	+/+ Jumlah Transfer	29.044.000.000,00	21.544.000.000,00
	Jumlah	1.648.378.768.626,23	1.537.883.625.295,64
	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	1.414.337.046.970,23	1.283.875.272.704,64
	+/+ Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan	234.041.721.656,00	254.008.352.591,00
	Jumlah	1.648.378.768.626,23	1.537.883.625.295,64
	Selisih?	0,00	0,00
	Artikulasi?	**Ya**	**Ya**
#B.3.5	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan = Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan		
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	20.020.343.837,00	45.162.429.564,93
	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan	20.020.343.837,00	45.162.429.564,93
	Selisih?	0,00	0,00
	Artikulasi?	**Ya**	**Ya**

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
ANALISIS ARTIKULASI ANTARKOMPONEN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (B)
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

	Uraian	2014	2013
#B.3.6	Jumlah Pendapatan di LRA + Jumlah Penerimaan Pembiayaan - Penggunaan SILPA = Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi + Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan + Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan		
	Jumlah pendapatan	1.727.968.712.800,33	1.547.605.213.107,47
	+/+ Jumlah penerimaan pembiayaan	222.364.871.218,51	257.805.712.971,61
	-/- Penggunaan SILPA	222.364.871.218,51	257.796.738.849,61
	Jumlah	1.727.968.712.800,33	1.547.614.187.229,47
	Arus masuk kas dari aktivitas operasi	1.727.282.272.800,33	1.547.051.392.107,47
	+/+ Arus masuk kas dari aktivitas investasi non keuangan	686.440.000,00	553.821.000,00
	+/+ Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan	0,00	8.974.122,00
	Jumlah	1.727.968.712.800,33	1.547.614.187.229,47
	Selisih?	0,00	0,00
	Artikulasi?	**Ya**	**Ya**
#B.3.7	Jumlah Belanja + Jumlah Transfer + Jumlah pengeluaran pembiayaan = Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi + Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan + Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan		
	Jumlah Belanja	1.619.334.768.626,23	1.516.339.625.295,64
	+/+ JumlahTransfer	29.044.000.000,00	21.544.000.000,00
	-/- Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	20.020.343.837,00	45.162.429.564,93
	Jumlah	1.668.399.112.463,23	1.583.046.054.860,57
	Arus keluar kas dari aktivitas operasi	1.414.337.046.970,23	1.283.875.272.704,64
	+/+ Arus keluar kas dari aktivitas investasi non keuangan	234.041.721.656,00	254.008.352.591,00
	+/+ Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan	20.020.343.837,00	45.162.429.564,93
	Jumlah	1.668.399.112.463,23	1.583.046.054.860,57
	Selisih?	0,00	0,00
	Artikulasi?	**Ya**	**Ya**

RESUME

#B.1	Jumlah Seharusnya berartikulasi antarkomponen LRA dan Neraca	1,00	1,00
	Jumlah tidak berartikulasi antarkomponen LRA dan Neraca	0,00	0,00
	Jumlah berartikulasi antarkomponen LRA dan Neraca	1,00	1,00
	% Jumlah berartikulasi	100,00	100,00
#B.2	Jumlah Seharusnya berartikulasi antarkomponen LAK dan Neraca	1,00	1,00
	Jumlah tidak berartikulasi antarkomponen LAK dan Neraca	0,00	0,00
	Jumlah berartikulasi antarkomponen LAK dan Neraca	1,00	1,00
	% Jumlah berartikulasi	0,00	0,00
#B.3	Jumlah Seharusnya berartikulasi antarkomponen LRA dan LAK	7,00	7,00
	Jumlah tidak berartikulasi antarkomponen LRA dan LAK	0,00	0,00
	Jumlah berartikulasi antarkomponen LRA dan LAK	7,00	7,00
	% Jumlah berartikulasi	100,00	100,00
#B	Jumlah Seharusnya berartikulasi antarkomponen LKPD	9,00	9,00
	Jumlah tidak berartikulasi antarkomponen LKPD	0,00	0,00
	Jumlah berartikulasi antarkomponen LKPD	9,00	9,00
	% Jumlah berartikulasi	100,00	100,00

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

CONTOH KERTAS KERJA ANALISIS ARTIKULASI LKPD BERBASIS AKRUAL

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

	Catatan	Anggaran 2014 (Perubahan) Rp	Realisasi 2014 Rp	%	Realisasi 2013 (Audited) Rp
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH					
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.A.1.a	105.300.000.000,00	110.189.330.128,00	104,64	111.290.149.783,00
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.A.1.b	43.785.757.779,00	43.892.027.090,00	100,24	35.193.668.496,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.A.1.c	11.674.209.360,00	11.775.017.338,00	100,86	10.578.804.726,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.A.1.d	217.154.882.190,00	269.741.314.086,40	124,22	151.286.811.314,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		**377.914.849.329,00**	**435.597.688.642,40**	**115,26**	**308.349.434.319,00**
PENDAPATAN TRANSFER					
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan					
Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.A.2.a	70.082.876.487,00	49.415.131.936,00	70,51	63.704.322.046,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.1.A.2.a	1.118.282.877,00	1.890.143.402,00	169,02	1.077.123.079,00
Dana Alokasi Umum	5.1.A.2.a	1.224.710.992.000,00	1.224.710.992.000,00	100,00	1.127.939.938.000,00
Dana Alokasi Khusus	5.1.A.2.a	82.519.140.000,00	82.519.140.000,00	100,00	78.662.730.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		**1.378.431.291.364,00**	**1.358.535.407.338,00**	**98,56**	**1.271.384.113.125,00**
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya					
Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	~	0,00
Dana Penyesuaian	5.1.A.2.b	320.319.844.000,00	320.319.844.000,00	100,00	315.634.526.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya		**320.319.844.000,00**	**320.319.844.000,00**	**100,00**	**315.634.526.000,00**
Transfer Pemerintah Propinsi					
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.A.2.c	129.579.391.134,00	121.875.968.569,00	94,06	97.969.873.634,00
Pendapatan Bagi Hasil lainnya		0,00	20.877.802.431,00	~	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi		**129.579.391.134,00**	**142.753.771.000,00**	**110,17**	**97.969.873.634,00**
Jumlah Pendapatan Transfer		**1.828.330.526.498,00**	**1.821.609.022.338,00**	**99,63**	**1.684.988.512.759,00**
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
Pendapatan Hibah	5.1.A.3	0,00	1.778.000.000,00	~	0,00
Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00	~	0,00
Pendapatan Lainnya	5.1.A.3	49.689.964.000,00	49.439.687.475,00	99,50	44.298.128.158,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		**49.689.964.000,00**	**51.217.687.475,00**	103,07	**44.298.128.158,00**
JUMLAH PENDAPATAN		**2.255.935.339.827,00**	**2.308.424.398.455,40**	**102,33**	**2.037.636.075.236,00**

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

CONTOH KERTAS KERJA ANALISIS ARTIKULASI LKPD BERBASIS AKRUAL

	Catatan	Anggaran 2014 (Perubahan) Rp	Realisasi 2014 Rp	%	Realisasi 2013 (Audited) Rp
BELANJA					
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	5.1.B.1.a	1.395.296.819.343,00	1.298.564.680.518,00	93,07	1.181.577.521.238,00
Belanja Barang	5.1.B.1.b	547.191.940.824,00	482.193.159.458,00	88,12	372.329.636.302,00
Belanja Bunga		0,00	0,00	~	0,00
Belanja Subsidi		0,00	0,00	~	0,00
Belanja Hibah	5.1.B.1.c	97.415.832.324,00	62.570.682.375,00	64,23	78.211.037.942,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.B.1.d	12.788.190.000,00	9.313.247.652,00	72,83	3.619.410.000,00
Jumlah Belanja Operasi		**2.052.692.782.491,00**	**1.852.641.770.003,00**	**90,25**	**1.635.737.605.482,00**
BELANJA MODAL					
Belanja Tanah	5.1.B.2	20.000.446.000,00	1.556.351.169,00	7,78	1.390.450.720,00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.B.2	117.053.809.967,00	87.010.802.628,00	74,33	54.154.766.712,00
Belanja Bangunan dan Gedung	5.1.B.2	133.781.939.078,00	120.096.753.202,00	89,77	141.955.768.170,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.B.2	157.266.713.174,00	146.102.387.720,00	92,90	113.011.691.498,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.B.2	22.564.129.330,00	5.398.603.922,00	23,93	2.676.297.957,00
Belanja Aset Lainnya		0,00	0,00	~	0,00
Jumlah Belanja Modal		**450.667.037.549,00**	**360.164.898.641,00**	**79,92**	**313.188.975.057,00**
BELANJA TAK TERDUGA					
Belanja Tak Terduga	5.1.B.3	4.409.501.555,00	15.844.594,00	0,36	356.646.000,00
Jumlah Belanja Tak Terduga		**4.409.501.555,00**	**15.844.594,00**	**0,36**	**356.646.000,00**
JUMLAH BELANJA		**2.507.769.321.595,00**	**2.212.822.513.238,00**	**88,24**	**1.949.283.226.539,00**
TRANSFER					
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN					
Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00	~	0,00
Bagi Hasil Retribusi		0,00	0,00	~	0,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	~	0,00
Jumlah Transfer/ Bagi Hasil Pendapatan		**0,00**	**0,00**	**~**	**0,00**
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN					
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	~	0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.C	75.296.486.000,00	71.650.726.987,00	95,16	67.959.057.341,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.C	1.349.811.000,00	853.230.999,00	63,21	810.679.850,00
Transfer Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	~	0,00
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan		**76.646.297.000,00**	**72.503.957.986,00**	**94,60**	**68.769.737.191,00**
JUMLAH TRANSFER		**76.646.297.000,00**	**72.503.957.986,00**	**94,60**	**68.769.737.191,00**
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		**2.584.415.618.595,00**	**2.285.326.471.224,00**	**88,43**	**2.018.052.963.730,00**
SURPLUS/(DEFISIT)		**(328.480.278.768,00)**	**23.097.927.231,40**	**(7,03)**	**19.583.111.506,00**

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

CONTOH KERTAS KERJA ANALISIS ARTIKULASI LKPD BERBASIS AKRUAL

	Catatan	Anggaran 2014 (Perubahan) Rp	Realisasi 2014 Rp	%	Realisasi 2013 (Audited) Rp
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
Penggunaan SiLPA	5.1.D.1	352.480.278.768,00	352.480.276.768,00	100,00	331.470.960.480,00
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	~	22.926.204.782,00
Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00	~	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		**352.980.278.768,00**	**352.480.276.768,00**	**99,86**	**354.397.165.262,00**
PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	~	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.1.D.2	23.000.000.000,00	23.000.000.000,00	100,00	20.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang		0,00	0,00	~	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.D.2	1.500.000.000,00	1.490.000.000,00	99,33	1.500.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		**24.500.000.000,00**	**24.490.000.000,00**	**99,96**	**21.500.000.000,00**
PEMBIAYAAN NETO		**328.480.278.768,00**	**327.990.276.768,00**	**99,85**	**332.897.165.262,00**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		**0,00**	**351.088.203.999,40**	**~**	**352.480.276.768,00**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Purwokerto, 2015

BUPATI BANYUMAS

Ir. ACHMAD HUSEIN

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

CONTOH KERTAS KERJA ANALISIS ARTIKULASI LKPD BERBASIS AKRUAL

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Per 31 Desember 2014 dan 2013

	Catatan	2014	2013 (Unaudited)
		Rp	Rp
SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL		352.480.276.768,00	331.470.960.480,00
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.A	352.480.276.768,00	331.470.960.480,00
Sub Total		0,00	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.2.B	351.088.203.999,40	352.480.276.768,00
Sub Total		351.088.203.999,40	352.480.276.768,00
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0,00	0,00
Lain-lain		0,00	0,00
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR	5.2.C	**351.088.203.999,40**	**352.480.276.768,00**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Purwokerto, 2015
BUPATI BANYUMAS

Ir. ACHMAD HUSEIN

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

CONTOH KERTAS KERJA ANALISIS ARTIKULASI LKPD BERBASIS AKRUAL

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
NERACA
Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013
(Dalam Rupiah)

	Catatan	31 Desember 2014 Rp	31 Desember 2013 Rp
ASET			
ASET LANCAR			
Kas	5.3.A.1	358.027.399.212,40	353.183.383.735,00
Investasi Jangka Pendek	5.3.A.2	-	0,00
Piutang			
Piutang Pendapatan	5.3.A.3	84.928.158.598,70	81.841.805.474,20
Piutang Lain-lain		-	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	5.3.A.4	(39.527.951.901,31)	(33.069.535.279,58)
Jumlah Piutang (Bersih)		45.400.206.697,39	48.772.270.194,62
Beban Dibayar di Muka	5.3.A.5	134.605.227,00	82.209.926,00
Persediaan	5.3.A.6	23.629.125.686,77	25.570.071.060,29
Jumlah Aset Lancar		**427.191.336.823,56**	**427.607.934.915,91**
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Non Permanen	5.3.B.1		
Dana Bergulir		8.850.313.631,00	7.360.313.631,00
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	5.3.B.2	(1.890.233.216,30)	(1.327.734.443,00)
Jumlah Investasi Non Permanen (Bersih)		6.960.080.414,70	6.032.579.188,00
Investasi Permanen	5.3.B.3	155.851.442.386,32	124.058.652.125,32
Jumlah Investasi Jangka Panjang		**162.811.522.801,02**	**130.091.231.313,32**
ASET TETAP			
Tanah	5.3.C	2.321.406.492.842,00	2.313.347.121.804,00
Peralatan dan Mesin	5.3.C	551.770.846.488,69	470.906.264.545,69
Gedung dan Bangunan	5.3.C	1.187.362.372.960,56	1.040.502.727.829,56
Jalan, Jaringan dan Instalasi	5.3.C	1.239.253.172.324,00	1.079.414.695.442,00
Aset Tetap Lainnya	5.3.C	105.743.601.320,36	91.997.206.993,58
Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.C	3.277.421.273,00	24.587.199.591,00
Akumulasi Penyusutan	5.3.C	(1.536.228.571.833,95)	0,00
Jumlah Aset Tetap		**3.872.585.335.374,66**	**5.020.755.216.205,83**
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		-	0,00
Jumlah Dana Cadangan		**-**	**0,00**
ASET LAINNYA			
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran		-	0,00
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		-	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.D.1	109.073.514.465,00	116.409.008.465,00
Aset Tidak Berwujud		-	0,00
Aset Lain-lain	5.3.D.2	28.609.339.571,24	13.859.944.095,07
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	5.3.D.3	(25.740.559.261,50)	0,00
Jumlah Aset Lainnya		**111.942.294.774,74**	**130.268.952.560,07**
JUMLAH ASET		**4.574.530.489.773,9800**	**5.708.723.334.995,13**

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

CONTOH KERTAS KERJA ANALISIS ARTIKULASI LKPD BERBASIS AKRUAL

	Catatan	31 Desember 2014 Rp	31 Desember 2013 Rp
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.3.E.1.a	93.639.077,00	126.399.944,00
Utang Bunga		-	0,00
Utang Pajak		-	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		-	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.E.1.b	464.313.377,84	426.519.907,25
Utang Beban	5.3.E.1.c	18.471.891.832,98	1.257.470.136,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.E.1.d	39.976.890.308,00	57.844.890.075,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**59.006.734.595,82**	**59.655.280.062,25**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Dalam Negeri		-	0,00
Utang Luar Negeri		-	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		**59.006.734.595,82**	**59.655.280.062,25**
EKUITAS			
EKUITAS		4.515.523.755.178,16	5.649.068.054.932,88
JUMLAH EKUITAS		**4.515.523.755.178,16**	**5.649.068.054.932,88**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		**4.574.530.489.773,98**	**5.708.723.334.995,13**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Purwokerto, 2015
BUPATI BANYUMAS

Ir. ACHMAD HUSEIN

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

CONTOH KERTAS KERJA ANALISIS ARTIKULASI LKPD BERBASIS AKRUAL

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2014 dan 2013

	Catatan	2014	2013 (Unaudited)
		Rp	Rp
EKUITAS AWAL	5.4.A	5.649.068.054.932,88	5.191.439.289.032,85
SURPLUS/DEFISIT-LO	5.4.B	273.782.487.884,60	351.137.350.408,10
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:			
Koreksi Nilai Persediaan		-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	-
Lain-lain	5.4.C	(1.407.326.787.639,32)	106.491.415.491,93
EKUITAS AKHIR		**4.515.523.755.178,16**	**5.649.068.054.932,88**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Purwokerto, 2015
BUPATI BANYUMAS

Ir. ACHMAD HUSEIN

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

CONTOH KERTAS KERJA ANALISIS ARTIKULASI LKPD BERBASIS AKRUAL

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

	Catatan	2014 Rp	2013 Rp	Kenaikan/ (Penurunan) Rp	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH					
Pendapatan Pajak Daerah	5.5.B.1.a	113.393.999.783,00	126.105.567.806,00	(12.711.568.023,00)	(10,08)
Pendapatan Retribusi Daerah	5.5.B.1.b	43.966.984.590,00	36.063.637.989,00	7.903.346.601,00	21,92
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.B.1.c	20.567.807.599,00	17.430.773.198,50	3.137.034.400,50	18,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.5.B.1.d	261.743.353.061,31	170.443.073.347,95	91.300.279.713,36	53,57
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		**439.672.145.033,31**	**350.043.052.341,45**	**89.629.092.691,86**	**25,61**
PENDAPATAN TRANSFER					
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan					
Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.B.2	49.415.131.936,00	58.503.432.693,00	(9.088.300.757,00)	(15,53)
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.5.B.2	1.890.143.402,00	6.278.012.432,00	(4.387.869.030,00)	(69,89)
Dana Alokasi Umum	5.5.B.2	1.224.710.992.000,00	1.127.939.938.000,00	96.771.054.000,00	8,58
Dana Alokasi Khusus	5.5.B.2	82.519.140.000,00	78.662.730.000,00	3.856.410.000,00	4,90
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		**1.358.535.407.338,00**	**1.271.384.113.125,00**	**87.151.294.213,00**	**6,85**
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya					
Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	~
Dana Penyesuaian	5.5.B.2	320.319.844.000,00	315.634.526.000,00	4.685.318.000,00	1,48
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya		**320.319.844.000,00**	**315.634.526.000,00**	**4.685.318.000,00**	**1,48**
Transfer Pemerintah Provinsi					
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.5.B.2	121.875.968.569,00	97.814.520.876,21	24.061.447.692,79	24,60
Pendapatan Bagi Hasil lainnya	5.5.B.2	20.877.802.431,00	0,00	20.877.802.431,00	~
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi		**142.753.771.000,00**	**97.814.520.876,21**	**44.939.250.123,79**	**45,94**
Jumlah Pendapatan Transfer		**1.821.609.022.338,00**	**1.684.833.160.001,21**	**136.775.862.336,79**	**8,12**
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.5.B.3				
Pendapatan Hibah		152.481.800.843,00	42.359.605.915,00	110.122.194.928,00	259,97
Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	~
Pendapatan Lainnya		49.439.687.475,00	44.298.128.158,00	5.141.559.317,00	11,61
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		**201.921.488.318,00**	**86.657.734.073,00**	**115.263.754.245,00**	133,01
JUMLAH PENDAPATAN		**2.463.202.655.689,31**	**2.121.533.946.415,66**	**341.668.709.273,65**	**16,10**

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

CONTOH KERTAS KERJA ANALISIS ARTIKULASI LKPD BERBASIS AKRUAL

	Catatan	2014 Rp	2013 Rp	Kenaikan/ (Penurunan) Rp	%
BEBAN					
Beban Pegawai	5.5.C	1.303.397.627.781,98	1.162.648.705.944,00	140.748.921.837,98	12,11
Beban Barang	5.5.C	599.053.358.294,95	396.458.556.814,49	202.594.801.480,46	51,10
Beban Bunga		0,00	0,00	0,00	~
Beban Subsidi		0,00	0,00	0,00	~
Beban Hibah	5.5.C	62.570.682.375,00	77.905.158.942,00	(15.334.476.567,00)	(19,68)
Beban Bantuan Sosial	5.5.C	9.313.247.652,00	3.619.410.000,00	5.693.837.652,00	157,31
Beban Penyusutan	5.5.C	128.878.104.573,75	0,00	128.878.104.573,75	~
Beban Penyisihan	5.5.C	7.299.868.772,73	31.214.236.125,18	(23.914.367.352,45)	(76,61)
Beban Transfer	5.5.C	72.503.957.986,00	68.769.737.191,00	3.734.220.795,00	5,43
Beban Lain-lain	5.5.C	562.498.773,30	451.283.535,00	111.215.238,30	24,64
JUMLAH BEBAN		**2.183.579.346.209,71**	**1.741.067.088.551,67**	**442.512.257.658,04**	**25,42**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI OPERASI		**279.623.309.479,60**	**380.466.857.863,99**	**(100.843.548.384,40)**	**(26,51)**
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0,00	0,00	0,00	~
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	~
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0,00	0,00	0,00	~
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	~
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.5.C.3	(3.630.324.020,00)	(24.659.045.229,89)	21.028.721.209,89	(85,28)
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		**(3.630.324.020,00)**	**(24.659.045.229,89)**	**21.028.721.209,89**	**(85,28)**
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		**275.992.985.459,60**	**355.807.812.634,10**	**(79.814.827.174,50)**	**(22,43)**
POS LUAR BIASA					
Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	~
Beban Luar Biasa	5.5.C.4	2.210.497.575,00	4.670.462.226,00	(2.459.964.651,00)	(52,67)
Jumlah Pos Luar Biasa		**(2.210.497.575,00)**	**(4.670.462.226,00)**	**2.459.964.651,00**	**(52,67)**
SURPLUS/(DEFISIT)-LO		**273.782.487.884,60**	**351.137.350.408,10**	**(77.354.862.523,50)**	**(22,03)**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Purwokerto, 2015
BUPATI BANYUMAS

Ir. ACHMAD HUSEIN

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

CONTOH KERTAS KERJA ANALISIS ARTIKULASI LKPD BERBASIS AKRUAL

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

	Catatan	Tahun 2014 Rp	Tahun 2013 (Audited) Rp
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Pajak Daerah	5.6.A.1	110.189.330.128,00	111.290.149.783,00
Penerimaan Retribusi Daerah	5.6.A.1	43.892.027.090,00	35.193.668.496,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahk	5.6.A.1	11.775.017.338,00	10.578.804.726,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	5.6.A.1	268.699.895.087,40	150.227.842.914,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.6.A.1	49.415.131.936,00	58.503.432.693,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	5.6.A.1	1.890.143.402,00	6.278.012.432,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.6.A.1	1.224.710.992.000,00	1.127.939.938.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.6.A.1	82.519.140.000,00	78.662.730.000,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	5.6.A.1	320.319.844.000,00	315.634.526.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	5.6.A.1	121.875.968.569,00	97.969.873.634,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	5.6.A.1	20.877.802.431,00	0,00
Penerimaan Hibah	5.6.A.1	1.778.000.000,00	0,00
Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
Penerimaan Lainnya	5.6.A.1	49.439.687.475,00	44.298.128.158,00
Jumlah Arus Masuk Kas		**2.307.382.979.456,40**	**2.036.577.106.836,00**
Arus Keluar Kas			
Pembayaran Pegawai	5.6.A.2	1.298.564.680.518,00	1.181.577.521.238,00
Pembayaran Barang dan Jasa	5.6.A.2	482.193.159.458,00	372.329.636.302,00
Pembayaran Bunga		0,00	0,00
Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
Pembayaran Hibah	5.6.A.2	62.570.682.375,00	78.211.037.942,00
Pembayaran Bantuan Sosial	5.6.A.2	9.313.247.652,00	3.619.410.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	5.6.A.2	72.503.957.986,00	68.769.737.191,00
Pembayaran Tak Terduga	5.6.A.2	15.844.594,00	356.646.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		**1.925.161.572.583,00**	**1.704.863.988.673,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		**382.221.406.873,40**	**331.713.118.163,00**
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
Arus Masuk Kas			
Pencairan Dana Cadangan		0,00	22.926.204.782,00
Penerimaan Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.6.B.1	370.460.000,00	639.270.000,00
Penerimaan penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.6.B.1	663.758.999,00	0,00
Penerimaan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	5.6.B.1	7.200.000,00	0,00
Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya		0,00	419.698.400,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen			
Jumlah Arus Masuk Kas		**1.041.418.999,00**	**23.985.173.182,00**

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

CONTOH KERTAS KERJA ANALISIS ARTIKULASI LKPD BERBASIS AKRUAL

	Catatan	Tahun 2014	Tahun 2013 (Audited)
		Rp	Rp
Arus Keluar Kas			
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
Perolehan Tanah	5.6.B.2	1.556.351.169,00	1.390.450.720,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	5.6.B.2	87.010.802.628,00	54.154.766.712,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	5.6.B.2	120.096.753.202,00	141.955.768.170,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.6.B.2	146.102.387.720,00	113.011.691.498,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.6.B.2	5.398.603.922,00	2.676.297.957,00
Perolehan Aset Lainnya		-	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.6.B.2	24.490.000.000,00	20.000.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		**384.654.898.641,00**	**333.188.975.057,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		**(383.613.479.642,00)**	**(309.203.801.875,00)**
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Pinjaman Daerah	5.6.C	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	5.6.C	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		**0,00**	**0,00**
Arus Keluar Kas			
Pembayaran Pokok Utang	5.6.C	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	5.6.C	0,00	1.500.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		**0,00**	**1.500.000.000,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		**0,00**	**(1.500.000.000,00)**
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris			
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.6.D.1	136.338.044.821,00	166.120.683.385,00
Arus Kas Masuk Transitoris Lainnya	5.6.D.1	1.543.531.933,00	184.886.709,00
Penerimaan Kembali Sisa Uang Persediaan Tahun Lalu	5.6.D.1	863.894.706,00	551.558.204,00
Jumlah Arus Masuk Kas		**138.745.471.460,00**	**166.857.128.298,00**
Arus Keluar Kas			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.6.D.2	136.338.044.821,00	166.120.683.385,00
Arus Kas Keluar Transitoris Lainnya	5.6.D.2	1.526.735.247,00	373.949.743,00
Sisa Uang Persediaan Tahun Berjalan	5.6.D.2	391.689.715,00	847.417.206,00
Jumlah Arus Keluar Kas		**138.256.469.783,00**	**167.342.050.334,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		**489.001.677,00**	**(484.922.036,00)**
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode		(903.071.091,60)	20.524.394.252,00
Saldo Awal Kas Daerah dan BLUD		351.609.502.333,00	331.085.108.081,00
Saldo Akhir Kas Daerah dan BLUD		350.706.431.241,40	351.609.502.333,00
Kas di Bendahara Penerimaan		470.651.333,00	576.560.511,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		476.224.035,00	997.320.891,00
Kas Lainnya		6.374.092.603,00	0,00
Saldo Akhir Kas		**358.027.399.212,40**	**353.183.383.735,00**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Purwokerto, 2015
BUPATI BANYUMAS

Ir. ACHMAD HUSEIN

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

CONTOH KERTAS KERJA ANALISIS ARTIKULASI LKPD BERBASIS AKRUAL

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

(dalam rupiah)

URAIAN	REALISASI 2014	REALISASI 2013
PENDAPATAN		
PENDAPATAN ASLI DAERAH		
Pendapatan Pajak Daerah	110.189.330.128,00	111.290.149.783,00
Pendapatan Retribusi Daerah	43.892.027.090,00	35.193.668.496,00
Pendapatan Hsl Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	11.775.017.338,00	10.578.804.726,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	269.741.314.086,40	151.286.811.314,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**435.597.688.642,40**	**308.849.434.319,00**
PENDAPATAN TRANSFER		
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		
Dana Bagi Hasil Pajak	49.415.131.936,00	63.704.322.046,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.890.143.402,00	1.077.123.079,00
Dana Alokasi Umum	1.224.710.992.000,00	1.127.939.938.000,00
Dana Alokasi Khusus	82.519.140.000,00	78.662.730.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	**1.356.535.407.338,00**	**1.271.384.113.125,00**
Transfer Pemerintah Pusat- Lainya		
Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
Dana Penyesuaian	320.319.844.000,00	315.634.526.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Lainya	**320.319.844.000,00**	**315.634.526.000,00**
Transfer Pemerintah Provinsi		
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	121.875.968.569,00	97.969.873.634,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	20.877.802.431,00	0,00
Jumlah Pendapatan Pemerintah Provinsi	**142.753.771.000,00**	**97.969.873.634,00**
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	**1.821.609.022.338,00**	**1.684.988.512.759,00**
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		
Pendapatan Hibah	1.778.000.000,00	0,00
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00
Pendapatan Lainya	49.439.687.475,00	44.298.128.158,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	**51.217.687.475,00**	**44.298.128.158,00**
JUMLAH PENDAPATAN	**2.308.424.398.455,40**	**2.037.636.075.236,00**
BELANJA		
BELANJA OPERASI		
Belanja Pegawai	1.298.564.680.518,00	1.181.577.521.238,00
Belanja Barang	482.193.159.458,00	372.329.636.302,00
Bunga	0,00	0,00
Subsidi	0,00	0,00
Hibah	62.570.682.375,00	78.211.037.942,00
Bantuan Sosial	9.313.247.652,00	3.619.410.000,00
JUMLAH BELANJA OPERASI	**1.852.641.770.003,00**	**1.635.737.605.482,00**
BELANJA MODAL		
Belanja Tanah	1.556.351.169,00	1.390.450.720,00
Belanja Peralatan dan Mesin	87.010.802.628,00	54.154.766.712,00
Belanja Gedung dan Bangunan	120.096.753.202,00	141.955.768.170,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	146.102.387.720,00	113.011.691.498,00
Belanja Aset Tetap Lainya	5.398.603.922,00	2.676.297.957,00
Belanja Aset Lainya	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA MODAL	**360.164.898.641,00**	**313.188.975.057,00**
BELANJA TAK TERDUGA		
Belanja Tak Terduga	15.844.594,00	356.646.000,00
Jumlah Belanja Tak terduga	**15.844.594,00**	**356.646.000,00**
JUMLAH BELANJA	**2.212.822.513.238,00**	**1.949.283.226.539,00**

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

CONTOH KERTAS KERJA ANALISIS ARTIKULASI LKPD BERBASIS AKRUAL

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

(dalam rupiah)

URAIAN	REALISASI 2014	REALISASI 2013
TRANSFER		
TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA		
Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN		
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	71.650.726.987,00	67.959.057.341,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	853.230.999,00	810.679.850,00
Bantuan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	**72.503.957.986,00**	**68.769.737.191,00**
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	**2.285.326.471.224,00**	**2.018.052.963.730,00**
SURPLUS / DEFISIT	**23.097.927.231,40**	**19.583.111.506,00**
PEMBIAYAAN		
Penerimaan Daerah		
Penggunaan SiLPA	352.480.276.768,00	331.470.960.480,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	22.926.204.782,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan	**352.480.276.768,00**	**354.397.165.262,00**
Pengeluaran Daerah		
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	23.000.000.000,00	20.000.000.000,00
Pemberian Pinjaman Daerah	1.490.000.000,00	1.500.000.000,00
Jumlah Pengeluaran	**24.490.000.000,00**	**21.500.000.000,00**
Pembiayaan Netto	**327.990.276.768,00**	**332.897.165.262,00**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**351.088.203.999,40**	**352.480.276.768,00**

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

CONTOH KERTAS KERJA ANALISIS ARTIKULASI LKPD BERBASIS AKRUAL

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

(dalam rupiah)

URAIAN	Tahun 2014	Tahun 2013
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan Pajak Daerah	110.189.330.128,00	111.290.149.783,00
Pendapatan Retribusi Daerah	43.892.027.090,00	35.193.668.496,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.775.017.338,00	10.578.804.726,00
Lain-lain PAD yang Sah	268.699.895.087,40	150.227.842.914,00
Dana Bagi Hasil Pajak	49.415.131.936,00	58.503.432.693,00
Bagi Hasil Bukan Pajak	1.890.143.402,00	6.278.012.432,00
Dana Alokasi Umum	1.224.710.992.000,00	1.127.939.938.000,00
Dana Alokasi Khusus	82.519.140.000,00	78.662.730.000,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	320.319.844.000,00	315.634.526.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	121.875.968.569,00	97.969.873.634,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	20.877.802.431,00	0,00
Pendapatan Hibah	1.778.000.000,00	0,00
Penerimaan Dana Darurat	0,00	0,00
Penerimaan Lainnya	49.439.687.475,00	44.298.128.158,00
Jumlah Arus Masuk Kas	**2.307.382.979.456,40**	**2.036.577.106.836,00**
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai	1.298.564.680.518,00	1.181.577.521.238,00
Pembayaran Barang dan Jasa	482.193.159.458,00	372.329.636.302,00
Pembayaran Bunga	0,00	0,00
Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
Pembayaran Hibah	62.570.682.375,00	78.211.037.942,00
Pembayaran Bantuan Sosial	9.313.247.652,00	3.619.410.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	72.503.957.986,00	68.769.737.191,00
Pembayaran Tak Terduga	15.844.594,00	356.646.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	**1.925.161.572.583,00**	**1.704.863.988.673,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**382.221.406.873,40**	**331.713.118.163,00**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Masuk Kas		
Pencairan Dana Cadangan	0,00	22.926.204.782,00
Penerimaan Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	370.460.000,00	639.270.000,00
Penerimaan penjualan atas Gedung dan Bangunan	663.758.999,00	0,00
Penerimaan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	7.200.000,00	0,00
Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya	0,00	419.698.400,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	**1.041.418.999,00**	**23.985.173.182,00**
Arus Keluar Kas		
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Perolehan Tanah	1.556.351.169,00	1.390.450.720,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	87.010.802.628,00	54.154.766.712,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	120.096.753.202,00	141.955.768.170,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	146.102.387.720,00	113.011.691.498,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.398.603.922,00	2.676.297.957,00
Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	24.490.000.000,00	20.000.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	**384.654.896.641,00**	**333.188.975.057,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	**(383.613.479.642,00)**	**(309.203.801.875,00)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pinajaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	**0,00**	**0,00**
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	1.500.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	**0,00**	**1.500.000.000,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	**0,00**	**(1.500.000.000,00)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.id/

CONTOH KERTAS KERJA ANALISIS ARTIKULASI LKPD BERBASIS AKRUAL

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

(dalam rupiah)

URAIAN	Tahun 2014	Tahun 2013
Arus Kas Masuk Transitoris Lainnya	1.543.531.933,00	184.886.709,00
Penerimaan Kembali Sisa Uang Persediaan Tahun Lalu	863.894.706,00	551.558.204,00
Jumlah Arus Masuk Kas	**138.745.471.460,00**	**166.857.128.296,00**
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	136.338.044.821,00	166.120.683.385,00
Arus Kas Keluar Transitoris Lainnya	1.526.735.247,00	373.949.743,00
Sisa Uang Persediaan Tahun Berjalan	391.689.715,00	847.417.206,00
Jumlah Arus Keluar Kas	**138.256.469.783,00**	**167.342.050.334,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	**489.001.677,00**	**(484.922.036,00)**
Kenaikan/Penurunan Kas	**(903.071.091,60)**	**20.524.394.252,00**
Saldo Awal Kas Daerah dan BLUD	**351.609.502.333,00**	**331.085.108.081,00**
Saldo Akhir Kas Daerah dan BUD	**350.706.431.241,40**	**351.609.502.333,00**
Kas di Bendahara Penerimaan	**470.651.333,00**	**576.560.511,00**
Kas di Bendahara Pengeluaran	**476.234.035,00**	**997.320.891,00**
Kas Lainnya	**6.374.092.603,00**	**0,00**
Saldo Akhir Kas	**358.027.399.212,40**	**353.183.383.735,00**

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

CONTOH KERTAS KERJA ANALISIS ARTIKULASI LKPD BERBASIS AKRUAL

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

(dalam rupiah)

URAIAN	REALISASI 2014	REALISASI 2013
SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	**352.480.276.768,00**	**331.470.960.480,00**
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	352.480.276.768,00	331.470.960.480,00
Sub Total	0,00	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	351.088.203.999,40	352.480.276.768,00
Sub Total	351.088.203.999,40	352.480.276.768,00
Koreksi kesalahan tahun sebelumnya	0,00	0,00
Lain-lain	0,00	0,00
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR	**351.088.203.999,40**	**352.480.276.768,00**

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

CONTOH KERTAS KERJA ANALISIS ARTIKULASI LKPD BERBASIS AKRUAL

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
NERACA
Per 31 Desember 2014 dan 2013

(dalam rupiah)

URAIAN	2014	2013
ASET		
ASET LANCAR		
Kas	358.027.399.212,40	353.183.383.735,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	84.928.158.598,70	81.841.805.474,20
Piutang Lain-lain	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(39.527.951.901,31)	(33.069.535.279,58)
Beban dibayar dimuka	134.605.227,00	82.209.926,00
Persediaan	23.629.125.686,77	25.570.071.060,29
Jumlah Aset Lancar	**427.191.336.823,56**	**427.607.934.915,91**
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen		
Dana Bergulir	8.850.313.631,00	7.360.313.631,00
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	(1.890.233.216,30)	(1.327.734.443,00)
Jumlah Investasi Non Permanen (Bersih)	**6.960.080.414,70**	**6.032.579.188,00**
Investasi Permanen	155.851.442.386,32	124.058.652.125,32
Jumlah Investasi Jangka Panjang	**162.811.522.801,02**	**130.091.231.313,32**
ASET TETAP		
T a n a h	2.321.406.492.842,00	2.313.347.121.804,00
Peralatan dan mesin	551.770.846.488,69	470.906.264.545,69
Gedung dan Bangunan	1.187.362.372.960,56	1.040.502.727.829,56
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.239.253.172.324,00	1.079.414.695.442,00
Aset Tetap Lainnya	105.743.601.320,36	91.997.206.993,58
Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.277.421.273,00	24.587.199.591,00
Akumulasi Penyusutan	(1.536.228.571.833,95)	0,00
Jumlah Aset Tetap	**3.872.585.335.374,66**	**5.020.755.216.205,83**
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
Jumlah Dana Cadangan	**0,00**	**0,00**
ASET LAINNYA		
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	109.073.514.465,00	116.409.008.465,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	28.609.339.571,24	13.859.944.095,07
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(25.740.559.261,50)	0,00
Jumlah Aset Lainnya	**111.942.294.774,74**	**130.268.952.560,07**
JUMLAH ASET	**4.574.530.489.773,98**	**5.708.723.334.996,13**
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	93.639.077,00	126.399.944,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pajak	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	464.313.377,84	426.519.907,25
Utang Beban	18.471.891.832,98	1.257.470.136,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	39.976.890.308,00	57.844.890.075,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**59.006.734.595,82**	**59.655.280.062,25**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Luar Negeri	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	**0,00**	**0,00**
JUMLAH KEWAJIBAN	**59.006.734.595,82**	**59.655.280.062,25**
EKUITAS	**4.515.523.755.178,16**	**5.649.068.054.932,88**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**4.574.530.489.773,98**	**5.708.723.334.995,13**

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

CONTOH KERTAS KERJA ANALISIS ARTIKULASI LKPD BERBASIS AKRUAL

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

URAIAN	2014	2013
KEGIATAN OPERASIONAL		
PENDAPATAN		
PENDAPATAN ASLI DAERAH		
Pendapatan Pajak Daerah	113.393.999.783,00	126.105.567.806,00
Pendapatan Retribusi Daerah	43.966.984.590,00	36.063.637.989,00
Pendapatan Hsl Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	20.567.807.599,00	17.430.773.198,50
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	261.743.353.061,31	170.443.073.347,95
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**439.672.145.083,31**	**350.043.052.341,45**
PENDAPATAN TRANSFER		
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		
Dana Bagi Hasil Pajak	49.415.131.936,00	58.503.432.693,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.890.143.402,00	6.278.012.432,00
Dana Alokasi Umum	1.224.710.992.000,00	1.127.939.938.000,00
Dana Alokasi Khusus	82.519.140.000,00	78.662.730.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	**1.358.535.407.336,00**	**1.271.384.113.125,00**
Transfer Pemerintah Pusat- Lainya		
Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
Dana Penyesuaian	320.319.844.000,00	315.634.526.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Lainya	**320.319.844.000,00**	**315.634.526.000,00**
Transfer Pemerintah Provinsi		
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	121.875.968.569,00	97.814.520.876,21
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	20.877.802.431,00	0,00
Jumlah Pendapatan Pemerintah Provinsi	**142.753.771.000,00**	**97.814.520.876,21**
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	**1.821.609.022.336,00**	**1.684.833.160.001,21**
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		
Pendapatan Hibah	152.481.800.843,00	42.359.605.915,00
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00
Pendapatan Lainya	49.439.687.475,00	44.298.128.158,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	**201.921.488.318,00**	**86.657.734.073,00**
JUMLAH PENDAPATAN	**2.463.202.655.689,31**	**2.121.533.946.415,66**
BEBAN		
Beban Pegawai	1.303.397.627.781,98	1.162.648.705.944,00
Beban Barang	599.053.358.294,95	396.458.556.814,49
Beban Bunga	0,00	0,00
Beban Subsidi	0,00	0,00
Beban Hibah	62.570.682.375,00	77.905.158.942,00
Beban Bantuan Sosial	9.313.247.652,00	3.619.410.000,00
Beban Penyusutan	128.878.104.573,75	0,00
Beban Penyisihan	7.299.868.772,73	31.214.236.125,18
Beban Transfer	72.503.957.986,00	68.769.737.191,00
Beban Lain-lain	562.498.773,30	451.283.535,00
JUMLAH BEBAN	**2.183.579.346.209,71**	**1.741.067.088.551,67**
SURPLUS / DEFISIT	**279.623.309.479,60**	**380.466.857.863,99**
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NONOPERASIONAL		
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(3.630.324.020,00)	(24.659.045.229,89)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NONOPERASIONAL	**(3.630.324.020,00)**	**(24.659.045.229,89)**
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	**275.992.985.459,60**	**355.807.812.634,10**
POS LUAR BIASA		
Pendapatan Luar Biasa		
Beban Luar Biasa	2.210.497.575,00	4.670.462.226,00
JUMLAH POS LUAR BIASA	**(2.210.497.575,00)**	**(4.670.462.226,00)**
SURPLUS / DEFISIT - LO	**273.782.487.884,60**	**351.137.350.408,10**

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

CONTOH KERTAS KERJA ANALISIS ARTIKULASI LKPD BERBASIS AKRUAL

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

URAIAN	2014 Rp.	2013 Rp.
EKUITAS AWAL	**5.649.068.054.932,88**	**5.191.439.289.082,85**
Surplus/Defisit-LO	273.782.487.884,60	351.137.350.408,10
Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar:		
Koreksi nilai persediaan	0,00	0,00
Koreksi Revakuasi Aset Tetap	0,00	0,00
Lain-lain	(1.407.326.787.639,32)	106.491.415.491,93
EKUITAS AKHIR	**4.515.523.755.178,16**	**5.649.068.054.932,88**

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

CONTOH KERTAS KERJA ANALISIS ARTIKULASI LKPD BERBASIS AKRUAL

KERTAS KERJA ARTIKULASI LKPD BASIS AKRUAL
ANALISIS ARTIKULASI ANTARPOS DALAM KOMPONEN LKPD (C)
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

	Uraian	2014	2013
#C.1	**ARTIKULASI ANTARPOS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**		
#.C.1.1	Jumlah Pendapatan LRA - Jumlah Belanja - Jumlah Transfer = Surplus/Defisit		
	Pendapatan-LRA	2.308.424.398.455,40	2.037.636.075.236,00
	-/- Belanja	2.212.822.513.238,00	1.949.283.226.539,00
	-/- Transfer	72.503.957.986,00	68.769.737.191,00
	Jumlah	23.097.927.231,40	19.583.111.506,00
	Surplus/Defisit-LRA	23.097.927.231,40	19.583.111.506,00
	Selisih?	0,00	0,00
	Artikulasi?	**Ya**	**Ya**
#.C.1.2	SiLPA/SiKPA= Surplus/Defisit LRA + Penerimaan Pembiayaan - Pengeluaran		
	SiLPA/SiKPA	351.088.203.999,40	352.480.276.768,00
	Surplus/Defisit-LRA	23.097.927.231,40	19.583.111.506,00
	+/+ Penerimaan Pembiayaan	352.480.276.768,00	354.397.165.262,00
	-/- Pengeluaran Pembiayaan	24.490.000.000,00	21.500.000.000,00
	Jumlah	351.088.203.999,40	352.480.276.768,00
	Selisih?	0,00	0,00
	Artikulasi?	**Ya**	**Ya**
#C.2	**ARTIKULASI ANTARPOS DI LAPORAN PERUBAHAN SAL**		
#C.2.1	SAL akhir 2013 = SAL Awal 2014		
	SAL akhir 2013	352.480.276.768,00	
	SAL Awal 2014	352.480.276.768,00	
	Selisih?	0,00	
	Artikulasi?	**Ya**	
#C.3	**ARTIKULASI ANTARPOS DI LAPORAN ARUS KAS**		
#C.3.1	Saldo Akhir Kas di BUD tahun 20x0 = Saldo Awal Kas di BUD tahun 20x1		
	Saldo Akhir Kas di BUD tahun 20x0	351.609.502.333,00	
	Saldo Awal Kas di BUD tahun 20x1	351.609.502.333,00	
	Selisih?	0,00	
	Artikulasi?	**Ya**	
#C.3.2	Kas Bersih dari Aktivitas Operasi = Arus kas masuk akt. operasi - Arus kas keluar akt. operasi		
	Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	382.221.406.873,40	331.713.118.163,00
	Arus kas masuk dari aktivitas operasi	2.307.382.979.456,40	2.036.577.106.836,00
	-/- Arus kas keluar dari aktivitas operasi	1.925.161.572.583,00	1.704.863.988.673,00
	Jumlah	382.221.406.873,40	331.713.118.163,00
	Selisih?	0,00	0,00
	Artikulasi?	**Ya**	**Ya**
#C.3.3	Kas Bersih dari Aktivitas investasi = Arus kas masuk akt. investasi - Arus kas keluar akt. investasi		
	Kas Bersih dari Aktivitas investasi	(383.613.479.642,00)	(309.203.801.875,00)
	Arus kas masuk dari aktivitas investasi	1.041.418.999,00	23.985.173.182,00
	-/- Arus kas keluar dari aktivitas investasi	384.654.898.641,00	333.188.975.057,00
	Jumlah	(383.613.479.642,00)	(309.203.801.875,00)
	Selisih?	0,00	0,00
	Artikulasi?	**Ya**	**Ya**
#C.3.4	Kas Bersih dari Aktivitas pendanaan = Arus kas masuk Aktivitas Pendanaan - Arus kas keluar Aktivitas Pendanaan		
	Kas Bersih dari Aktivitas pendanaan	0,00	(1.500.000.000,00)
	Arus kas masuk dari Aktivitas pendanaan	0,00	0,00
	-/- Arus kas keluar dari Aktivitas pendanaan	0,00	1.500.000.000,00
	Jumlah	0,00	(1.500.000.000,00)
	Selisih?	0,00	0,00
	Artikulasi?	**Ya**	**Ya**
#C.3.5	Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris = Arus kas masuk akt. transitoris - Arus kas keluar akt. Transitoris		
	Kas Bersih dari Aktivitas transitoris	489.001.677,00	(484.922.036,00)
	Arus kas masuk dari aktivitas transitoris	138.745.471.460,00	166.857.128.298,00

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

CONTOH KERTAS KERJA ANALISIS ARTIKULASI LKPD BERBASIS AKRUAL

KERTAS KERJA ARTIKULASI LKPD BASIS AKRUAL
ANALISIS ARTIKULASI ANTARPOS DALAM KOMPONEN LKPD (C)
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

	Uraian	2014	2013
	Selisih?	0,00	0,00
	Artikulasi?	**Ya**	**Ya**
#C.3.6	Kenaikan/Penurunan Kas selama periode = Penjumlahan kas bersih dari setiap aktivitas		
	Kenaikan/Penurunan Kas selama periode	(903.071.091,60)	20.524.394.252,00
	Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	382.221.406.873,40	331.713.118.163,00
	+/+ Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(383.613.479.642,00)	(309.203.801.875,00)
	+/+ Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	(1.500.000.000,00)
	+/+ Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	489.001.677,00	(484.922.036,00)
	Jumlah	(903.071.091,60)	20.524.394.252,00
	Selisih?	0,00	0,00
	Artikulasi?	**Ya**	**Ya**
	#C.4 ARTIKULASI ANTARPOS LAPORAN OPERASIONAL		
#C.4.1	Jumlah Pendapatan LO - Jumlah Beban = Surplus/Defisit Kegiatan Operasional		
	Jumlah Pendapatan-LO	2.463.202.655.689,31	2.121.533.946.415,66
	-/- Jumlah Beban	2.183.579.346.209,71	1.741.067.088.551,67
	Jumlah	279.623.309.479,60	380.466.857.863,99
	Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	279.623.309.479,60	380.466.857.863,99
	Selisih?	0,00	0,00
	Artikulasi?	**Ya**	**Ya**
#C.4.2	Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional + Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional + Pos Luar Biasa = Surplus/Defisit-LO		
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	279.623.309.479,60	380.466.857.863,99
	+/+ Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(3.630.324.020,00)	(24.659.045.229,89)
	+/+ Pos Luar Biasa	(2.210.497.575,00)	(4.670.462.226,00)
	Jumlah	273.782.487.884,60	351.137.350.408,10
	Surplus/Defisit - Laporan Operasional	273.782.487.884,60	351.137.350.408,10
	Selisih?	0,00	0,00
	Artikulasi?	**Ya**	**Ya**
	#C.5 ARTIKULASI ANTARPOS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS		
#C.5.1	Ekuitas akhir 2013 = Ekuitas Awal 2014		
	Ekuitas akhir 2013	5.649.068.054.932,88	
	Ekuitas awal 2014	5.649.068.054.932,88	
	Selisih?	0,00	
	Artikulasi?	**Ya**	
	#C.6 ARTIKULASI ANTARPOS DALAM NERACA		
#C.6.1	Jumlah Aset = Jumlah Kewajiban + Jumlah Ekuitas		
	Jumlah Aset	4.574.530.489.773,98	5.708.723.334.995,13
	Jumlah Kewajiban	59.006.734.595,82	59.655.280.062,25
	+/+ Jumlah Ekuitas	4.515.523.755.178,16	5.649.068.054.932,88
	Jumlah	4.574.530.489.773,98	5.708.723.334.995,13
	Selisih?	0,00	0,00
	Artikulasi?	**Ya**	**Ya**
#C.6.2	Jumlah Aset = Jumlah Aset Lancar + Jumlah Investasi Jangka Panjang + Jumlah Aset Tetap + Jumlah Dana Cadangan + Jumlah Aset Lainnya		
	Jumlah Aset	4.574.530.489.773,98	5.708.723.334.995,13
	Jumlah Aset Lancar	427.191.336.823,56	427.607.934.915,91
	+/+ Jumlah Investasi Jangka Panjang	162.811.522.801,02	130.091.231.313,32
	+/+ Jumlah Aset Tetap	3.872.585.335.374,66	5.020.755.216.205,83
	+/+ Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00
	+/+ Jumlah Aset Lainnya	111.942.294.774,74	130.268.952.560,07
	Jumlah	4.574.530.489.773,98	5.708.723.334.995,13
	Selisih?	0,00	0,00
	Artikulasi?	**Ya**	**Ya**
#C.6.3	Jumlah Kewajiban = Jumlah Kewajiban Jangka Pendek + Jumlah Kewajiban		
	Jumlah Kewajiban	59.006.734.595,82	59.655.280.062,25
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	59.006.734.595,82	59.655.280.062,25

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

CONTOH KERTAS KERJA ANALISIS ARTIKULASI LKPD BERBASIS AKRUAL

KERTAS KERJA ARTIKULASI LKPD BASIS AKRUAL
ANALISIS ARTIKULASI ANTARPOS DALAM KOMPONEN LKPD (C)
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

	Uraian	2014	2013
RESUME			
#C.1	Jumlah Seharusnya berartikulasi antarpos dalam LRA	2,00	2,00
	Jumlah tidak berartikulasi antarpos dalam LRA	0,00	0,00
	Jumlah berartikulasi antarpos dalam LRA	2,00	2,00
	% Jumlah berartikulasi	100,00	100,00
#C.2	Jumlah Seharusnya berartikulasi antarpos dalam LPSAL	1,00	
	Jumlah tidak berartikulasi antarpos dalam LPSAL	0,00	
	Jumlah berartikulasi antarpos dalam LPSAL	1,00	
	% Jumlah berartikulasi	100,00	
#C.3	Jumlah Seharusnya berartikulasi antarpos dalam LAK	6,00	5,00
	Jumlah tidak berartikulasi antarpos dalam LAK	0,00	0,00
	Jumlah berartikulasi antarpos dalam LAK	6,00	5,00
	% Jumlah berartikulasi	100,00	100,00
#C.4	Jumlah Seharusnya berartikulasi antarpos dalam LO	2,00	2,00
	Jumlah tidak berartikulasi antarpos dalam LO	0,00	0,00
	Jumlah berartikulasi antarpos dalam LO	2,00	2,00
	% Jumlah berartikulasi	100,00	100,00
#C.5	Jumlah Seharusnya berartikulasi antarpos dalam LPE	1,00	
	Jumlah tidak berartikulasi antarpos dalam LPE	0,00	
	Jumlah berartikulasi antarpos dalam LPE	1,00	
	% Jumlah berartikulasi	100,00	
#C.6	Jumlah Seharusnya berartikulasi antarpos dalam Neraca	3,00	3,00
	Jumlah tidak berartikulasi antarpos dalam Neraca	0,00	0,00
	Jumlah berartikulasi antarpos dalam Neraca	3,00	3,00
	% Jumlah berartikulasi	100,00	100,00
#C	Jumlah Seharusnya berartikulasi antarpos-pos dalam LKPD	15,00	12,00
	Jumlah tidak berartikulasi antarpos-pos dalam LKPD	0,00	0,00
	Jumlah berartikulasi antarpos-pos dalam LKPD	15,00	12,00
	% Jumlah berartikulasi	100,00	100,00

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

CONTOH KERTAS KERJA ANALISIS ARTIKULASI LKPD BERBASIS AKRUAL

KERTAS KERJA ARTIKULASI LKPD BASIS AKRUAL
ANALISIS ARTIKULASI ANTARKOMPONEN LAPORAN KEUANGAN (D)
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

	Uraian	2014	2013
#D.1	**ARTIKULASI ANTARA LRA DAN LPSAL**		
#D.1.1	Penggunaan SILPA di LRA = Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan di LPSAL		
	Penggunaan SILPA di LRA	352.480.276.768,00	331.470.960.480,00
	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan di LPSAL	352.480.276.768,00	331.470.960.480,00
	Selisih?	0,00	0,00
	Artikulasi?	**Ya**	**Ya**
#D.1.2	SILPA/SIKPA di LRA = SILPA/SIKPA di LPSAL		
	SILPA/SIKPA di LRA	351.088.203.999,40	352.480.276.768,00
	SILPA/SIKPA di LPSAL	351.088.203.999,40	352.480.276.768,00
	Selisih?	0,00	0,00
	Artikulasi?	**Ya**	**Ya**
#D.2	**ARTIKULASI LRA DAN LAK**		
#D.2.1	Kas di LAK >= SILPA di LRA		
	Kas di LAK	358.027.399.212,40	353.183.383.735,00
	SILPA di LRA	351.088.203.999,40	352.480.276.768,00
	Selisih >/=?	6.939.195.213,00	703.106.967,00
	Artikulasi?	**Ya**	**Ya**
#D.2.2	Jumlah Pendapatan di LRA = Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi + Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi - Hasil Penjuala Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - Pencairan Dana Cadangan		
	Jumlah pendapatan-LRA	2.308.424.398.455,40	2.037.636.075.236,00
	Arus masuk kas dari aktivitas operasi	2.307.382.979.456,40	2.036.577.106.836,00
	+/+ Arus masuk kas dari aktivitas investasi	1.041.418.999,00	23.985.173.182,00
	-/- Pencairan Dana Cadangan	0,00	22.926.204.782,00
	-/- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
	Jumlah	2.308.424.398.455,40	2.037.636.075.236,00
	Selisih?	0,00	0,00
	Artikulasi?	**Ya**	**Ya**
#D.2.3	Jumlah Penerimaan Pembiayaan - Penggunaan SILPA - Pencairan Dana Cadangan - Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan = Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan		
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	352.480.276.768,00	354.397.165.262,00
	-/- Penggunaan SILPA	352.480.276.768,00	331.470.960.480,00
	-/- Pencairan Dana Cadangan	0,00	22.926.204.782,00
	-/- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00
	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
	Selisih?	0,00	0,00
	Artikulasi?	**Ya**	**Ya**
#D.2.4	Jumlah Belanja dan Transfer = Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi + Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi - Pembentukan Dana Cadangan - Penyertaan Modal Pemerintah		
	Jumlah Belanja	2.212.822.513.238,00	1.949.283.226.539,00
	+/+ Jumlah Transfer	72.503.957.986,00	68.769.737.191,00
	Jumlah	2.285.326.471.224,00	2.018.052.963.730,00
	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	1.925.161.572.583,00	1.704.863.988.673,00
	+/+ Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	384.654.898.641,00	333.188.975.057,00
	-/- Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
	-/- Penyertaan Modal Pemerintah	24.490.000.000,00	20.000.000.000,00
	Jumlah	2.285.326.471.224,00	2.018.052.963.730,00
	Selisih?	0,00	0,00
	Artikulasi?	**Ya**	**Ya**
#D.2.5	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan - Pembentuka Dana Cadangan - Penyertaan Modal Pemerintah = Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan		
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	24.490.000.000,00	21.500.000.000,00
	-/- Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
	-/- Penyertaan Modal Pemerintah	23.000.000.000,00	20.000.000.000,00
	Jumlah	1.490.000.000,00	1.500.000.000,00
	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	1.500.000.000,00
	Selisih?	1.490.000.000,00	0,00
	Artikulasi?	**Tidak**	**Ya**

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

CONTOH KERTAS KERJA ANALISIS ARTIKULASI LKPD BERBASIS AKRUAL

KERTAS KERJA ARTIKULASI LKPD BASIS AKRUAL
ANALISIS ARTIKULASI ANTARKOMPONEN LAPORAN KEUANGAN (D)
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

	Uraian	2014	2013
#D.2.6	Jumlah Pendapatan di LRA + Jumlah Penerimaan Pembiayaan - Penggunaan SILPA = Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi + Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi + Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan		
	Jumlah pendapatan	2.308.424.398.455,40	2.037.636.075.236,00
	+/+ Jumlah penerimaan pembiayaan	352.480.276.768,00	354.397.165.262,00
	-/- Penggunaan SILPA	352.480.276.768,00	331.470.960.480,00
	Jumlah	2.308.424.398.455,40	2.060.562.280.018,00
	Arus masuk kas dari aktivitas operasi	2.307.382.979.456,40	2.036.577.106.836,00
	+/+ Arus masuk kas dari Aktivitas Investasi	1.041.418.999,00	23.985.173.182,00
	+/+ Arus masuk kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
	Jumlah	2.308.424.398.455,40	2.060.562.280.018,00
	Selisih?	0,00	0,00
	Artikulasi?	**Ya**	**Ya**
#D.2.7	Jumlah Belanja + Jumlah Transfer + Jumlah pengeluaran pembiayaan = Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi + Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi + Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan		
	Jumlah Belanja	2.212.822.513.238,00	1.949.283.226.539,00
	+/+ JumlahTransfer	72.503.957.986,00	68.769.737.191,00
	-/- Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	24.490.000.000,00	21.500.000.000,00
	Jumlah	2.309.816.471.224,00	2.039.552.963.730,00
	Arus keluar kas dari aktivitas operasi	1.925.161.572.583,00	1.704.863.988.673,00
	+/+ Arus keluar kas dari Aktivitas Investasi	384.654.898.641,00	333.188.975.057,00
	+/+ Arus keluar kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	1.500.000.000,00
	Jumlah	2.309.816.471.224,00	2.039.552.963.730,00
	Selisih?	0,00	0,00
	Artikulasi?	**Ya**	**Ya**
#D.3 ARTIKULASI ANTARA LAK DAN NERACA			
#D.3.1	Saldo Kas Akhir di LAK = Saldo Kas di Neraca		
	Saldo Kas Akhir di LAK	358.027.399.212,40	353.183.383.735,00
	Saldo Kas di Neraca	358.027.399.212,40	353.183.383.735,00
	Selisih?	0,00	0,00
	Artikulasi?	**Ya**	**Ya**
#D.4 ARTIKULASI ANTARA LAK DAN LPSAL			
#D.4.1	Saldo Kas Akhir di LAK >= SAL Akhir di LP SAL		
	Saldo Kas Akhir di LAK	358.027.399.212,40	353.183.383.735,00
	SAL Akhir	351.088.203.999,40	352.480.276.768,00
	Saldo Kas Akhir di LAK >= SAL Akhir di LP SAL?	6.939.195.213,00	703.106.967,00
	Artikulasi?	**Ya**	**Ya**
#D.5 ARTIKULASI ANTARA LO DAN LPE			
#D.5.1	Surplus/Defisit - LO di LO = Surplus/Defisit LO di LPE		
	Surplus/Defisit - LO di LO	273.782.487.884,60	351.137.350.408,10
	Surplus/Defisit LO di LPE	273.782.487.884,60	351.137.350.408,10
	Selisih?	0,00	0,00
	Artikulasi?	**Ya**	**Ya**
#D.6 ARTIKULASI ANTARA LO DAN NERACA			
#D.6.1	Beban Penyusutan di LO = Beban Penyusutan Aset Tetap + Beban Penyusutan Aset Lain-lain di CaLK		
	Beban Penyusutan di LO	128.878.104.573,75	128.878.104.573,75
	Beban Penyusutan Aset Tetap di CaLK	128.124.292.368,75	128.124.292.368,75
	+/+ Beban Penyusutan Aset Lain-lain di CaLK	753.812.205,00	753.812.205,00
	Jumlah	128.878.104.573,75	128.878.104.573,75
	Selisih?	0,00	0,00
	Artikulasi?	**Ya**	**Ya**
#D.6.2	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2013 + Penyusutan Aset Tetap karena perubahan kebijakan + Penyusutan Aset Tetap 2014 - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Dihapuskan = Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2014		
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2013 di Neraca	0,00	
	+/+ Penyusutan Aset Tetap karena perubahan kebijakan (awal) di CaLK	1.412.634.271.532,20	
	+/+ Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun 2014 di LO	128.124.292.368,75	
	-/- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Dihapuskan di CaLK	4.529.992.067,00	
	Sub Jumlah	1.536.228.571.833,95	
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2014 di Neraca	(1.536.228.571.833,95)	
	Selisih?	0,00	
	Artikulasi?	**Ya**	

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa dan Bali yang Beropini WTP
Mohamad Ahlal Firdau, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

CONTOH KERTAS KERJA ANALISIS ARTIKULASI LKPD BERBASIS AKRUAL

KERTAS KERJA ARTIKULASI LKPD BASIS AKRUAL
ANALISIS ARTIKULASI ANTARKOMPONEN LAPORAN KEUANGAN (D)
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

	Uraian	2014	2013
#D.6.3	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2013 + Penyusutan Aset Lain-lain karena perubahan kebijakan + Penyusutan Aset Lain-lain 2014 - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain yang Dihapuskan = Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2014		
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2013 di Neraca	0,00	
	+/+ Penyusutan Aset Lain-lain karena perubahan kebijakan (awal) di CaLK	25.086.671.370,50	
	+/+ Beban Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2014 di LO	753.812.205,00	
	-/- Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain yang Dihapuskan di CaLK	99.924.314,00	
	Sub Jumlah	25.740.559.261,50	
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2014 di Neraca	(25.740.559.261,50)	
	Selisih?	0,00	
	Artikulasi?	**Ya**	
#D.6.4	Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih 20x1 di Neraca = Penyisihan Piutang Tak Tertagih 20x0 di Neraca + Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 20x1 di LO		
	Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih 20x1 di Neraca	39.527.951.901,31	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih 20x0 di Neraca	31.741.800.836,58	
	+/+ Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 20x1 di LO	7.299.868.772,73	
	Sub Jumlah	39.041.669.609,31	
	Selisih?	486.282.292,00	
	Artikulasi?	**Tidak**	
#D.7	**ARTIKULASI ANTARA LPE DAN NERACA**		
#D.7.1	Ekuitas Akhir di LPE = Ekuitas di Neraca		
	Ekuitas Akhir di LPE	4.515.523.755.178,16	5.649.068.054.932,88
	Ekuitas di Neraca	4.515.523.755.178,16	5.649.068.054.932,88
	Selisih?	0,00	0,00
	Artikulasi?	**Ya**	**Ya**
RESUME			
#D.1	Jumlah Seharusnya berartikulasi antarkomponen LRA dan LPSAL	2,00	2,00
	Jumlah tidak berartikulasi antarkomponen LRA dan LPSAL	0,00	0,00
	Jumlah berartikulasi antarkomponen LRA dan LPSAL	2,00	2,00
	% Jumlah berartikulasi	100,00	100,00
#D.2	Jumlah Seharusnya berartikulasi antarkomponen LRA dan LAK	7,00	7,00
	Jumlah tidak berartikulasi antarkomponen LRA dan LAK	1,00	0,00
	Jumlah berartikulasi antarkomponen LRA dan LAK	6,00	7,00
	% Jumlah berartikulasi	85,71	100,00
#D.3	Jumlah Seharusnya berartikulasi antarkomponen LAK dan Neraca	1,00	1,00
	Jumlah tidak berartikulasi antarkomponen LAK dan Neraca	0,00	0,00
	Jumlah berartikulasi antarkomponen LAK dan Neraca	1,00	1,00
	% Jumlah berartikulasi	100,00	100,00
#D.4	Jumlah Seharusnya berartikulasi antarkomponen LAK dan LPSAL	1,00	1,00
	Jumlah tidak berartikulasi antarkomponen LAK dan LPSAL	0,00	0,00
	Jumlah berartikulasi antarkomponen LAK dan LPSAL	1,00	1,00
	% Jumlah berartikulasi	100,00	100,00
#D.5	Jumlah Seharusnya berartikulasi antarkomponen LO dan LPE	1,00	1,00
	Jumlah tidak berartikulasi antarkomponen antarkomponen LO dan LPE	0,00	0,00
	Jumlah berartikulasi antarkomponen antarkomponen LO dan LPE	1,00	1,00
	% Jumlah berartikulasi	100,00	
#D.6	Jumlah Seharusnya berartikulasi antarkomponen LO dan Neraca	4,00	1,00
	Jumlah tidak berartikulasi antarkomponen LO dan Neraca	1,00	0,00
	Jumlah berartikulasi antarkomponen LO dan Neraca	3,00	1,00
	% Jumlah berartikulasi	75,00	100,00
#D.7	Jumlah Seharusnya berartikulasi antarkomponen LPE dan Neraca	1,00	1,00
	Jumlah tidak berartikulasi antarkomponen LO dan Neraca	0,00	0,00
	Jumlah berartikulasi antarkomponen LO dan Neraca	1,00	1,00
	% Jumlah berartikulasi	100,00	
#D	Jumlah Seharusnya berartikulasi antarkomponen LKPD	17,00	14,00
	Jumlah tidak berartikulasi antarkomponen LKPD	2,00	0,00
	Jumlah berartikulasi antarkomponen LKPD	15,00	14,00
	% Jumlah berartikulasi	88,24	100,00